

TESIS

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
PASANGAN AIM-NATSIR RAHMAT
DENGAN JARGON “POLMAN JAGO”**



**NURFADILA
2130131004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

TESIS

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
PASANGAN AIM-NATSIR RAHMAT
DENGAN JARGON “POLMAN JAGO”**



**OLEH:
NURFADILA
2130131004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
PASANGAN AIM-NATSIR RAHMAT
DENGAN JARGON “POLMAN JAGO”**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Ilmu Komunikasi

Disusun dan diajukan oleh

NURFADILA

kepada

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

TESIS

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN AIM-NATSIR RAHMAT DENGAN JARGON "POLMAN JAGO"

Disusun dan diajukan oleh

NURFADILA

Nomor Pokok

2130131004

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis pada tanggal 6 April 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

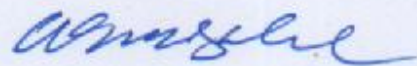
Tim Pembimbing,

Ketua,

Anggota,



Dr. Muhammad Asdar, M.Si



Dr. Nur Alim Djalil, S.Sos., M.I.Kom

Program Magister Ilmu Komunikasi,

Ketua Program Studi,



Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom.,
M.I.Kom

Dekan Fakultas Pascasarjana,



Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M.

TESIS

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN AIM-NATSIR RAHMAT DENGAN JARGON "POLMAN JAGO"

Disusun dan diajukan oleh

NURFADILA

Nomor Pokok

2130131004

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 6 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Dewan Penguji,

NO	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Asdar, M.Si	Ketua	
2.	Dr. Nur Alim Djalil, S.Sos., M.I.Kom	Sekretaris	
3.	Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	
4.	Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota	
5.	Dr. Syamsu Rizal, S.Sos., M.Si	Anggota	

Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi

Fakultas Pascasarjana

Universitas Fajar


UNIFA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom., M.I.Kom

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurfadila
Nomor Mahasiswa : 2130131004
Program Studi : Ilmu Komunikasi Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Maret 2023

Yang menyatakan,


Nurfadila

PRAKATA

Dengan mengucap rasa syukur dan perasaan luar biasa saya tidak menyangka sampai sejauh ini, dengan segala keterbatasan yang saya miliki penantian momentum ini akhirnya telah tiba yakni menyerahkan salinan tesis ini kepada pihak Sekretariat Universitas Fajar, perasaan campur aduk sambil menghela nafas Panjang. Ini adalah momentum luar biasa bagi saya di sela-sela aktivitas saya sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus wiraswasta, dengan pengalaman yang hampir separuh hidup saya berkecimpung di organisasi kesenian saya berupaya untuk memaksimalkan setiap potensi saya dan ini tentunya hal yang tidaklah mudah sekalipun saya begitu familiar dengan model berbagai interaksi ke masyarakat namun secara teoritis ini merupakan pengalamanyang baru saya jalani. komunikasi politik merupakan ilmu yang terbilang baru, bagi saya tantangan di bidang ini sangatlah besar namun ba, untuk maju dan berkembang semua hal mesti dilalui, yang akhirnya saya begitu bersyukur tesis ini dapat selesai dengan upaya yang begitu keras.

Berangkat dari niat ingin berkembang sejak awal saya ingin agar tesis ini memiliki manfaat bagi banyak orang terlebih untuk tempat asal saya polewali mandar agar memberi efek sosial. berangkat dari itu semangat saya tumbuh untuk menyelami situasi dan kondisi pemerintahan polewali mandar yang sejak awal memang saya termasuk awam disitu untuk selanjutnya merangkai alur tesis ini dengan keterbatasan saya.

Oleh karenanya, atas selesainya tesis ini, dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih kepada:

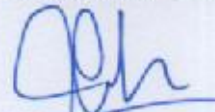
- Bapak Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar dan figur sentral dalam tesis ini
- Tim POLMAN JAGO yang selalu membantu memberikan informasi yang saya butuhkan
- Bapak Dr. Muhammad Asdar, M.si dan Dr. Nur Alim Djalil, S.sos., M.I.Kom selaku pembimbing tesis dan mentor yang tidak hentinya memberi asupan ide dalam diskusi, membuka cakrawala, dan kritik dalam proses selama

ini;

- Para staf Bupati Polman, khususnya mereka di Rumah Dinas yang teramat suportif dan memberikan akses yang luar biasa pada saya selama penelitian berlangsung;
- Teman-teman di kelas Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, namun sosok-sosoknya hadir dalam diskusi di kelas dan lorong kampus, sesi dialektika, atas persahabatan yang luar biasa;
- Orang tua saya, Alm. Bapak H. ABD Gani yang selalu menjadi inspirasi, dan Ibu Nurhayati – yang cinta dan dukungannya pada saya telah melampaui tuturan kata;
- Semua saudara kandung tercinta yang begitu luar biasa memberikan dukungan. Suamiku Tercinta Yusri Usman yang selalu memberikan ruang untuk berbuat lebih jauh, serta anak-anakku Khasyvul, Deeja dan Ali yang keceriaannya selalu menjadi pemicu semangat disaat Lelah;
- Adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam yang terus memberikan begitubanyak bantuan referensi dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata dengan penuh harapan agar tesis ini menjadi referensi bagi para pembaca yang memiliki impian untuk terus berkembang, saya pun bermimpi agar para pembaca mampu memahami dengan baik tesis ini serta memberikan ruang inspirasi yang lebih demi terwujudnya bangsa kita yang cerdas dan sejahtera untuk generasi sekarang dan di masa depan.

Makassar, 10 Maret 2023



Nurfadila

ABSTRAK

Nurfadila. *Strategi Komunikasi Politik Pasangan AIM-NATSIR Dengan Jargon “Polman Jago” (Dibimbing oleh Muhammad Asdar dan Nur Alim Djali)*

Pemilihan kepala daerah merupakan efek dari desentralisasi di Indonesia, yang tumbuh seiring gelombang demokratisasi, ini kemudian meniscayakan rakyat dengan kewenangannya mesti memilih kepala daerahnya sendiri Namun bersamaan dengan kehadiran wewenang tersebut, timbul permasalahan ketidak-seimbangan informasi, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang kompetensi dan preferensi kebijakan pemimpin mereka. Hal ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menciptakan hubungan interaktif dengan masyarakatnya dan membangun kepercayaan mereka. Disisi lain para kandidat pun mesti menemukan formulasi khusus atau strategi untuk mendapatkan keberpihakan dari rakyat di suatu wilayah.

Untuk memahami hubungan dan strategi tersebut, Peneliti merumuskan tujuan diadakannya penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini AIM dalam mengelola hubungan dengan masyarakat Polewali Mandar, dilihat dari bingkai pendekatan dramaturgi Erving Goffman; kedua untuk menganalisis bagaimana AIM menggunakan strategi komunikasi politik tersebut dalam menjaga hubungannya selaku Bupati Polewali Mandar dengan masyarakat Polewali Mandar sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepadanya. ketiga, untuk menganalisis strategi komunikasi jargon POLMAN JAGO dalam rangka memecahkan persoalan keagenan di masyarakat, Peneliti mendapati bahwa melalui sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, AIM dengan jargon “Polman Jago” melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidak-seimbangan informasi di Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk menjawab itu Peneliti juga menggunakan teknik analisis dokumen, yakni mengumpulkan data primer (melalui wawancara dengan objek yang bersangkutan) dan sekunder dari berbagai literatur kepustakaan. Dokumen-dokumen yang menjadi rujukan terkait subjek penelitian antara lain: beberapa penelitian yang telah ditulis sebelumnya terkait model komunikasi dan jargon, Buku dan jurnal terkait jargon politik, Surat kabar dan berita online mengenai AIM-Natsir Rahmat, aspek-aspek kepemimpinannya, dan hal-hal terkait lainnya seperti Profil Kabupaten Polman, Tulisan atau postingan AIM-Natsir Rahmat di media social, Dokumentasi foto aktivitas AIM-Natsir Rahmat dalam kurun waktu dua periode terakhir.

Dalam perjalanan penelitian, peneliti kemudian mendapatkan hasil kesimpulan yakni, di kabupaten polewali mandar terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan keagenan akibat efek dari desentralisasi, kedua AIM dalam menjalankan perannya seringkali memainkan peran Dramaturginya, ketiga melalui jargon “Polman Jago”, AIM mampu menjaga keseimbangan kepentingan, memecah kebuntuan akibat persoalan keagenan di masyarakat.

Kata kunci: Strategi, Komunikasi, Politik, Aim-Natsir, Polman Jago.

ABSTRACT

Nurfadila. Political Communication Strategy of the AIM-NATSIR Pair with the Jargon "Polman Jago" (Guided by Muhammad Asdar and Nur Alim Djalil)

Local elections are a consequence of decentralization in Indonesia, which has grown alongside the wave of democratization, allowing citizens to exercise their right to choose their own local leaders. However, with the emergence of these new powers, there has been a lack of balanced information, resulting from the public's lack of knowledge about the competence and policy preferences of their leaders. This underscores the importance of a local leader to create an interactive relationship with their community and build their trust. On the other hand, candidates must find a specific formulation or strategy to gain the support of the people in a given region.

To understand this relationship and strategy, the researcher formulated the following objectives for this study: first, to analyze the political communication strategy used by local leaders, in this case AIM, in managing their relationship with the people of Polewali Mandar, viewed through the framework of Erving Goffman's dramaturgical approach; second, to analyze how AIM uses this political communication strategy to maintain his relationship as the Bupati (Regent) of Polewali Mandar with the people of Polewali Mandar, who have delegated power to him; and third, to analyze the communication strategy of the "Polman Jago" jargon in solving agency problems in the community. The researcher found that through a stance that is not always consistent with the dramaturgical understanding, AIM, with the jargon "Polman Jago", carried out various political communication strategies to mitigate the imbalance of information in Polewali Mandar District.

To answer these questions, the researcher also used document analysis techniques, collecting primary data (through interviews with relevant subjects) and secondary data from various literature sources. Documents related to the research subject included: several previous studies related to communication models and political jargon, books and journals related to political jargon, newspapers and online news about AIM-Natsir Rahmat, aspects of his leadership, and other related topics such as the Profile of Polewali Mandar District, AIM-Natsir Rahmat's writings or posts on social media, and photographic documentation of AIM-Natsir Rahmat's activities during the last two periods.

During the course of the study, the researcher arrived at the following conclusions: in Polewali Mandar District, there are several problems related to agency issues resulting from the effects of decentralization. Second, AIM often plays his dramaturgical role in carrying out his duties. Third, through the "Polman Jago" jargon, AIM was able to maintain a balance of interests and resolve agency problems in the community.

Keywords: *Strategy, Communication, Politics, Aim-Natsir, Polman Jago.*

DAFTAR ISI

PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1. Desentralisasi dan Dampaknya	1
2. Peran Pemimpin Daerah	4
3. Hubungan Pemimpin Daerah dan Masyarakat	7
B. PERUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. MANFAAT PENELITIAN	16
1. Signifikansi Akademis.....	16
2. Signifikansi Praktis	17
E. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN	20
B. TINJAUAN KONSEP DAN TEORI	23
1. Komunikasi Politik.....	23
2. Politisi Sebagai Pimpinan Politik	24
3. Pendekatan Dramaturgi.....	25
4. Dramaturgi Dalam Politik	37
5. Teori Keagenan	39
C. KERANGKA KONSEPTUAL	47
D. DEFINISI OPERASIONAL	48

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN.....	49
B. PENGELOLAAN PERAN SEBAGAI PENELITI.....	49
C. LOKASI PENELITIAN.....	51
D. SUMBER DATA.....	51
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	53
F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	54
G. PENGECEKAN VALIDASI PENEMUAN.....	54
H. TAHAP PENELITIAN.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. KOTA POLEWALI MANDAR : LOKASI AKSI AIM.....	56
1. Latar Belakang Kota Polman.....	56
2. Latar Belakang Hubungan AIM dengan Warga Polewali.....	60
B. PENDEKATAN DRAMATURGI DALAM KOMUNIKASI POLITIK AIM.....	63
1. Panggung Depan AIM.....	63
2. Panggung Belakang AIM.....	76
3. Kontrol AIM Terhadap Informasi.....	80
4. Manajemen Impresi AIM.....	82
C. KOMUNIKASI POLITIK AIM DALAM TEORI KEAGENAN.....	91
1. Hubungan Keagenan Aim Dan Warga Polewali di Pilkada 2018	91
2. Strategi Komunikasi Politik AIM DalamMenyeimbangkan Informasi.....	92
3. Tampak Selarasnya Kepentingan AIM dengan Kepentingan Masyarakat Polewali.....	104
D. STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK AIM MELALUI JARGON POLMAN JAGO.....	108
1. Agitasi Massa Pendukung.....	108
2. Program Yang Ditawarkan (POLMAN JAGO).....	109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. KESIMPULAN PENELITIAN	111
B. IMPLIKASI PENELITIAN.....	120
1. Implikasi Akademis.....	120
2. Implikasi Praktis.....	122
C. KEKURANGAN PENELITIAN	124
D. SARAN-SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN	129
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Pilkada Polewali 2018.....	62
Tabel 4.2. Perbandingan jumlah undangan ke acara seremonial/ formal kepada AIM, yang didisposisi dan yang dihadiri sendiri.....	66
Tabel 4.3. Hasil Pilkada Polewali 2018 (KPU)	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	47
Gambar 4.1. Model Pendekatan Dramaturgi Dalam Aplikasinya..	88

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
AIM	Andi Ibrahim Masdar
KPU	Komisi Pemilihan Umum
Pemilukada	Pemilihan Kepala Daerah
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
POLMAN	Polewali Mandar
SULBAR	Sulawesi Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Desentralisasi dan Dampaknya

Sejak pertengahan 1970, dunia mengalami pertumbuhan demokrasi yang sangat tinggi. Diamond (1997:2) mencatat bahwa dari tahun 1974 sampai 1996, jumlah negara yang dapat dikategorikan sebagai negara demokratis bertambah dari sekitar 40 negara menjadi 76 sampai 117 negara, tergantung bagaimana cara seseorang mendefinisikan makna “demokratisasi”. Samuel Huntington menyebut fenomena pertumbuhan negara demokrasi di periode ini sebagai “Demokratisasi Gelombang Ketiga” (Huntington, 1991:3), yang kemudian dipopulerkan oleh para peneliti sesudahnya. Sebagaimana dikutip Diamond, Huntington mendefinisikan periode ini sebagai “sekelompok transisi dari rezim non-demokratis menjadi rezim demokratis pada suatu periode yang spesifik, yang secara signifikan lebih banyak daripada transisi berlawanan di periode yang sama” (1997:2).

Demokratisasi Gelombang Ketiga ini berkaitan erat dengan konsep desentralisasi kekuasaan. Diamond berargumen bahwa norma-norma yang ada di dalam suatu negara demokratis mampu mendorong tumbuhnya mekanisme penyelesaian konflik masyarakat di dalam

negara tersebut, dan salah satu mekanisme ini adalah “otonomi regional yang diiringi dengan devolusi kekuasaan yang sesungguhnya” (1997:4). Hal ini sejalan dengan pandangan Bergh (2004:781) bahwa devolusi kekuasaan adalah salah satu bentuk dari desentralisasi, sebagaimana definisi yang dikutip dari Litvack et al. sebagai berikut:

“Devolusi adalah suatu penyerahan otoritas dari pemerintah pusat menyerahkan otoritas pengambilan keputusan, alokasi keuangan, serta manajemen kepada pemerintah lokal yang semi-otonom, termasuk di antaranya adalah wewenang untuk memilih pemimpin dan anggota Dewan Perwakilannya, mengatur tingkat pendapatannya, dan memiliki otoritas yang menentukan kebijakan investasi di daerahnya” (dalam Bergh, 2004:781).

Ide dasar desentralisasi, menurut Knight dan Johnson (2011:51) adalah bahwa pemerintah akan semakin responsif dengan keinginan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan juga semakin dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini dapat terjadi apabila pengambilan keputusan tersebut dibawa sedekat mungkin dengan setiap warga masyarakat yang akan terimbas oleh keputusan tersebut.

Di Indonesia, desentralisasi terjadi seiring dengan lajunya proses demokratisasi di Indonesia yang ditandai dengan gelombang reformasi tahun 1998. Setahun kemudian dibentuk dasar hukum desentralisasi, yaitu UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32

tahun 2004, mengenai Pemerintahan Lokal, yang pada esensinya memindahkan sebagian kewenangan dari ranah pemerintahan nasional (pemerintah pusat) kepada pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.

Munculnya sistem desentralisasi di Indonesia telah membawa berbagai hal positif. Zuhro et al. (2009:7) berargumen bahwa desentralisasi di negara ini telah meningkatkan kesadaran politik masyarakat meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, baik dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian Zuhro et al. menunjukkan bahwa proses desentralisasi telah menghasilkan.

Beberapa pencapaian positif, dengan meningkatnya partisipasi warga dalam hal pengembangan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan pendapat Bergh (2004:781) yang menjelaskan bahwa salah satu keuntungan desentralisasi adalah semakin tersedianya kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, desentralisasi juga mendatangkan berbagai efek negatif di Indonesia. Bergh (2004:782) mengingatkan bahwa apabila pemerintah di daerah tidak memiliki kemampuan teknis dan administratif yang kuat, pelayanan publik justru akan semakin tidak efisien dan efektif dibandingkan masa sebelum desentralisasi. Sementara itu, Zuhro (2009:10) menengarai bahwa desentralisasi dapat memunculkan berbagai peraturan daerah yang bermasalah. Satu kelemahan penting lain menurut Vedi Hadiz adalah bahwa saat ini tengah terjadi kecenderungan reorganisasi kekuasaan oleh

kelompok oligarki di tingkat daerah, yang memunculkan “raja-raja kecil,” yaitu pemerintah daerah yang seolah-olah memiliki kekuasaan tanpa batas di daerah, yang berujung pada fenomena korupsi dan nepotisme di tingkat lokal (Zuhro et al, 2009:10).

2. Peran Pemimpin Daerah

Paparan diatas menunjukkan bahwa salah satu komponen penting yang menentukan kesuksesan atau kegagalan desentralisasi di daerah adalah para aktor demokrasi, karena merekalah yang menentukan arah dan dinamika demokrasi ditingkat tersebut. Zuhro (2009:2) menjelaskan setidaknya ada dua alasan penting untuk mengkaji peran aktor dalam proses demokrasi lokal. Pertama, dalam konteks budaya politik lokal, aktor adalah agen budaya. Sebagai agen budaya, aktor merupakan penerus nilai-nilai budaya politik yang tumbuh dan berkembang. Di ranah lokal. Pada saat yang sama aktor juga pencipta (produsen) budaya, sehingga perilaku politik seorang aktor dapat mempengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal.

Kedua, pentingnya peran aktor politik adalah resultan dari proses demokrasi itu sendiri. Proses transisi politik yang terjadi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 telah menempatkan aktor politik di Indonesia dalam posisi yang jauh lebih strategis daripada masa sebelum Reformasi. Ini karena pada masa ini, tercipta suatu dinamika hubungan antara aktor politik di tingkat lokal dan di tingkat nasional. Berbagai kebijakan, seperti pengejawantahan konsep desentralisasi dan tata aturan hukum, ditetapkan

di tingkat nasional, namun dilaksanakan dan berpengaruh di tingkat lokal (Zuhro, 2009:3).

Selain itu, para aktor lokal juga harus memegang kendali atas dinamika pemerintahan gaya baru yang timbul sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi itu sendiri. Dalam penelitian ke beberapa daerah di Indonesia, Zuhro et al. menemukan telah terjadi pergeseran peran birokrasi di tingkat daerah, yaitu dari bureaucratic authoritarian menjadi bureaucratic pluralism (2009:4). Struktur birokrasi saat ini bukanlah lagi satu konstruksi eksklusif dan tertutup yang tidak terjamah oleh pihak luar, namun telah bertransformasi menjadi semakin terbuka terhadap tekanan dari berbagai kekuatan sosial lain (societal forces) di masyarakat. Kekuatan sosial semacam ini adalah dampak dari adanya sistem multipartai dan terciptanya proses pergantian kepemimpinan yang didasarkan pada kompetisi melalui pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Konsekuensi lain dari bureaucratic pluralism adalah bahwa tak satupun kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah terbebas dari pantauan masyarakat (Zuhro et al, 2009:5).

Di era pasca Reformasi, beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) mendapatkan tekanan dari elemen-elemen masyarakat terkait perbedaan pandangan terhadap substansi RUU tersebut, dan mengakibatkan RUU tersebut direvisi, ditunda, atau dibatalkan seluruhnya. Hal tersebut menandakan bahwa seiring dengan semakin kokohnya semangat desentralisasi, partisipasi warga juga semakin meningkat dalam proses

demokrasi di ranah lokal. Semangat partisipatoris tersebut juga telah dibakukan menjadi aturan legal-formal di beberapa tempat. Penelitian Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), menunjukkan banyaknya peraturan daerah yang mendorong transparansi pemerintah lokal dan keterlibatan masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi warga juga terlihat dari semakin berkembangnya kelompok masyarakat madani (civil society organizations) di tingkat lokal yang turut berperan dalam mendorong partisipasi warga untuk ambil bagian dalam praktek demokratisasi lokal (Antlov sebagaimana dikutip Zuhro et al, 2009:7). Keterlibatan masyarakat yang demikian aktif dimetaforakan oleh Zuhro sebagai Kotak Pandora yang terbuka (dan) membuat berbagai keragaman serta ke-bhinneka-an yang tertekan dan terpendam di masa kekuasaan otoritarian Orde Baru mendapat salurannya” (2009:11).

Penjelasan diatas juga menunjukkan bahwa keterlibatan publik selaku pemangku kepentingan telah memungkinkan terjadinya proses renegotiasi batas- batas dalam menjalankan proses kenegaraan. Zuhro memandang hal ini padagilirannya menyebabkan “relasi kuasa antara negara, kekuatan pasar, dan masyarakat maupun antara pusat dan daerah dipertanyakan kembali” (2009:11). Padahal dalam proses renegotiasi batas dan kepentingan, konflik adalah satukeniscayaan. Oleh karena itu, tak pelak diperlukan adanya aktor yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, agar dapat mengelola konflik tersebut dengan baik.

3. Hubungan Pemimpin Daerah dan Masyarakat

Hubungan antara aktor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal diatur oleh UU No. 32 tahun 2004, yang menyatakan bahwa masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri melalui sebuah pemilihan lokal. Ini adalah perubahan signifikan dari peraturan yang sebelumnya, yaitu UU No. 22 tahun 1999, yang mengatur bahwa pihak legislatif (lembaga perwakilan rakyat) yang memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah.

Dengan adanya undang-undang yang menyerahkan kewenangan kepada masyarakat lokal semacam itu, dapat dipahami bahwa secara yuridis masyarakat lokal memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pemimpin daerahnya.

Lewat sebuah mekanisme pemilihan secara langsung, masyarakat kemudian mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya kepada orang yang mereka pilih, dengan tujuan untuk menjadikan orang tersebut wakil atau agen yang menjalankan kepentingan mereka. Proses pemilihan semacam itu disebut sebagai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan sekali setiap lima tahun.

Adanya keterkaitan antara pemberi wewenang dan penerima wewenang semacam ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah perlu melakukan pekerjaan untuk meyakinkan masyarakat agar mempercayai dirinya untuk menjadi wakil mereka. Dalam perspektif ini, masyarakat adalah “konsumen” yang perlu dipersuasi untuk memberikan dukungan

kepada calon pemimpin daerah di hari pemilihan (Swanson, 2004:46-47). Kondisi semacam ini menjadikan terciptanya satu pasar politik yang mengharuskan politisi yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin daerah untuk memiliki pemahaman mengenai pemilih, dan “pasar” tempat para pemilih berada (Kotler dan Kotler, 1999).

Hubungan relasional semacam ini juga menunjukkan, bahwa pasar politik tidak hanya terjadi pada waktu pemilihan, namun berkelanjutan selama periode wewenang itu diberikan hingga tiba masanya pemilihan yang berikutnya. Hal ini karena dukungan masyarakat sebagai pemilik wewenang politik harus terus ditumbuhkan dan dijaga melalui komunikasi yang berkesinambungan (Swanson, 2004:45). Dengan kata lain, proses kampanye sebenarnya juga terjadi di rentang periode di antara dua pilkada. Dalam rentang periode ini, pemimpin dituntut untuk mewujudkan berbagai janji kampanye yang telah ia tawarkan di masa kampanye pilkada sebelumnya, dalam wujud berbagai kebijakan dan program kerja.

Proses komunikasi di antara kedua pemilihan ini, sebagaimana disimpulkan oleh Arief (2011:14), dapat dilakukan melalui apa yang disebut Blumenthal sebagai sebuah proses permanent campaign, yaitu sebuah upaya pemimpin untuk terus merawat para pemilihnya dengan menggerakkan birokrasi pemerintahannya untuk melaksanakan program yang berorientasi rakyat, serta meraih popularitas melalui pemberitaan media secara berkesinambungan. Dalam permanent campaign, seorang kandidat tidak menghentikan aktivitas kampanyenya ketika ia sudah terpilih

untuk menduduki jabatannya, tetapi justru melanjutkan proses kampanye tersebut dengan mewujudkan berbagai janji yang disampaikan sepanjang saat kampanye. Pada gilirannya, publik membandingkan dan mengevaluasi, apakah terdapat kesesuaian antara janji seorang kandidat dan pelaksanaan program saat ia sudah memerintah (Blumenthal dalam Arief, 2011: 22).

Kenyataannya, secara umum fakta-fakta yang ada di Indonesia mengarah pada kondisi masih jauh dari idealisme permanent campaign diatas. Sebagai contoh, Astuti (2009:180-181) mencatat bahwa akuntabilitas para pemegang jabatan politik kepada rakyat saat ini relatif masih rendah. Ia juga melihat bahwa dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, kepentingan penguasaselalu menjadi kriteria yang dominan dan seringkali menggusur kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak seiring.

Di sisi lain, telah muncul indikasi beberapa pemimpin daerah yang berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat pemilihnya, dan ini dibuktikan dengan dukungan mereka secara signifikan di periode kedua pemerintahan sang pemimpin. Sebagai contoh, di tahun 2010 pasangan Herman Deru dan Kholid Mawardi mampu memenangkan Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan untuk kedua kalinya dengan meraup 94,56% suara. Perolehan suara ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah pilkada di Indonesia. Arief (2011:4) berkesimpulan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras Heru

untuk merebut hati rakyat OKU di masa kepemimpinan periode pertamanya, antara lain melalui upaya mentransformasi OKU menjadi lumbung beras bagi provinsi Sumatera Selatan.

Contoh lain adalah dr. Herman Sutrisno, yang pada tahun 2008 terpilih menjadi Bupati Banjar, Jawa Barat untuk kedua kalinya dengan perolehan suara 92,17%. Kemenangan dengan perolehan suara signifikan ini terkait dengan upaya Herman memberikan layanan sebaik mungkin pada warga Banjar sejak menjadi Bupati yang pertama, antara lain melalui perbaikan besar-besaran pada layanan kesehatan (Budiarti dan Achmad, 2011:122).

Di Sulawesi Barat, Andi Ibrahim Masdar (yang mempopulerkan dirinya dengan panggilan "AIM") juga memenangkan pemilihan Bupati Polewali Mandar di tahun 2018 untuk kedua kalinya dengan suara 55,3%. Perolehan suara tersebut adalah timbal balik masyarakat Polewali mandar dari keberhasilan AIM-Natsir Rahmat untuk membenahi Kabupaten tersebut dalam waktu relatif singkat, khususnya untuk masalah di bidang pelayanan kemasyarakatan, kesehatan dan penataan kota.

Keberhasilan AIM secara khusus dianggap merupakan keunggulan tersendiri dibanding para pemimpin daerah lain. Sebagaimana diidentifikasi oleh Arief (2011:14), AIM antara lain dihadapkan pada keunikan demografis dan sosio kultural Kabupaten Polewali Mandar. Dengan penduduk 517.677

jiwa, Kabupaten Polewali Mandar termasuk salah satu kota di Sulbar dengan berbagai persoalannya yang kompleks. Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar juga relatif memiliki tingkat edukasi yang relatif lebih tinggi sehingga mereka dikenal sangat kritis. Selain itu, Kabupaten Polewali Mandar dikenal sebagai kota dengan tingkat keragaman sosial dan politik masyarakat tinggi ,baik berbasis nasionalisme maupun religius. Berangkat dari latar belakang ini, Peneliti secara mendalam meneliti AIM yang dianggap sukses dalam menerapkan permanent campaign sehingga mampu membangun figur diri yang positif dan menjaga kepercayaan publik, khususnya untuk mengetahui teknik-tekniknya dalam mengkomunikasikan diri dan kebijakannya secara efektif kepada masyarakat diri dan kebijakannya secara efektif kepada masyarakat pemilihnya.berikut profil sosok AIM-NATSIR RAHMAT :

H. Andi Ibrahim Masdar (lahir 18 Februari 1963) adalah Bupati Polewali Mandar periode yakni 2014—2019 . Andi Ibrahim Masdar pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Sulawesi Barat Fraksi Golkar 2 periode yakni 2005—2009 dan 2009—2014.beliau adalah sosok yang sangat dicintai oleh para loyalisnya akibat pengalaman AIM yang sangat matang dalam bidang pengelolaan pemerintahan sehingga tak heran apabila loyalisnya begitu bersemangat untuk melanjutkan pencalonan AIM hingga ke periode kedua.sedangkan NATSIR RAHMAT adalah sosok yang Lahir pada 31 desember 1960 tepatnya di kabupaten polewali mandar,beliau adalah Mantan Sekda Kabupaten Polewali Mandar yang

sangat cakap dalam menjalankan roda pemerintahan sewaktu bapak Ali baal Masdar menjabat sehingga tak heran apabila Bapak Andi Ibrahim Masdar meminang beliau menjadi wakilnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Secara hirarkis, hubungan delegasi wewenang dari masyarakat langsung kepada pemimpin politik dapat dijelaskan dalam konsep delegasi wewenang. Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang (yang selanjutnya disebut prinsipal atau principal) memilih orang atau kelompok lain (agen atau agent) untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal (Lupia dan McCubbins, 2000). Hal ini adalah pembahasan utama dalam teori keagenan (agency theory), yang juga menjelaskan bahwa seiring proses delegasi tersebut, timbul masalah- masalah keagenan (agency problems).

Dalam upaya pemenuhan kepentingan prinsipal tersebut, seorang agen perlu melaksanakan proses komunikasi dengan prinsipal. Agen tersebut juga harus menempatkan dirinya sedemikian rupa, sehingga prinsipal memiliki pemahaman bahwa ia telah bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, proses komunikasi yang dilakukan oleh agen tersebut kaya atas upaya pembentukan citra-dirinya yang stabil, agar dapat dimaknai oleh prinsipal sesuai dengan citra-diri agen tersebut.

Kegiatan membangun citra-diri ini ditelaah secara mendalam oleh Erving Goffman dalam pendekatan dramaturgi (dramaturgical approach). Melalui analisis tentang pembentukan citra-diri, kajian dramaturgi

memfokuskan diri pada penciptaan, penjagaan dan penghancuran pemahaman bersama tentang realita, oleh orang-orang yang bekerja baik sendiri atau bersama-sama, untuk memunculkan satu pandangan atau gambaran yang tunggal dan selaras terhadap realita tersebut (Kivisto dan Pittman, 2007:272). Maka menurut pandangan dramaturgi, kehidupan sosial adalah tak ubahnya sebagai serangkaian pertunjukan drama di panggung. Berangkat dari pandangan ini, kajian dramaturgi mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, orang-orang tersebut “mengelola” impresi yang ia berikan kepada orang lain (Goffman, 1956:3).

Dengan pemahaman terhadap teori keagenan dan perspektif dramaturgi, serta menjadikan Bupati Kabupaten Polewali Mandar AIM sebagai subjek penelitian, maka dalam tesis ini Peneliti meneliti tentang “Pemimpin Daerah Sebagai Agen” dengan melakukan studi mengenai “STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN AIM-NATSIR RAHMAT DENGAN JARGON “**POLMAN JAGO**””. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sejauh ini, Peneliti merumuskan dua pertanyaan utama sebagai masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh AIM untuk mengelola hubungan dengan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari perspektif dramaturgi?
2. Bagaimanakah AIM memanfaatkan strategi komunikasi politiknya untuk

menjaga keseimbangan informasi dalam hubungannya dirinya selaku agen dan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar selaku prinsipal dalam hubungan keagenan?

3. Bagaimana strategi komunikasi politik dengan Jargon POLMAN JAGO menjadi solusi atas permasalahan keagenan atas Masyarakat Polewali Mandar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berlandaskan rumusan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka Peneliti merumuskan tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh AIM dalam mengelola hubungan dengan masyarakat Polewali Mandar, dilihat dari bingkai pendekatan dramaturgi Erving Goffman;
2. Untuk menganalisis bagaimana AIM menggunakan strategi komunikasi politik tersebut dalam menjaga hubungannya selaku Bupati Polewali Mandar dengan masyarakat Polewali Mandar sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepadanya.
3. Untuk Menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik melalui jargon POLMAN JAGO menjadi strategi komunikasi efektif sehingga mampu menjadi solusi persoalan keagenan di masyarakat.

Mengacu pada rumusan diatas, Peneliti membangun asumsi-asumsi sementara bagi penelitian ini sebagai berikut:

1. Munculnya desentralisasi di Indonesia telah menciptakan sebuah hubungan keagenan antara pemimpin politik dengan masyarakat, dan pada gilirannya telah menimbulkan berbagai masalah keagenan. Dalam menjalankan perannya sebagai wali Kabupaten Polewali Mandar dan berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, AIM setidaknya secara konseptual menyadari eksistensi masalah keagenan ini.

Dalam komunikasi politiknya ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui perantara media, AIM melakukan langkah-langkah yang konsisten dengan perspektif dramaturgi Erving Goffman, termasuk ketika ia memanfaatkan panggung depan dan panggung belakang, melakukan kontrol terhadap informasi, serta menjalankan manajemen impresi.

2. Langkah-langkah yang dipilih AIM dalam memainkan perannya sebagai aktor ia pergunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan yang timbul antara dirinya dan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

Patut Peneliti cantumkan di sini, bahwa penelitian ini sama sekali tidakberpretensi untuk dapat digeneralisasikan ke subjek penelitian lain, seperti pemimpin daerah selain AIM, maupun kepada objek lain.

3. Dengan dipilihnya Jargon POLMAN JAGO sebagai strategi komunikasi AIM berupaya menemukan formulasi untuk mengambil sisi partisipatif masyarakat polewali mandar sebagai daerah dengan peradaban yang lebih maju dibanding Kabupaten lain di Sulawesi Barat, ini kemudian disadari oleh masyarakat polewali mandar sehingga tingkat partisipatif lebih tinggi untuk mau bekerjasama terlibat dalam menyelesaikan berbagai masalah keagenan. seperti yang dikatakan AIM dalam wawancara per desember 2017 tentang arti POLMAN JAGO :

“POLMAN JAGO adalah upaya, POLMAN JAGO adalah solusi,,, masyarakat menginginkan hal yang memotivasi mereka, mari kita sama-sama membangun peradaban yang lebih maju,..saya tidak mungkin bisa sendiri..saya membutuhkan orang-orang yang jago., untuk melakukan ini..membangun polman jauh lebih jagoo..jagoo,,jagooo....

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Signifikansi Akademis

Seiring perkembangan demokrasi Indonesia yang semakin dinamis dan partisipatif, semakin banyak pula penelitian di Indonesia yang mengkaji mengenai aspek komunikasi para pemangku-kepentingan di ranah politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan pengamatan Peneliti, setidaknya ada satu penelitian mengenai komunikasi elit politik tingkat

nasional dilihat dari kacamata pendekatan dramaturgi, yaitu yang dilakukan oleh Lely Arrianie (2010) dan telah diterbitkan menjadi buku berjudul “Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik.” Namun Peneliti belum mendapati penelitian yang berupaya memahami proses komunikasi politik di tingkat daerah (baik provinsi, maupun kota dan kabupaten) menggunakan pendekatan dramaturgi untuk memahami komunikasi politik dan konflik keagenan pemimpin daerah. Oleh karena itu, tesis ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian komunikasi politik Indonesia, dengan menjadi literatur yang secara khusus mendalami panggung politik kepala daerah. Untuk alasan yang sama, penelitian ini diharap mampu memicu studi lanjutan dengan teori dan metodologi serupa di kota dan kabupaten lain di Indonesia, sehingga memungkinkan analisis komparatif terhadap strategi komunikasi politik para pemimpin daerah.

2. Signifikansi Praktis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para aktor di tingkat pemerintahan lokal khususnya bagi para pemimpin daerah, mengenai pengelolaan komunikasi politik di tingkat pemerintahan lokal, dan sekaligus menjadi bahan kajian untuk mengidentifikasi komponen yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi tersebut.

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, analisis dan kesimpulan yang dicapai dalam tesis ini diharapkan dapat semakin mempertegas kesadaran di masyarakat, bahwa dalam proses hubungan keagenan pada tingkat tata

kelola pemerintahan, masyarakat adalah prinsipal yang memiliki wewenang untuk menentukan agen yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan mengambil subjek analisis AIM yang telah dikenal luas dan kinerjanya selaku Bupati mendapatkan berbagai pengakuan positif, diharapkan tesis ini dapat menjadi cikal-bakal munculnya literatur dan dialektika lebih banyak yang mampu menggugah optimisme publik serta mendorong peran aktif mereka dalam mengawal pemerintahan di daerah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri atas lima bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan, yang menjabarkan latar belakang permasalahan, serta merumuskan permasalahan, tujuan penelitian, asumsi penelitian, dan kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis.

Bagian kedua berisi kerangka pemikiran bagi terbangunnya tesis ini, yaitu konseptualisasi terhadap politisi sebagai pemimpin politik, komunikasi politik, Teori Keagenan, dan Perspektif Dramaturgi.

Bagian ketiga dari tesis ini merupakan paparan mengenai metodologi penelitian, yang terdiri atas metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian dan unit analisis, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, uji keabsahan data, serta periode dan lokasi penelitian ini.

Dimulai pada bagian keempat tesis ini, Peneliti melakukan telaah mendalam terhadap hasil penelitian. Bagian ini dimulai dengan penjelasan mengenai Kabupaten Polewali Mandar sebagai panggung dramaturgi AIM

dan situasi keagenan seputar Pilkada 2018. Setelah itu Peneliti menganalisis komunikasi politik AIM dengan pendekatan dramaturgi yang terfokus pada komponen Pertunjukan (Panggung Depan dan Belakang), Kontrol Terhadap Informasi, serta Manajemen Impresi. Peneliti menjabarkan situasi hubungan keagenan terakhir di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil Pilkada 2018. Peneliti kemudian melakukan pendalaman mengenai bagaimana komunikasi politik AIM berperan dalam upayanya menangani pelbagai permasalahan keagenan sebagaimana terkandung dalam Teori Keagenan, serta bagaimana peran jargon POLMAN jago menjadi strategi komunikasi yang efektif memecah persoalan yang ada di masyarakat.

Terakhir, pada bagian kelima Peneliti merumuskan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, kajian Peneliti terhadap implikasi akademis dan praktis tesis ini, serta kelemahan dan peluang pengembangan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pengamatan peneliti, setidaknya ada beberapa penelitian mengenai dramaturgi. Dalam perspektif komunikasi politik, peneliti menemukan penelitian yang dilakukan oleh Firman Aulia yang ditulis pada tahun 2015. Berjudul Model Komunikasi Politik Dalam Penyampaian Kritik Sosial Melalui Kebudayaan Kenduri Cinta. Selain menggunakan teori model komunikasi, Firman Aulia juga menggunakan teori keagenan sebagai rumusan masalah yang membahas hubungan prinsipal dan agen antara masyarakat dan politisi. Atas penggunaan dua teori itulah sehingga penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai salah satu referensi sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

Meski demikian, berdasarkan hasil pencarian, Peneliti tidak mendapat banyak referensi penelitian yang membahas dramaturgi dalam perspektif politik. Jika pun ada, artikel tersebut sudah tidak dapat diakses kembali. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian dengan judul “Model Komunikasi Politik Dalam Penyampaian Kritik Sosial Melalui Kebudayaan Kenduri Cinta.

2. Ditulis oleh Cahyadi Indrananto pada tahun 2015. FIDI UIN Syarif Hidayatullah. Peneliti melakukan pengamatan berperan serta terhadap penyampaian kritik. Budaya politik merupakan perwujudan dari nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik. Peneliti juga menggunakan Teori Keagenan yang mempelajari tentang hubungan principal-agen dan masalah-masalah di dalamnya (Eisenhardt, 1989). Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi politik ketika berhadapan dengan audiens, yaitu mampu menjaga kendali diri dalam mengekspresikan peran yang ia bangun. Model komunikasi mampu membangun reputasi diri di mata lawan negosiasinya. Dalam Teori keagenan, peneliti menyimpulkan bahwa model komunikasi memahami adanya permasalahan keagenan dalam hubungan dengan masyarakat. Hal tersebut menjadikan seseorang meletakkan mitigasi permasalahan keagenan sebagai suatu prioritas dengan mengedepankan komunikasi politik yang baik.
3. Artikel berjudul "Analisis Peran dan model komunikasi politik (Studi Pada Pengelolaan Kesan Oleh Penyiar Dalam Program Pergi Pagi 88,4 Global FM)". Ditulis oleh Muhammad Devandrey Delmeizar, pada tahun 2017. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie Jakarta. Penelitian ini meneliti penyiar Rico Ceperdi 88,4 Global FM. Menggunakan Teori Dramaturgi Erving Goffman. Penelitian menunjukkan pada panggung depan

penyiar menunjukkan ekspresinya dengan serangkaian aksi, interaksi, dan juga Gerakan. Sementara ketika berada di panggung belakang, penyiar menunjukkan sikap aslinya sekaligus upaya-upayanya dalam mempersiapkan diri saat berada di panggung depan. Penyiar juga memahami diri dalam melakukan manajemen impresi saat di panggung belakang yang tidak dibawa ke panggung depan.

4. Penelitian dengan judul “Model Komunikasi Politik Di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”. Ditulis oleh Azqi Zakiatal Fitri. Mahasiswa Komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019. Artikel ini menunjukkan perilaku panggung depan (front stage) pengemis Desa Pageralang dengan mempresentasikan diri sebagai pengemis yang ditunjukkan dengan penampilan tanpa pakaian yang bagus. Selain itu, dalam sisi panggung belakang, peneliti mengungkapkan Pengemis Desa Pageralang ketika berada di panggung belakang menunjukkan jati diri mereka seutuhnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Pengemis Desa Pageralang masuk ke dalam tipe pengemis miskin mental, karena malas bekerja serta tidak memiliki keterampilan khusus.

B. TINJAUAN KONSEP DAN TEORI

1. Komunikasi Politik

Menurut McNair (2003) komunikasi politik merupakan segala bentuk komunikasi yang niatkan tentang politik. Komunikasi politik mencakup berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan politisi dan aktor politik guna mencapai suatu tujuan. Komunikasi politik juga mencakup komunikasi yang ditunjukkan oleh para aktor oleh non-politisi, seperti pemilih, dan media. McNair merumuskan bahwa bentuk komunikasi politik pada situasi demokratis, yakni kondisi dalam masyarakat yang pemerintahannya memimpin bukan karena adanya paksaan, namun karena persetujuan, pemimpin politiknya punya legitimasi dari masyarakatnya: dan suara masyarakat yang tersalurkan melalui pemilihan umum, maupun media komunikasi lainnya memiliki makna.

Bagi seorang pemimpin politik, komunikasi adalah cara untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinannya. Nimmo (1989) melihat politisi memberipengaruh ke audiens melalui komunikasi, karena pada akhirnya tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini orang lain. Nimmo sebagaimana dikutip Arriane (2010) menjelaskan tentang perilaku komunikasi politik serta makna yang diberikan terhadap perilaku itu. Nimmo menjelaskan beberapa perspektif mengenai komunikasi politik, yaitu:

- a. Perspektif aksi diri, yaitu pada diri manusia terdapat kekuatan berupa dorongan, sikap, rangsangan, motif, maupun kapasitas yang menentukan perbuatannya.
- b. Perspektif Interaksi, yaitu terdapat berbagai kekuatan diluar manusia

yang mempengaruhi kelakuan manusia tersebut, yang menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain, dan terjadinya hubungan sebab dan akibat. Kekuatan tersebut seperti kedudukan sosial dan ekonomi, tuntutan kelompok, peran sosial, ketentuan larangan budaya, kebiasaan, dan hukum.

- c. Sedangkan, Perspektif Transaksi, yaitu dalam memahami perbuatan manusia, dapat dipandang melalui makna yang diberikan manusia terhadap hal-hal fisik. Hal itu karena makna dapat diturunkan lewat transaksi yang dimiliki manusia dengan sesamanya.

Melalui teori dari Arriane (2010) Peneliti menilai bahwa dibutuhkan suatu pemahaman terhadap apa yang dilakukan para komunikator politik ketika melakukan peran politiknya di depan panggung dan panggung belakang politik, lengkap dengan kebutuhan akan atribut yang melekat padanya sebagai bagian dari pertunjukan peran politik yang dilakukannya.

2. Politisi Sebagai Pimpinan Politik

Menurut Nimmo (1989), politisi merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintah, maupun orang yang bercita-cita untuk meraih hal itu. Nimmo juga mempertukarkan istilah “politisi” dengan “pemimpin politik”. Menurut Kartono (2010) “pemimpin” adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan juga kelebihan, sehingga mampu mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi mencapai satu atau beberapa tujuan. Sehingga dalam konteks politik, “pemimpin politik” dapat diartikan sebagai seorang

yang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai tujuan politik.

Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang, karena dalam suatu lingkungan masyarakat yang kompleks, manusia harus mampu hidup bersama dan bisa bekerjasama dalam suasana yang tertib, tidak menyendiri, serta terbimbing oleh seorang pemimpin, Alfian (2011). Panduan pemimpin agar tercipta kerja yang korporatif amatlah diperlukan, demi definisi kerja untuk mencapai tujuan bersama. Nimmo (1989) melihat bahwa di dalam politik, orang yang meraih posisi kepemimpinan tersebut adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam komunikasi politik secara tetap, terus menerus, dan dipancarkan secara luas.

3. Pendekatan Dramaturgi

Pendekatan dramaturgi (Dramaturgical approach) adalah sebuah mazhab yang dikembangkan oleh sosiolog Erving Goffman. Ia pria kelahiran Alberta Kanada, 11 Juni 1922 dan meninggal dunia pada usia 60 tahun di Pennsylvania, Amerika Serikat pada 19 November 1982. Goffman dipandang sebagai tokoh penting dalam ilmu sosiologi. Gelar akademis yang didapatkannya dari Universitas Chicago. Dalam menciptakan sudut pandang teori, Goffman mengambil dari banyak sumber-sumber dan menciptakan ciri yang khas.

Lahirnya Teori Dramaturgi berangkat dari pemahamannya mengenai berbagai aspek kajian sosiologi, antropologi, dan komunikasi, terutama yang dirintis oleh George Mead dan Herbert Blumer. Pemahaman

mengenaipendekatan dramaturgi Goffman dilandasi oleh konsepsi Mead mengenai makna, bahasa dan pemikiran, yang kemudian dirumuskan oleh Blumer menjadi apa yang ia sebut sebagai interaksionisme simbolik (Griffin, 2000). Salah satu premis interaksionisme simbolik adalah bahwa makna muncul dari interaksi sosial yang merupakan proses interpretif dua-arah, dan fokusnya adalah efek dari interpretasi terhadap orang yang tindakannya sedang diinterpretasikan (Griffin, 2000). Oleh karena itu, selain tindakan seseorang adalah produk dari cara mereka menafsirkan perilaku orang lain, interpretasi ini memberikan pengaruh kepada individu yang tindakannya diinterpretasikan tersebut (Mulyana, 2010).

Perhatian Goffman dicurahkan kepada “urutan interaksi” (interaction order) yang melibatkan komponen struktur, proses dan produk interaksi sosial. Goffman secara khusus memberikan penekanan kepada sifat simbolik interaksi manusia dan pertukaran makna di antara orang-orang melalui simbol. Dalam hal ini, Goffman berpandangan bahwa di dalam diri yang sama, terdapat gejala pertentangan antara diri manusia yang spontan dan tuntutan sosialnya. Pertentangan semacam ini menuntut manusia untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan apa yang diharapkan pada kita. Untuk memelihara tampilan yang yakin dan tidak ragu, maka manusia dituntut untuk melakukan sebuah “pertunjukan” (performance) di hadapan khalayak (Goffman, 1956). Inilah apa yang menjadi fokus Goffman tatkala mengeksplorasi konsepnya menggunakan metafor dramaturgi: pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan yang mirip dengan pementasan drama di panggung (Mulyana,

2010).

Inti dari dramaturgi bukanlah menghubungkan perilaku dengan penyebabnya, namun menghubungkan tindakan dengan maknanya. Goffman berpendapat bahwa makna dalam pendekatan dramaturgi bukanlah warisan budaya, sosialisasi / tatanan kelembagaan, atau perwujudan dari potensi psikologis maupun biologis. Namun, makna di sini adalah pencapaian problematik interaksi manusia yang penuh dengan perubahan, kebaruan dan kebingungan. Makna bersifat behavioral, berubah secara berkelanjutan, arbitrer dan merupakan ramuan dari interaksi manusia (Mulyana, 2010).

Penjelasan mengenai makna tersebut terkait dengan pandangan dramaturgi mengenai konsep diri (self) yang memberi makna, yaitu diri yang disituasikan secara sosial, berkembang, serta mengatur berbagai interaksi spesifik. Oleh karena itu, diri lebih bersifat sosial daripada psikologis (Mulyana, 2010). Sebagaimana dijelaskan oleh Goffman: "Diri bukanlah keturunan dari pemiliknya, tapi dari keseluruhan tindakannya. Diri tersebut bukanlah penyebab, namun produk dari satu kejadian yang muncul. Oleh karenanya, diri selaku karakter yang melakukan pertunjukan bukanlah satu benda organik dengan lokasi tertentu. Seorang individu dan tubuhnya hanyalah perangkat bagi tempat terjadinya suatu proses kolaboratif (collaborative manufacture). Sehingga, penyebab pembentukan dan pemupukan diri tidaklah berada dalam perangkat tersebut." (dalam Kivisto dan Pittman, 2007).

Pada buku *The Presentation of Self in Everyday Life* yang ditulis oleh

Erving Goffman (1959) mengibaratkan kehidupan layaknya teater, dengan interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung dan menampilkan berbagai peran yang ditampilkan para aktor. Dalam memainkan perannya, aktor harus memusatkan perhatiannya dan menjaga kendali diri agar dapat mengekspresikan peran yang sesuai dengan situasi. Maka sebagaimana diungkapkan oleh Mulyana, fokus pendekatan dramaturgi bukanlah kepada apa yang orang lakukan, apa yang ingin mereka lakukan, maupun mengapa mereka melakukannya, melainkan bagaimana mereka melakukannya.

Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif manusia, yakni bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Berkat daya ekspresifnya tersebut, manusia mampu menegosiasikan makna dengan orang lain yang juga ekspresif dalam satu situasi. Oleh karena itu, tindakan manusia tidak dipandang sebagai akibat dari berbagai kekuatan luar yang mempengaruhi mereka, tetapi “sebagai tuan dari nasibnya sendiri” (Mulyana, 2010).

Pada tesis ini, Peneliti menggunakan tiga aspek utama yang melandasi pendekatan dramaturgi, sebagaimana diadaptasi dari penjabaran Medlin (2008) yaitu: Panggung Depan dan Panggung Belakang, Kontrol Terhadap Informasi, Manajemen Impresi. Berikut penjelasannya:

a. Panggung Depan dan Panggung Belakang

Bagi Goffman, kehidupan ini ibarat teater, dengan interaksi sosial

yang mirip dengan pertunjukan diatas panggung, dan berisi peran-peran yang dimainkan oleh para aktor (Mulyana, 2010). Untuk memulai sebuah pertunjukan, Medlin (2008) melihat bahwa perlu adanya sebuah ide yang bersumber dari satu gambaran atau panduan yang kemudian dapat dielaborasi lebih lanjut menjadi serangkaian tindakan; atau satu skrip utuh yang terperinci. Goffman juga menunjukkan bahwa panduan lain dapat dipergunakan, seperti tema (arahan mengenai gerakan maupun perangkat yang harus ada) serta plot (peran dan indikasi mengenai langkah-langkah yang harus dituju untuk mencapai tujuannya) (Medlin, 2008).

Komponen lain yang juga penting di tahap awal adalah penciptaan lokasi aksi atau panggung, yang oleh Goffman didefinisikan sebagai “satu area yang terbatas oleh bentukan persepsi tertentu. Pemilihan panggung juga merupakan tahap yang krusial bagi kesuksesan sebuah pertunjukan dramaturgi, karena lokasi yang tercipta memberikan indikasi mengenai waktu serta suasana pertunjukan (Medlin, 2008).

Goffman (1956) membagi wilayah pertunjukan untuk interaksi sosial menjadi panggung depan (atau front stage) dan panggung belakang (atau backstage). Front stage merujuk pada peristiwa sosial yang memungkinkan individu bergaya atau menampilkan peran formalnya, sebagaimana mereka sedang memainkan satu peran diatas panggung. Sedangkan backstage merujuk pada tempat atau peristiwa yang memungkinkan aktor melakukan persiapan peran untuk front stage.

Bila dikaitkan dengan aspek-aspek pertunjukan sang aktor, maka

aspek yang ditonjolkan dan tidak disembunyikan oleh aktor disebut Goffman sebagai front stage, sedangkan aspek yang ingin disembunyikan disebut backstage. Dengan kata lain, backstage dapat didefinisikan sebagai kawasan yang tidak menyembunyikan impresi yang dimunculkan oleh aktor, tetapi justru menampilkannya secara terbuka (Medlin, 2008).

Pada panggung depan, Erving Goffman membagi secara lebih spesifik menjadi set panggung (setting) dan perangkat pribadi atau personal front. Makna dari setting adalah atribut fisik atau suasana panggung yang digunakan aktor dalam memainkan pertunjukannya. Lalu personal front adalah perangkat-perangkat atau atribut yang digunakan aktor, misalnya baju. Personal front juga terkait pada penampilan.

Sedangkan personal front merujuk kepada perangkat ekspresif yang membuat audiens mampu mengidentifikasi aktor, seperti peralatan dan pakaian. Personal front juga merujuk kepada hal-hal terkait penampilan seperti kewajiban sosial dan prestasi sang aktor; dan tingkah laku, yaitu perilaku yang disampaikan aktor kepada audiens, misalnya derajat kesopanan, tata krama dan sejenisnya (Mulyana, 2010). Peneliti berasumsi salah satu contoh perangkat pribadi atau personal front yang paling mudah ditemukan adalah pada individu ASN atau pejabat pemerintah. Saat bertugas mereka memakai baju seragam lengkap dengan pangkat. Kelengkapan itu dipakai untuk mendukung panggung depan mereka sebagai bertindak sebagai seorang pegawai pemerintah. Jika menggunakan kelengkapan itu maka mereka akan lebih mudah

mendapatkan perhatian orang sekitar, sehingga akan sangat mendukung dalam upaya dia bersikap sebagai individu yang memiliki otoritas.

Contoh lainnya dalam pandangan Peneliti seperti penggunaan setting dan personal front yang dilakukan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menggunakan atribut simbol fisik yang sama. Seperti saat melakukan rapat paripurna, para wakil rakyat ini memakai jas lengkap serta pin tanda keanggotaan DPRD dan duduk pada kursi yang telah disiapkan. Atribut ini tentu membedakan mereka sekaligus menunjukkan jabatan berbeda dari unsur-unsur lain yang ada dalam ruangan tersebut.

Penting dari pendekatan dramaturgi adalah bahwa para aktor umumnya ingin menyajikan diri mereka dalam rupa yang ideal. Oleh karena, aktor cenderung merasa perlu untuk menyembunyikan sebagian aspek dari diri mereka dari audiens saat pertunjukan berlangsung, atau apa yang Peneliti sebut sebagai "sisi lain aktor," yaitu sisi yang hanya muncul saat berada di backstage. Peneliti mengutip beberapa aspek yang dipandang relevan untuk penelitian ini, sebagaimana dipaparkan oleh Mulyana (2010), yaitu bahwa aktor mungkin ingin menyembunyikan kesenangannya di masa lalu yang tidak kompatibel dengan perannya saat ini, atau menyembunyikan kesalahan yang terjadi pada saat persiapan pertunjukan, atau menutupi proses penciptaan pertunjukan yang mereka lakukan dan hanya menunjukkan hasil akhirnya saja.

Mulyana menunjukkan terdapat dua metode idealisasi dalam

dramaturgi dalam teknik pertunjukan. Pertama adalah berupaya menampilkan kesan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dari pada yang sebenarnya kepada audiens dan ingin menunjukkan bahwa pertunjukan yang dilakukannya ini adalah yang terbaik yang pernah ditampilkan. Dalam politik, ini dilakukan antara lain dengan menonjolkan aspek kehidupan atau latar belakang aktor yang relevan dengan audiens yang dituju. Misalnya, calon Bupati atau bupati di sebuah daerah cenderung berkampanye di depan para pemilihnya dengan menekankan masalah kecilnya selama tinggal di daerah tersebut, padahal mungkin ia tumbuh dewasa di tempat lain. Dengan melakukan hal-hal yang menunjukkan kedekatan semacam itu, para aktor berupaya mencapai satu tujuan yang menguntungkan mereka (2010). Yang kedua yang menjadi teknik idealisasi dalam dramaturgi adalah saat aktor juga menciptakan mistifikasi. Dengan metode ini, aktor menciptakan “jarak sosial” untuk memancing rasa kekaguman atau keterpesonaan dari audiens, yang pada gilirannya membuat audiens tidak lagi meragukan pertunjukan sang aktor (Mulyana, 2010).

Mulyana mengambil contoh Presiden Soeharto yang telah melakukan mistifikasi untuk menjaga kharismanya semasa menjabat, dengan sangat membatasi wawancara oleh wartawan. Contoh mistifikasi lainnya adalah sebagaimana yang ditemukan Arriane pada para politisi di DPR RI yang memegang status panitia seleksi untuk posisi-posisi penting. Seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hakim agung di

Mahkamah Agung.

Berdasarkan Kamus Merriam Webster, mistifikasi dapat berarti “tindakan memistikan”. Dalam psikologi, mistifikasi menurut Laing memuat konsep “pemistifikasi” dan “dimistifikasi”. Orang yang menutupi adalah pemistifikasi, sementara orang yang dihindarkan dari hal yang sebenarnya adalah yang “dimistifikasi”. Mistifikasi yang memuat konsep mistis yang merupakan konsep penting yang menjelaskan mistifikasi tersebut.

Penjelasan akan konsep mistis yang bermuatan transenden memuat pula hubungan perilaku mistis dengan misteri yang menyertainya. Mistis, misteri, dan mistifikasi pada dasar filosofis adalah hal yang saling berkaitan. Mistifikasi pada substansi konsep yang terlahir dari persinggungan antara misteri yang tidak dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang.

Robinson (1998) menyatakan mistifikasi adalah proses yang terbentuk dari kegagalan cara pandang dasar antara apa yang dipahami salah satu pihak dan apa yang dipahami oleh pihak lain. Proses kegagalan (atau ketidaksamaan) dalam memahami antar pihak menimbulkan ruang ketidakjelasan sehingga memunculkan apa yang disebut dengan mistifikasi. Menurut pandangan sosiologis, mistifikasi dapat berarti sebuah proses yang menutupi atau mengaburkan realitas. Penjelasan ini hampir mirip dengan penjelasan postmodernisme proses simulasi yang sedang berjalan. Sedangkan menurut pandangan interaksionisme simbolik, Goffman dalam pembahasan dramaturgi menyatakan mistifikasi adalah proses pengelolaan kesan penampil (aktor) dalam mendramatisir

panggung yang didukung oleh tampilan wajah, perlengkapan panggung, gaya bicara, gaya pakaian dan sebagainya yang meninggalkan kesan “yakin” kepada penonton.

Pada penampilan seorang aktor di panggung, fokus perhatian Goffman sesungguhnya bukan hanya individu, namun juga sejumlah individu lain yang bekerja sama dalam mementaskan satu rutinitas (Arriane, 2010). Selain membawakan peran dan karakter secara individu, aktor sosial juga berupaya mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, dan kesemuanya ini pada gilirannya menjadi apa yang disebut Goffman sebagai tim dalam pertunjukan (*performance team*) yang mendramatisasi satu aktivitas. Mulyana melihat bahwa tim inilah yang harus mempersiapkan pertunjukan dan jalannya pertunjukan dengan matang, serta saling mendukung satu sama lain agar pertunjukan berjalan mulus (2010).

b. Kontrol Terhadap Informasi

Medlin (2008) berpendapat bahwa tujuan utama dari setiap pertunjukan adalah untuk menjaga agar tiap pertunjukan berlangsung sebagaimana aktor mendefinisikannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka aktor umumnya melakukan kontrol terhadap *front stage*, dan menyembunyikan berbagai elemen yang merusak dari audiens. Elemen yang merusak ini menurut Goffman antarlain adalah pada saat aktor terlalu banyak mengkomunikasikan fakta tertentu, dan kurang mengkomunikasikan fakta yang lain. Oleh karena itu, kontrol terhadap

informasi adalah salah satu cara untuk mencegah munculnya elemen yang merusak tersebut (Medlin, 2008). Namun pada kenyataannya, kontrol informasi tidaklah mudah, antara lain karena audiens memahami bahwa mereka tidak memiliki akses kepada backstage, sehingga mereka menyadari adanya impresi yang disalurkan dan upaya penyembunyian informasi tertentu (Medlin, 2008). Hal ini menimbulkan adanya sudut pandang yang berkembang selama pertunjukan, yang tidak jarang berwujud satu peran tersendiri menjadi apa yang disebut Goffman sebagai “peran sempalan” (discrepant roles). Medlin (2008) mengutip beberapa peran sempalan yang dicontohkan Goffman:

- 1) Informan (informer), yaitu orang-orang yang bertindak sebagai aktor untuk mendapatkan kepercayaan dari tim dan memperoleh akses ke backstage. Aktor “gadungan” ini lalu mengabarkan informasi yang diperolehnya kepada audiens dengan tujuan untuk mengusik pertunjukan.
- 2) Sebaliknya, ada pula rekanan (shill), yaitu orang yang berada di tengah-tengah audiens, namun sebenarnya memiliki hubungan dengan para aktor. Peran rekanan di sini antara lain untuk memancing aksi audiens sebagaimana diinginkan oleh aktor, atau menyediakan reaksi yang diperlukan untuk mengembangkan satu adegan tertentu dalam pertunjukan.
- 3) Mediator adalah orang-orang yang menjadi perantara dan memiliki

kesetiaan baik kepada aktor dan audiens. Mediator ini mampu mendapatkan keyakinan dan informasi rahasia baik dari aktor dari audiens, dan dapat menjamin bahwa informasi tersebut tidak akan bocor ke pihak yang lain.

c. Manajemen Impresi

Pada perspektif dramaturgi, Goffman sebagaimana dikutip Medlin (2008) mendefinisikan seni manajemen impresi sebagai tindakan menjaga munculnya hal-hal yang tidak diharapkan, yang dapat berujung pada rasa malu atau pertengkaran. Ada empat macam tindakan yang dapat terjadi di luar rencana, yang oleh Goffman disebut sebagai insiden dramaturgi, dan dirinci oleh Medlin (2008) sebagai berikut:

- 1) Gerakan yang tidak diniatkan (*unintended gestures*), yaitu saat aktor melakukan gerak-gerik yang tidak diniatkan sebelumnya namun ternyata mendiskreditkan jalannya pertunjukan.
- 2) Intrusi yang tidak pantas (*inappropriate intrusion*), yaitu ketika audiens memasuki backstage dan memergoki aktor dalam situasi yang tidak selaras dengan kesan yang ingin aktor tampilkan di front stage;
- 3) Kecerobohan (*faux pas*), yaitu informasi tentang kehidupan aktor yang apabila terungkap kepada audiens, akan mengganggu atau melemahkan impresi yang disalurkan melalui pertunjukan.
- 4) Kejadian (*scene*), yaitu ketika seorang aktor individu mendiskreditkan

pertunjukan secara umum. Meskipun upaya pendiskreditan ini mungkin saja tidak sengaja terjadi, hasilnya akan tampak dan tetap menimbulkan konflik. Misalnya, Disertasi Arriane (2010) secara khusus menelaah berbagai kejadian di DPR RI, ketika dua atau lebih politisi melakukan perkelahian verbal di rapat-rapat Dewan, padahal kegiatan tersebut umumnya diliput oleh wartawan media cetak dan elektronik. Di sisi lain, mungkin pula salah satu audiens merasa tidak mampu mentolerir pertunjukan yang sedang dimainkan, dan mengkonfrontir aktor dengan ucapan atau tindakan ekspresif yang tidak dapat diterima. Ada pula kemungkinan di mana aktor begitu yakin dengan apa yang ia pertunjukkan, namun ternyata hal tersebut ditolak oleh audiens, dan ini menyebabkan aktor tidak mampu meralat apa yang telah ia lakukan sehingga berujung pada rasa malu.

4. Dramaturgi Dalam Politik

Meskipun teori dramaturgi dikembangkan dalam ranah sosiologi dan memiliki akar antropologis yang mendalam, Merelman memandang adanya keterkaitan antara konsep dramaturgi dengan proses politik, terutama karena dalam politik, politisi acap kali memanfaatkan teknik-teknik dramatis (1969). Merelman berpendapat bahwa hampir seluruh komponen dramaturgi, khususnya pada impression management, sesungguhnya ditiru dari aspek-aspek kehidupan dalam politik. Sebab para politisi berupaya dalam membangun impresi terhadap orang lain melalui sikap serta perilaku mereka (1969). Lebih lanjut Merelman (1969) mengutip bahwa Erving

Goffman mengungkapkan sejumlah status sosial seperti peserta lomba dan para bedah sangat menonjolkan berbagai elemen esensial dalam dramaturgi. Seperti penampilan di hadapan audiens yang banyak, adanya peran yang sangat menonjol, bahkan kadang menentukan hidup dan mati; serta adanya konflik dan pertentangan kepentingan. Merelman berpendapat bahwa elemen-elemen itu hadir pula dalam situasi politik.

Para politisi diharapkan mampu tampil dan mempertunjukkan kemampuannya ketika berada di hadapan audiens. Politisi dalam tingkat yang tinggi harus memiliki peran penting dalam mengatur hajat hidup orang banyak, yang kadang bersinggungan antara kehidupan warga mereka. Misalnya isu terkait kebijakan kesehatan nasional sebagaimana dianalisis oleh Thomas (2008). Politik identik dengan konflik, karena dalam proses politik itu sendiri adalah upaya-upaya dalam memecahkan konflik-konflik dalam nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Kondisi ini yang membuat Merelman menilai bahwa politik mampu dipahami dengan menggunakan komponen dramaturgi (1969).

Meski demikian, Merelman percaya bahwa sangat penting mengetahui berbagai prinsip-prinsip dalam dramaturgi agar dapat memahami konteks politik secara menyeluruh, dan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi bagian dari konsep-konsep tradisional lain yang sudah banyak digunakan dalam menganalisis politik (1969). Melalui pemikiran tersebut, serta mempertimbangkan pola pemanfaatan prinsip-prinsip teori dramaturgi terhadap perilaku dan komunikasi politik para politisi, maka pada

tesis ini Peneliti menggunakan pendekatan dramaturgi sebagai alat dalam memahami konsep hubungan keagenan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin.

Selain itu, dalam menganalisis dramaturgi politik, faktor penting yang perlu diperhitungkan adalah peran serta media. Para pemimpin politik tentu menyadari keterbatasannya dalam menjangkau banyak orang, dan juga politisi juga memahami jangkauan media yang luas ketimbang pertemuan tatap muka. Sehingga pemimpin politik secara sadar perlu menggunakan peran media dalam membangun citra melalui pesan-pesan yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara dalam sudut pandang media, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dan perlu diketahui orang banyak yang mengundang kontroversi adalah hal yang sangat penting dalam membangun ketertarikan masyarakat terhadap media tersebut.

5. Teori Keagenan

Masalah keagenan atau agency problem pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara lebih mendetail pada teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Meckling (1976), menyatakan bahwa manajer pada suatu perusahaan adalah “agen” dan pemegang saham adalah “prinsipal”. Pemegang saham dalam hal ini principal mendelegasikan pengelolaan maupun pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan agen atau perwakilan dari pemegang saham. Pada sistem tersebut, memungkinkan terjadinya permasalahan yang muncul, dimana agen berpotensi membuat kebijakan-

kebijakan yang tidak memenuhi keinginan maupun kepentingan pemegang saham atau prinsipal. Masalah utama dari teori keagenan adalah kondisi dimana tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda berakibat timbulnya konflik karena manajer perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengejar tujuan pribadi. Sehingga berakibat pada kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek ketimbang melahirkan kebijakan yang memberi manfaat pada kesejahteraan pemegang saham melalui investasi jangka panjang.

Sementara hubungan antara pemimpin politik dengan masyarakat melalui bingkai pemahaman hubungan keagenan dikemukakan oleh Eisenhardt (1989). Ia menyatakan bahwa teori keagenan yaitu ketika satu pihak yang disebut prinsipal mendelegasikan pekerjaan ke pihak lain (agen). Melalui pendelegasian itu, ada dua permasalahan yang muncul, yaitu disaat terjadi pertentangan tujuan yang ingin dicapai antara prinsipal dan agen atau saat prinsipal kesulitan dalam memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai harapannya, karena tingginya biaya untuk melakukan hal yang diinginkan. Karena sulitnya memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan harapan prinsipal, maka dapat diasumsikan bahwa agen kemungkinan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh prinsipal kemudian menyembunyikannya untuk kepentingan pribadi.

Fox menilai hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat mungkin saja terjadi. Sesuai dengan penelitiannya yang menunjukkan bahwa pemimpin politik yang sementara berkuasa cenderung melahirkan

kebijakan terkait kepentingan pribadinya, dan bukan berorientasi pada kebijakan yang didasari oleh kepentingan publik (2007). Potensi tidak disampaikannya informasi dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen, sehingga dapat berakibat munculnya berbagai permasalahan pada saat perumusan dan pelaksanaan kontrak antara prinsipal dan agen, yaitu adverse selection dan moral hazard.

Adverse selection dapat terjadi ketika prinsipal tidak yakin apakah ia telah memilih agen yang sesuai untuk memenuhi harapan dan tujuannya (Halim dan Abdullah, 2006). Kondisi seperti ini umumnya terjadi pada prinsipal sebelum pemilihan agen terjadi, maka adverse selection disebut juga sebagai “oportunisme pra-kontrak”. Kondisi ini terjadi karena ketidakmampuan prinsipal dalam membedakan antara agen yang tepat dan agen yang tidak tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan prinsipal. Adverse selection dapat juga diartikan sebagai “informasi yang tersembunyi”.

Peneliti menggunakan definisi Berliant dan Duggan (2008), bahwa adverse selection umumnya terjadi ketika pemilih tidak mengetahui kompetensi dan kemampuan pemimpin dan kebijakan yang akan dipilih, namun hanya dapat melihat konsekuensi dari kompetisi dan kebijakan tersebut.

Moral Hazard terjadi apabila ada kemungkinan bagi agen untuk mengabaikan atau tidak sepenuhnya berupaya untuk memenuhi tujuan dan harapan prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006). Karena situasi ini umumnya

terjadi pada prinsipal setelah agen terpilih. Situasi ini dapat terjadi apabila prinsipal tidak mengetahui bahwa pada dasarnya yang dilakukan agen sebenarnya untuk kepentingan prinsipal itu sendiri. Oleh karena itu moral hazard juga dapat diartikan sebagai “aksi yang tersembunyi”.

Teori keagenan awalnya dikembangkan untuk menjelaskan hubungan organisasi yang terikat dengan konsep-konsep ekonomi (Eisenhardt, 1989). Kemudian Lane menerangkan bahwa teori keagenan juga dapat diberlakukan pada institusi publik yang pada dasarnya mempunyai masalah yang berkaitan dengan hubungan prinsipal dan agen. Kecenderungan masalah itu terjadi karena keinginan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal dari institusi publik. Sehingga terjadilah interaksi antara publik dan institusi publik dipimpin oleh pejabat publik. Dengan kata lain, para pejabat publik (agen) ini merupakan wakil dari masyarakat (prinsipal) untuk menjalankan institusi tersebut. Hubungan antara pejabat publik dan masyarakat.

Masih pada konteks yang serupa, Lemon (2005) melahirkan perspektif yang lebih luas dengan memandang bahwa rakyat pada suatu negara demokrasi dapat disebut sebagai pihak yang “menyewa jasa politisi” guna menjalankan pemerintahan. Sehingga dalam konteks keagenan maka rakyat dapat bertindak sebagai prinsipal yang menggunakan politisi sebagai agen yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan politik. Inilah yang disebut Farejhon sebagai keagenan politik atau political agency (Lemon, 2005). Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan teori ini pada perspektif ekonomi dengan politik. Banks dan

Sundaram (1993) menyoroiti bahwa pada hubungan keagenan di ranah ekonomi, salah satu upaya untuk meminimalisir ketidakseimbangan informasi dilakukan melalui sebuah sistem kontrak antara prinsipal dan agen, antara lain menjabarkan struktur kontraprestasi atau imbalan. Kontraprestasi ini menurut Eisenhardt (1989) dapat berbentuk mekanisme penghargaan sesuai hukum ekonomi, antara lain berupa gaji dan insentif. Kontrak semacam ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan keagenan dengan memotivasi agen agar tidak menyembunyikan informasi dari prinsipal. Pada hubungan keagenan dalam ranah politik, kontrak berbasis hukum ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidaklah ada. Satu-satunya imbalan yang dimiliki prinsipal adalah suara dari hak pilih mereka yang dapat diberikan pada saat pemilihan umum selanjutnya untuk kembali memilih agen tersebut, atau memilih yang lain. Banks dan Sundaram (1993) menganggap suara pemilih dalam konteks teori keagenan di politik adalah elemen esensial yang tak tergantikan. Bahkan lebih jauh lagi, Lemon menyatakan bahwa pemilihan umum adalah kontrak dalam hubungan keagenan politik (2005). Namun “kontrak politik” ini pada implementasinya tidak mudah untuk diterapkan, karena jumlah elektorat atau masyarakat yang besar dan konflik kepentingan di antara para masyarakat itu sendiri menyebabkan hampir tidak mungkin menciptakan suatu mekanisme insentif yang optimal (Berliant dan Duggan, 2008). Jumlah masyarakat yang besar mengakibatkan hilangnya garis konsekuensi yang jelas dari hubungan prinsipal dan agen, sehingga dapat mengakibatkan hubungan itu berujung

tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena meskipun seorang agen telah berusaha dengan maksimal untuk menghilangkan ketidakseimbangan informasi, ia masih dapat diganjar dengan tidak lagi mendapatkan dukungan suara dari prinsipal, khususnya apabila konflik kepentingan yang menentanginya lebih besar dari kepentingannya yang mendukungnya.

Shapiro menyebut hal ini sebagai “masalah keputusan kolektif” (collective action problem), yaitu adanya lebih dari satu prinsipal dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kondisi berpotensi menyebabkan agen menerima bermacam instruksi yang mungkin saja bertentangan antara satu prinsipal dengan yang lain (2005). Shapiro juga mencatat sulitnya menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal apabila tidak menggunakan mekanisme finansial (2005). Kondisi ini dapat berakibat agen di dunia politik tidak mampu merasakan konsekuensi apabila tindakannya tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal; Di sisi lain, keberagaman prinsipal cenderung menyebabkan kontrol untuk perilaku keagenan di ranah politik jauh lebih longgar dibanding di ranah ekonomi (Waterman dan Meier:1998, sebagaimana dikutip oleh Shapiro, 2005).

Penelitian dalam ilmu pendelegasian secara umum menawarkan sejumlah alternatif solusi non finansial terkait munculnya ketidakseimbangan informasi. Lupia dan McCubbins berargumen bahwa ada dua situasi yang membuat kesenjangan informasi mengecil, yaitu:

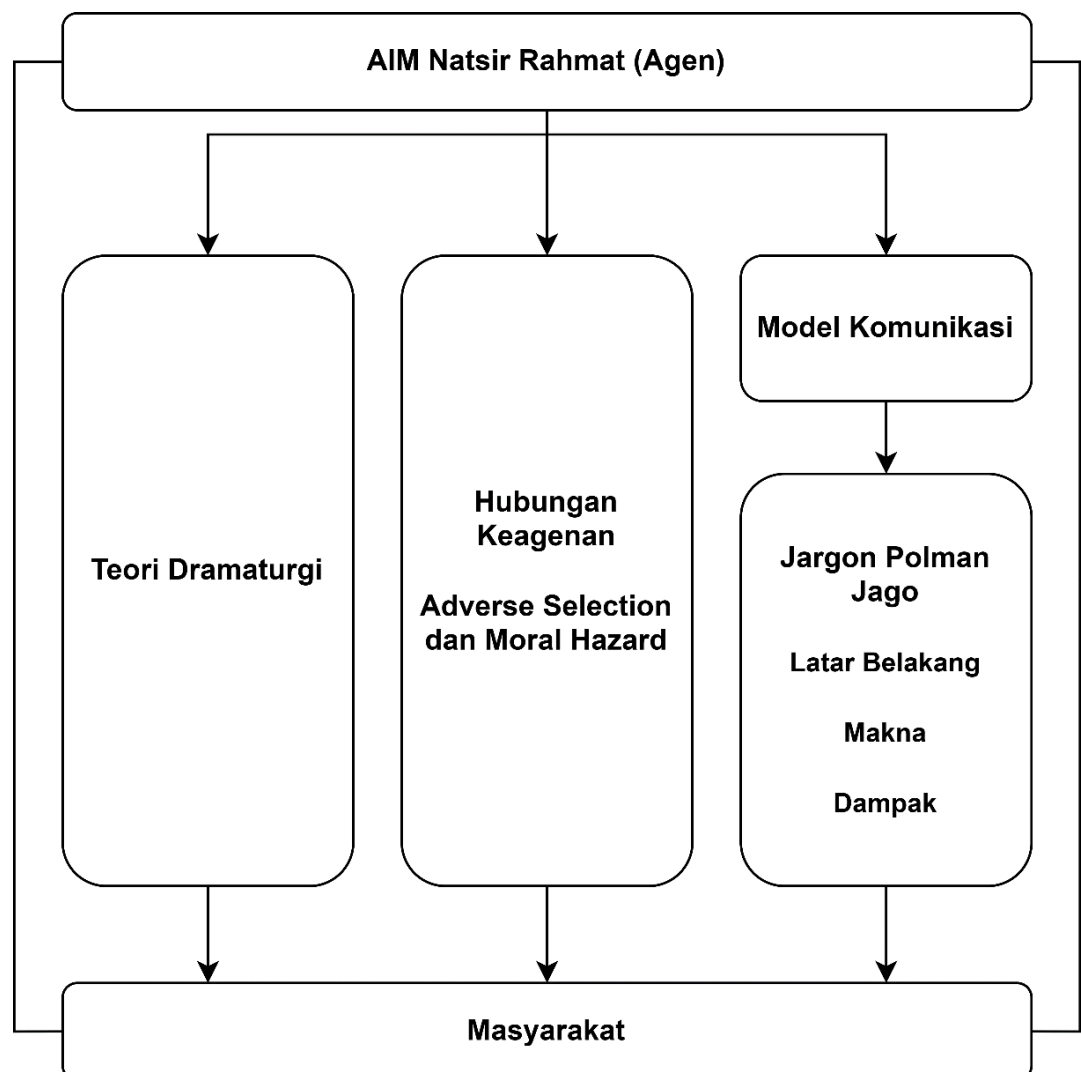
- a. Pertama adalah pada saat prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang sama, sehingga dapat diharapkan perilaku, kebijakan, dan tindakan agen selaras dengan apa yang diinginkan prinsipal. Peneliti juga mengamati bahwa seringkali muncul berbagai isu terkait penyelarasan kepentingan semacam ini menjelang pemilihan kepala daerah. Peneliti menilai bahwa dorongan untuk memilih pemimpin yang memiliki latar belakang kedaerahan atau yang sering diistilahkan dengan putra daerah dianggap sebagai suatu upaya untuk menjembatani agar tidak terjadinya perbedaan kepentingan. Hal tersebut dilakukan karena adanya anggapan bahwa seorang putra daerah lebih memahami kondisi mengenai wilayah yang akan dipimpinya, sehingga dalam menentukan kebijakan dianggap lebih berpihak pada kepentingan masyarakat setempat.
- b. Kedua, hal-hal yang membuat ketidakseimbangan informasi mengecil adalah pada saat prinsipal memiliki pengetahuan mengenai konsekuensi dari kegiatan agen. Dimana prinsipal mendapatkan banyak informasi mengenai tindakan-tindakan yang diambil agen sehingga mampu memutuskan apakah agen itu telah melaksanakan

kepentingan prinsipal (Lupia, 2001). Misalnya peran bagian humas dalam pemerintahan daerah, yang bertugas menjembatani berbagai informasi, kebijakan, dan kegiatan kepala daerah, sehingga masyarakat mengetahui bahwa dalam kepemimpinan kepala daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui penjelasan diatas terkait masalah yang timbul dalam keagenan seperti Adverse selection dan Moral Hazard, maka peneliti mengangkat teori tersebut dalam mencermati bentuk komunikasi politik yang dilakukan sehingga dapat terhindar dari masalah keagenan.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Telah diuraikan permasalahan utama dari tesis ini juga tinjauan teoritis. Peneliti kemudian mengurai pokok-pokok pembahasan tesis ini dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. DEFINISI OPERASIONAL

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap judul yang penulis kaji ini, maka dipandang perlu untuk penulis memberikan beberapa penjelasan istilah diantaranya:

- a. Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategi yang tepat bagi komunikator politik.⁸
- b. Komunikasi politik yaitu proses penyampaian pesan-pesan dari seorang kandidat atau caleg untuk mempengaruhi seseorang dengan cara apapun, untuk membuat masyarakat pemilih menjadi berpihak kepada kandidat tersebut. Sedangkan pesan politik adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk mulai dari poster, baliho spanduk, pidato, diskusi iklan sampai selebaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

B. PENGELOLAAN PERAN SEBAGAI PENELITI

Sesuai dengan judul penelitian maka peneliti di sini berperan mutlak dalam proses penelitian. Peneliti melakukan pengamatan berperan-serta (participant- observation), yaitu upaya Peneliti untuk mengumpulkan data

dengan cara menjadibagian atau terasosiasikan dengan subjek penelitian. Melalui teknik ini, Peneliti berkesempatan untuk tidak hanya sekedar mengamati, namun juga dapat menggali – dan dalam beberapa kesempatan bahkan mengadaptasi – perspektif dari subjek penelitian dalam situasi naturalnya (Frankfort-Nachmias dan Nachmias, dalam Medlin, 2008).

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus, merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya (Ibid). Pandangan yang menekankan keutuhan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memandang konteksnya di mana ada dunia nyata bagi subjek dan responden. Peneliti berkepentingan dengan konteks dalam keadaan utuh pada setiap kesempatan. Sehingga kesempatan bagi peneliti mempunyai arti tersendiri. Peneliti berperan sebagai pengumpul data dengan menggunakan berbagai metode, tentu saja sudah dibekali dengan pengetahuan- pengetahuan.

Peneliti secara cepat memproses data yang diperoleh, dan menyusunnya. Kedudukan peneliti sebagai pengamat partisipan dalam penelitian kembali untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena peneliti merupakan instrumen utama. Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dilapangan maka kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai

peneliti oleh subjek atau informan.

Sedangkan peran peneliti sebagai partisipan penuh. Dalam hal ini peneliti menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya, dengan demikian peneliti dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, termasuk yang dirahasiakan sekalipun. Kesimpulannya kehadiran peneliti sebagai pengamat terbuka yaitu statusnya diketahui oleh subjek dan peran peneliti sebagai partisipan penuh.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian sebagian besar dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut karena subjek penelitian berdomisili dan melakukan aktivitas politik di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi barat.

Selain itu, terdapat juga narasumber yang beraktivitas di Majene, Mamuju, sehingga dalam melakukan proses wawancara, peneliti menemui narasumber di tempat beraktivitasnya.

D. SUMBER DATA

Terkait penelitian ini, peneliti mendapatkan 3 sumber data melalui wawancara yang dilakukan kemudian merupakan kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti tetap menyiapkan sejumlah pertanyaan umum yang menjadi pokok utama dari rumusan masalah. Tetapi dalam proses wawancara Peneliti dapat saja menyampaikan pertanyaan yang tidak ada dalam daftar yang telah disiapkan. Melalui metode ini Peneliti beranggapan akan memberi peluang

bagi diskusi yang lebih terbuka antara Peneliti dan subjek penelitian. Hal ini membuka peluang untuk memunculkan fakta dan data yang tidak terpikirkan oleh Peneliti sebelumnya, dan pada gilirannya memperkaya pemahaman Peneliti terhadap situasi yang dihadapi.

Peneliti membagi tiga sumber data yakni : sumber data primer, sumber data sekunder, dan berbagai informan yang peneliti yakini sebagai sumber-sumber valid yang dekat atau setidaknya pernah berinteraksi dalam waktu yang tidak sebentar dengan objek penelitian, berikut pembagian 3 sumber data yang diperoleh ;

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti yang langsung dari objek yang bersangkutan melalui wawancara maupun pengamatan aktivitas langsung kepada objek melalui sebuah momentum objek yang dimaksud yakni Bapak Andi Ibrahim Masdar selaku Bapak Bupati Polewali Mandar.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui orang dekat dengan objek penelitian misalnya Ajudan AIM, Fotografer Rumah Jabatan, Pihak Keluarga.

c. Informan

Informan yang dimaksud peneliti adalah orang-orang yang pernah dekat dengan objek atau pernah berinteraksi misalnya para wartawan maupun Tokoh masyarakat yang pernah lama berinteraksi.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pada penelitian ini, Peneliti juga menggunakan teknik wawancara, dan analisis dokumen literatur, yakni mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur kepustakaan. Dokumen-dokumen yang menjadi rujukan terkait subjek penelitian antara lain:

1. Beberapa penelitian yang telah ditulis sebelumnya terkait model komunikasi dan jargon;
2. Buku dan jurnal terkait jargon politik;
3. Surat kabar dan berita online mengenai AIM-Natsir Rahmat, aspek-aspek kepemimpinannya, dan hal-hal terkait lainnya;
4. Profil Kabupaten Polman;
5. Tulisan atau postingan AIM-Natsir Rahmat di media social;
6. Dokumentasi foto aktivitas AIM-Natsir Rahmat dalam kurun waktu dua periode terakhir;

Hasil analisis terhadap wawancara dokumen-dokumen diatas kemudian dijadikan sebagai data penunjang untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan baik melalui penelitian berperan-serta dan wawancara mendalam. Peneliti melihat pentingnya analisis dokumen dalam penelitian ini, karena hal tersebut memberi konteks dan latar belakang rasional bagi Peneliti untuk memahami hasil penelitian berperan-serta yang dilakukan dalam periode yang relatif terbatas. Hal ini didukung oleh pendapat

Schatzman dan Strauss, bahwa sebuah penelitian diperkenankan untuk menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen- dokumen yang ada sering dapat menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut (Mulyana, 2010).

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Peneliti memanfaatkan model analisis Miles dan Huberman berupa model interaktif (Idrus, 2009). Model ini terdiri atas tiga kegiatan utama yang jalin- menjalin sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data, dan semuanya diperlakukan secara sejajar untuk membantun wawasan umum yang disebut analisis. Ketiga kegiatan tersebut adalah:

1. Proses reduksi data dengan melakukan proses pemilihan terhadap data-data yang terkumpul dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar;
2. Proses penyajian data melalui penyusunan data yang memungkinkan penarikankesimpulan dan pengambilan tindakan;
3. Penarikan kesimpulan itu sendiri.

G. PENGECEKAN VALIDASI PENEMUAN

Peneliti dalam melakukan validasi data, menggunakan langkah kredibilitas temuan dan interpretasi yang disarankan oleh Moleong (1994, sebagaimana dikutip Idrus, 2009), yaitu mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan

disetujui oleh subjek penelitian. Peneliti juga melakukan teknik triangulasi data untuk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas data, dengan merujuk kepada dua dari empat teknik yang diusulkan oleh Denzin (1978, sebagaimana dikutip Idrus, 2009), yaitu:

1. Peneliti menggunakan lebih dari satu sumber informasi, yaitu dengan berusaha mendapatkan rujukan pendukung bagi setiap informasi yang Peneliti peroleh.
2. Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik penelitian, yaitu dengan menggunakan kombinasi antara pengamatan berperan-serta, wawancara, dan analisis dokumen literatur.

H. TAHAP PENELITIAN

Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2023 hingga Maret 2023. Pada rentan waktu November 2022 sampai dengan pertengahan Desember 2022, peneliti melakukan observasi dan mengumpulkan sejumlah bahan yang mendukung persiapan penelitian. Terkhusus penelitian dengan melakukan pengamatan berperan-serta dilakukan bulan tersebut, pada rentan waktu ini Peneliti juga melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KOTA POLEWALI MANDAR : LOKASI AKSI AIM

Kabupaten Polewali Mandar (Kota Polman) adalah wilayah administratif di bawah Pemerintah Kota Polman, yang sejak 2018 dipimpin oleh Bupati terpilih Andi Ibrahim Masdar (AIM). Di wilayah inilah banyak terjadi interaksi antara AIM sebagai aktor dramaturgi dengan masyarakat Kota Polman sebagai audiens. Sehingga, Kota Polman dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai tempat terbentuknya lokasi aksi atau panggung bagi AIM, sebagaimana didefinisikan oleh Erving Goffman (1956:66) sebagai “satu area yang dibatasi dengan bentukan persepsi tertentu.” Oleh karena itu, Peneliti perlu memaparkan latar belakang dan dinamika Kota Polman untuk memberi konteks bagi pemahaman komunikasi politik AIM.

1. Latar Belakang Kota Polman

a. Geografi, Administrasi, dan Demografi Kota Polman

Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur Kabupaten Mamasa di sebelah utara Selat Makassar di sebelah selatan dan Kabupaten Majene di sebelah

barat Kabupaten Polewali Mandar merupakan gerbang menuju Sulawesi Barat dengan jarak tempuh 245 KM atau waktu tempuh empat jam 53 menit dari Makassar sedangkan dari Mamuju sebagai pusat pemerintahan provinsi Sulawesi. memiliki luas wilayah 2.074,76KM persegi dengan panjang garis Pantai mencapai 94,2 km serta topografi 40% berbukit 40% bergunung dan sisanya 20% bertopografi datar. Kabupaten Polewali Mandar terbagi atas 16 Kecamatan 23 Kelurahan dan 144 Desa jumlah penduduk berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Desember 2021 sebanyak 486.339 jiwa 49,98% laki-laki dan 50,2 % perempuan. sebagai daerah lumbung pangan dengan kontribusi terbesar di Sulawesi Barat sebagaimana kondisi tahun 2021 produksi padi mencapai 173.728,49 ton kontribusi terhadap Sulbar mencapai 53,72% produsen Kakao 36.480,55 ton kontribusi 55,35% kelapa 17.497,79 ton kontribusi 55,94% populasi sapi 36.100 ekor kontribusi 31,34% kambing 94.700 ekor kontribusi 48,02 % unggas 1.933.000 ekor kontribusi 38,7% produksi perikanan tangkap 26.022 ton kontribusi 40,5% perikanan budidaya 37.509 ton kontribusi 28,08%. Polewali Mandar juga memiliki industri mikro kecil terbesar di Sulawesi Barat mencapai 40,3 persen yaitu 10.423 IKM termasuk IKM tenun Sutra corak khas Mandar di sektor pariwisata Polewali Mandar merupakan penyumbang terbesar wisatawan Sulawesi Barat mencapai 48 persen.

b. Sejarah dan Landasan Dinamika Sosial Politik Kota Polman

Polewali dikenal sebagai salah satu kota dengan dinamika sosial politik yang menonjol di Sulawesi Barat. Ini terkait dengan catatan historis Kota Polman yang menjadi tempat munculnya berbagai konflik politik feodal, kolonial, dan pergerakan rakyat.

Sejarah mencatat bahwa Kerajaan di Mandar berawal dari Desa di Kabupaten Polewali Mandar yang berlokasi strategis karena berada di sisi sungai besar (Sungai Mandar). Sejarah juga mencatat bahwa ada 7 kerajaan pesisir dan tujuh kerajaan pegunungan yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten Polewali Mandar yang biasa dikenal dengan Pitu' Ulunna Salu dan Pitu' Babana Binanga. Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling Mamasa yang meliputi:

1. Tabulahan (Petoe Sakku);
2. Aralle (Indo Kada Nene');

3. Mambi (Tomakaka);
4. Bambang (Subuan Adat);
5. Rantebulahan (Tometaken);
6. Matangnga (Benteng);
7. Tabang (Bumbunan Ada).

Berdasar atas latar belakang tersebut, Penulis melihat bahwa dinamika kekuatan politik kolonial dan feodal di Kota Polman telah menjadi bagian integral dari sistem kekuasaan kota ini sejak awal pendiriannya. Loyalitas feodal yang tercipta di Polewali tidaklah sentralistis dan terpusatkan pada kekuatan tunggal, sebagaimana misalnya yang Peneliti lihat cenderung terjadi pada Kerajaan Balanipa.

c. Pluralisme Politik Kota Polman

Spektrum politik Polewali yang demikian diversif di masa lampau tetap menjadi ciri bagi Polewali di masa kini. Sebagai dinyatakan oleh “Ani:” “Semua aliran ada di Polewali; Dari yang kiri sampai yang kanan, lengkap” (Wawancara “Ani,” 8 Februari 2018). AIM juga mengungkapkan hal yang sama: “Di Kota Polman ini komplit. Ada fundamentalis Kristen, fundamentalis Islam, fundamentalis tolotang, (Zaenuddin, 2018:67). Mengkonfirmasi kedua pernyataan tersebut, penelitian menunjukkan bahwa menjelang dan pasca berakhirnya zaman Orde Baru 1998, Polewali dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu episentrum pertumbuhan gerakan radikal. Gerakan radikal yang bermazhab nasionalis dan memiliki basis massa signifikan di Polewali.

Di sisi lain, gerakan fundamentalis berbasis keagamaan juga tumbuh

subur di Polewali dan sekitarnya. Gerakan ini antara lain adalah Front Pemuda Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Anshorut Tauhid.

Polewali juga tercatat merupakan salah satu kota di Indonesia yang banyak dilanda gejolak. Karena kerentanan sebagai tempat terjadinya konflik, Polewali terkadang disebut sebagai “wilayah bersumbu pendek.

2. Latar Belakang Hubungan AIM dengan Warga Polewali

Sebagaimana kota dan kabupaten lain di Indonesia, Kota Polman dihadapkan pada tantangan desentralisasi dalam kaitannya dengan masyarakat yang kini memegang wewenang untuk menentukan pemimpin secara langsung. Dalam konteks formal, tantangan tersebut bagi Kota Polman dimulai saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Polman pada tanggal 27 Juni 2018, yaituketika warga Kota Polman harus menentukan sendiri pasangan Bupati dan wakil Bupati mereka.

Munculnya tantangan desentralisasi tersebut menyebabkan masyarakat Polewali dihadapkan pada permasalahan keagenan yang telah Peneliti paparkan pada Bab 2 dari penelitian ini. Dengan menggunakan definisi Keagenan Politik sebagaimana diajukan Berliant dan Duggan (2008:2), dan dikaitkan dengan topik penelitian, Peneliti membagi permasalahan keagenan masyarakat Polewali menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Polewali dihadapkan pada permasalahan adverse selection, yaitu tidak mengetahui kompetensi Andi Ibrahim Masdar (AIM). Dengan kata lain, warga Polewali tidak mengetahui apakah AIM orang yang tepat

untuk menjadi Bupati mereka. Yang kedua, masyarakat Polewali juga dihadapkan pada permasalahan moral hazard, yaitu bahwa mereka tidak mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh AIM, namun hanya dapat mengetahui konsekuensi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat tidak mengetahui apakah kegiatan AIM sudah sejalan dengan tujuan pemenuhan kepentingan masyarakat Polewali, atau tidak berkorelasi dan justru menegasikan tujuan tersebut.

Sebagai upaya untuk semakin memahami keunikan Polewali dalam konteks kedua permasalahan keagenan tersebut, Peneliti melihat setidaknya ada dua hal yang relevan untuk menjadi catatan dalam penelitian ini. Pertama, hubungan antara masyarakat dan Bupati Polman sebelum AIM tidaklah terbangun dengan baik, antara lain karena saluran komunikasi yang tidak ada. Muaz (2018:41) mencatat bahwa Bupati sebelum AIM begitu tertutup, sehingga tidak pernah membuka pintu gerbang Bupati, dan setiap orang yang hendak bertamu hanya bisamasuk melalui pintu belakang. Bupati tersebut juga tertutup terhadap wartawan menolak diwawancarai tanpa penjadwalan dan persiapan khusus (Muaz, 2018:40).

Kedua, menjelang Pilkada langsung di 2018, Kota Polman secara politis terbagi menjadi beberapa kelompok massa yang mendukung kandidat yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan dukungan kepada AIM tidaklah mutlak. tercatat pada Pilkada Polewali 2018, selain pasangan AIM dan Natsir Rahmat (AIM-BeNar) terdapat pula Pasangan Salim- Marwan.

Perolehan suara pasangan kandidat Bupati Polman dan wakilnya di Pilkada 2018 serta gambaran proporsi partai-partai pendukungnya di legislatif dipaparkan pada Tabel di bawah ini:

Nama Pasangan	Perolehan Suara (%)	Partai Pendukung	Total Perolehan Suara Partai Pendukung saat Pileg 2018 (%)
AIM – Natsir	55,34	PDI-P, PKB, GERINDRA, PAN, PKS, GOLKAR, PKPI	63,83
Salim – Marwan	44,65	DEMOKRAT, NASDEM, PPP	36,17

Tabel 4.1. Hasil Pilkada Polewali 2018

Data di Tabel 4.1. menunjukkan, bahwa meskipun akhirnya pasangan AIM- BeNar memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 55,34%,. Sementara itu, pasangan yang berada urutan kedua adalah Salim-Marwan, yang memperoleh suara sebesar 44,65%. Perolehan suara ini terbilang tidak jauh. Hal tersebut menjadi sinyal bahwa massa partai pendukung AIM-NATSIR tidak secara solid mendukung pasangan tersebut.

Analisis diatas menjadi landasan argumentasi Peneliti bahwa pada saat itu telah terdapat ketidak-seimbangan informasi (information asymmetry) yang cukup besar di kalangan masyarakat Polewali terhadap figur AIM. Dukungan terhadap AIM yang kurang dari setengah dari total pemilih Polewali, serta berkurangnya massa dari partai pendukung AIM mencirikan telah terjadinya adverse selection, sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat Polewali saat itu mengenai kompetensi AIM, dan

mengenai kebijakan yang akan diambilnya apabila terpilih menjadi Bupati.

B. PENDEKATAN DRAMATURGI DALAM KOMUNIKASI POLITIKAIM

Pada bagian ini, Peneliti akan menelaah komunikasi politik yang dilakukan oleh AIM selama periode penelitian, berdasarkan elemen-elemen dramaturgi Erving Goffman yaitu: panggung, kontrol terhadap informasi, dan manajemen impresi.

1. Panggung Depan AIM

a. Penciptaan Panggung Depan

Menurut Goffman, pertunjukan dalam dramaturgi adalah setiap interaksi sosial yang terjadi. Penciptaan panggung merupakan komponen penting di tahap awal, karena memberikan indikasi mengenai waktu serta suasana selama interaksi sosial itu berlangsung (Medlin, 2008:36). Berlandaskan pemahaman tersebut, maka Peneliti melihat setiap tindakan AIM yang melibatkan masyarakat Polewali, baik secara langsung maupun melalui perantaraan media, adalah panggung depan bagi pertunjukan dramaturgi. Hal ini menyebabkan panggung dramaturgi AIM dapat tercipta melalui dua hal, yaitu: Pertama, kapasitas tugas formalnya selaku Bupati membuatnya kerap terlibat dalam aktivitas yang mewajibkan dirinya berinteraksi dengan masyarakat; Dan kedua, dorongan motivasi internal AIM untuk selalu ingin lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Baginya, permasalahan utama adalah berada di tengah masyarakat, dan hal ini lebih menjadi prioritas utamanya daripada terikat dengan jadwal

formal.

Untuk keperluan penelitian ini, Peneliti mengelompokkan panggung AIM menjadi tiga jenis berdasarkan metode penciptaannya apabila dipandang dari perspektif AIM, yaitu:

1. Penciptaan panggung yang terantisipasi dan terjadwal;
2. Penciptaan panggung yang terantisipasi dan spontan;
3. Penciptaan panggung yang tidak terantisipasi dan spontan;

Metode pertama (Metode I) adalah penciptaan panggung terantisipasi dan terjadwal, yaitu ketika sebuah interaksi berlangsung karena sudah dijadwalkan sebelumnya, sehingga baik AIM maupun audiens telah memiliki informasi pendahuluan mengenai interaksi tersebut. Kondisi ini memungkinkan kedua belah pihak melakukan persiapan yang memadai untuk memulai interaksi, misalnya tema acara dan plot (Medlin, 2008:35).

Interaksi yang tercipta dengan Metode I lebih lanjut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kegiatan seremonial, yang memposisikan AIM selaku bagian dari sebuah interaksi dengan audiens yang relatif banyak dan memiliki struktur serta alur interaksi formal yang sudah direncanakan sebelumnya. Contoh dari kegiatan seremonial antara lain adalah ketika AIM menghadiri acara peluncuran buku (18 Februari 2018). Yang kedua adalah kegiatan pertemuan, yang memposisikan AIM sebagai bagian dari sebuah interaksi yang dengan jumlah audiens yang relatif lebih terbatas sehingga membuka peluang bagi interaksi yang lebih intens dan informal, serta memiliki struktur dan alur interaksi yang

terencana namun relatif lebih cair dan akomodatif terhadap perubahan situasional. Contoh dari kegiatan pertemuan ini aktivitas-aktivitas audiensi AIM, misalnya ketika ia diwawancara rombongan siswa SMA 1 Polewali untuk keperluan peliputan majalah sekolah (14 Februari 2018). Kedua kelompok kegiatan yang terantisipasi dan terjadwal ini umumnya merupakan bagian dari kegiatan resmi AIM selaku Bupati dan telah diagendakan sesuai prosedur, baik oleh kantor protokol Bupati di Bupati maupun kantor sekretariat AIM yang terletak di samping Jalan todilaling.

Untuk interaksi publik AIM yang proses penciptaannya masuk ke dalam Metode I, Peneliti mendapati bahwa jumlah interaksi yang sesungguhnya terlaksana jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah undangan kepada AIM untuk mengadakan interaksi dengan pola ini. Dokumen berisikan jadwal acara harian Bupati yang diperoleh Peneliti menunjukkan bahwa AIM sendiri berperan untuk memperkecil jumlah interaksi formal semacam ini, dengan mendisposisi berbagai undangan kegiatan seremonial kepada Sekretaris Daerah maupun kepala- kepala dinas terkait.

Perbandingan antara undangan yang diterima oleh AIM, yang dihadiri sendiri, dan yang didisposisikan ke pihak-pihak lain dirangkum dalam Tabel di bawah ini:

Periode Pengamatan (Senin-Minggu)	Jumlah Undangan pada AIM ke Kegiatan Seremonial	Didisposisikan ke Sekda/Kadis Terkait		Dihadiri sendiri		Total Undangan yang Disetujui
		Jumlah	%	Jumlah	%	
13 Feb – 19 Feb	43	15	35%	9	21%	24
20 Feb – 26 Feb	34	16	47%	5	15%	21
27 Feb – 4 Mar	46	17	37%	5	11%	22
5 Mar – 11 Mar	33	10	30%	10	30%	20
TOTAL	156	58	37%	29	18%	87

Tabel 4.2. Perbandingan jumlah undangan ke acara seremonial/formal kepada AIM, yang didisposisi dan yang dihadiri sendiri

Dari Tabel 4.2. diatas, dapat diketahui bahwa selama periode penelitian, sebagian besar undangan kegiatan-kegiatan seremonial dan formal yang disetujui untuk dihadiri, selanjutnya didelegasikan kepada jajaran Pemerintah Kota dibawahnya. Selama 28 hari tersebut, AIM sendiri hanya menghadiri 29 acara formal, atau 18% dari seluruh undangan seremonial yang ditujukan kepadanya. Ini menunjukkan AIM umumnya hanya menghadiri satu acara formal dan/atau seremonial per harinya. Data ini mengindikasikan bahwa aktivitas seremonial AIM tidaklah terlalu banyak, dan konsisten dengan keinginan AIM yang tidak ingin disibukkan

dengan hal-hal yang bersifat seremonial dan administratif, namun lebih memilih untuk mendelegasikannya pada jajaran dibawahnya (wawancara AIM, 13 Februari 2018).

Metode penciptaan panggung yang kedua (Metode II) adalah penciptaan panggung yang terantisipasi dan spontan, yaitu ketika sebuah interaksi diputuskan secara langsung dan sepihak oleh AIM. Dalam hal ini, "langsung dan sepihak" berarti kegiatan diputuskan hanya beberapa saat sebelum interaksi terjadi dan tanpa kabar pendahuluan yang memadai kepada audiens. Karena kegiatan ini diinisiasi oleh AIM, maka adanya interaksi ini sudah dapat diantisipasi oleh AIM, namun persiapannya hanya diketahui hanya oleh AIM. Sedangkan bagi pihak audiens yang tidak mendapatkan informasi sebelumnya, interaksi dengan AIM di sini merupakan hal yang tidak diduga-duga. Panggung semacam ini terjadi antara lain saat AIM mengunjungi salah satu kantor kecamatan untuk mengecek proses penerbitan KTP dan surat izin (15 Februari 2018), dan mengunjungi kantor Polewaliterkini untuk berbincang dengan jajaran redaktur (14 Februari 2018).

Analisis Peneliti menunjukkan bahwa AIM cenderung untuk memilih penciptaan panggung Metode II daripada Metode I, karena ia menganggap Metode II ini efektif dalam membangun masyarakat dan birokrasi yang senantiasa merasa mendapatkan perhatian dari pemimpinnya. AIM juga memandang pada pola penciptaan panggung dengan Metode II memiliki dampak komunikasi yang meluas di masyarakat. Menurut pendapatnya:

“...Hal itu [Dialog langsung – Pen.] memang (kegiatan yang) mikro sekali, tapi ya harus kita kerjakan, gimana kalau tidak. Tapi (bila saya turun dan berdialog langsung) seperti itu suaranya (menyebarkan) ke mana-mana. (Bila masyarakat berkata,) ‘Wah, kemarin (saya) ditegur sama Pak Bupati,’ itu suaranya ke mana-mana, jangan main-main... Yang lain juga jadi berpikir, ‘Wah, nanti saya (berarti ada kesempatan) ditegur, didatangi.’ Masyarakatnya (merasa) on, karyawan juga (merasa) on. Ya (dari) masalah sepele-sepele (seperti) itu.” (Wawancara AIM, 14 Februari 2018).

Metode yang ketiga (Metode III) adalah penciptaan panggung yang tidak terantisipasi dan spontan, yaitu ketika sebuah interaksi terjadi karena diinisiasi oleh audiens yang mendatangi AIM secara langsung dan tanpa perjanjian atau membuat jadwal terlebih dahulu. Dari sudut pandang AIM, hal ini merupakan hal yang tidak dapat diduga-duga, karena tidak diagendakan sebelumnya, pun tidak ia antisipasi. Contoh interaksi yang terbentuk dengan metode III adalah pada saat AIM didatangi warga miskin yang meminta bantuannya (14 Februari 2018), atau dihentikan para demonstran dan wartawan di saat Car-Free Day (4 Maret 2018).

Proses pembentukan panggung menggunakan Metode III adalah hal baru dalam hubungan antara pemimpin Polewali dan masyarakatnya, karena selama ini model kepemimpinan di Polewali cenderung membatasi interaksi secara spontan antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, para Bupati yang memimpin Polewali di periode sebelumnya cenderung tertutup kepada media, dan hanya memberikan wawancara setelah ada surat permohonan resmi dari wartawan yang bersangkutan dengan disertai daftar pertanyaan (Muaz, 2018:41).

Di masa kepemimpinannya, AIM membiarkan masyarakat menemuinya dengan bebas, dan seringkali tanpa perlu melewati perantaraan aturan protokoler. Sebagai contoh, Peneliti mengamati bahwa bagi warga masyarakat yang hendak menemui AIM, mereka hanya perlu datang ke Bupati, untuk kemudian dipersilakan menunggu dan ditemui AIM apabila tiba, sebagaimana yang terjadi terhadap seorang warga kota miskin yang meminta bantuan AIM (14 Februari 2018). Bahkan apabila AIM terbentur dengan jadwalnya yang sudah terbentuk dengan Metode I, ia akan mencari cara untuk dapat bertemu dengan masyarakat.

Hal ini terjadi pada tanggal 1 Maret 2018, saat AIM ditunggu oleh beberapa kelompok masyarakat sekaligus di Bupati, padahal di waktu yang sama ia telah dijadwalkan untuk meresmikan cabang baru dari sebuah bank. Menghadapi situasi tersebut, AIM menemui kelompok masyarakat tersebut di ruang tamu Bupati, meminta mereka untuk menunggu, dan menjanjikan akan segera kembali untuk menemui mereka sekembalinya ia dari acara peresmian.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa unsur spontanitas adalah komponen penting yang terdapat dalam Metode II dan Metode III. Pada penciptaan panggung dengan Metode II, tuntutan untuk bertindak spontan berada pada audiens yang dijumpai AIM; Sedangkan pada penciptaan panggung dengan Metode III, tuntutan spontanitas berada pada AIM selaku aktor. Peneliti memahami bahwa spontanitas semacam ini adalah hal yang diharapkan oleh AIM dalam interaksinya, karena spontanitas memperkecil

peluang terjadinya manipulasi pesan yang terjadi.

Penciptaan panggung secara spontan sebagaimana tercermin dari Metode II dan III diatas konsisten dengan pandangan Goffman mengenai fungsi spontanitas dalam panggung dramaturgi. Sebagaimana dikutip oleh Barnhart (1994), Goffman menganggap bahwa melalui spontanitas, aktor berupaya menciptakan panggung depan yang tidak terlihat bagaikan rekayasa, dengan cara mendorong perwujudan diri yang seasli mungkin. Peneliti juga melihat bahwa sebagai prasyarat untuk melakukan sebuah interaksi spontan yang baik, seorang aktor perlu senantiasa memiliki penguasaan terhadap materi agar ia mampu bereaksi dengan tepat terhadap setiap kejadian selama interaksi berlangsung.

b. Setting dan Personal Front AIM di Panggung Depan

Goffman membagi kawasan depan menjadi set panggung (setting) dan perangkat pribadi (personal front). Bila diaplikasikan dalam konteks AIM, maka setting yang melekat padanya adalah situasi yang mendukung perannya sebagai Bupati, antara lain Bupati, Rumah dinas, serta lokasi-lokasi lain yang telah disiapkan baginya, seperti kursi di baris terdepan yang direservasi untuk Bupati pada acara-acara seremonial. Sedangkan personal front adalah perangkat yang dianggap audiens dapat menunjukkan status AIM sebagai Bupati, baik dalam bentuk fisik maupun sikap. Perangkat pribadi AIM yang berbentuk fisik antara lain adalah seragam dinas, mobil dinas, serta rombongan protokol dan pengawal, sedangkan sikap adalah perilaku dan pembawaannya sebagai Bupati.

Berdasar pengamatan Peneliti, AIM memahami adanya setting dan personal front dirinya sebagai Bupati, dan berhati-hati dalam menanganinya. Setidaknya ada tiga hal yang mengindikasikan perilaku tersebut. Yang pertama, AIM sengaja memilih tempat-tempat yang sederhana untuk menjamu para tamunya. Peneliti mencatat beberapa kali AIM menjamu pejabat yang berkunjung ke Polewali di warung-warung kaki lima,. Alasan pemilihan warung sebagai lokasi untuk menjamu para pejabat tinggi diutarakan AIM sebagai berikut:

“Ketemu dirjen, ketemu menteri, ya ngajaknya makan di (warung) coto, di (warung) sate, (warung) kelas-kelas PKL [pedagang kaki lima – Pen.]. Nggak pernah kita ajak ke restoran, karena kita ingin menyampaikan kesan, keberpihakankita ke mana. Ini harus disampaikan dalam tindakan-tindakan seperti itu. ... (Staf para pejabat dari) provinsi (dan) pusat itu sering mau ngajak pindah ke restoran, katanya nggak menghargai (pejabat yang dijamu), (padahal) mindset-nya itu yang perlu dibenahi. (Wawancara AIM, 14 Februari 2018).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa melalui pemilihan warung kaki lima sebagai tempat menjamu para tamunya, AIM ingin mengirimkan isyarat keberpihakannya kepada masyarakat, baik para pengunjung yang menyaksikan langsung maupun warga Polewali yang membaca berita tersebut melalui media yang meliput. Pemilihan warung ini juga menunjukkan bahwa AIM menyadari setting yang tepat bagi dirinya untuk tampil di publik, dengan cara mengubah setting yang jamak diasosiasikan publik terhadap pejabat (yaitu restoran) menjadi setting yang diasosiasikan lebih dekat dengan masyarakat kebanyakan (yaitu warung kaki lima).

Hal kedua yang mengindikasikan kehati-hatian AIM dalam mengatur setting adalah kecenderungannya untuk menghindar dari setting yang telah

diciptakan untuknya. Indikasi tersebut Peneliti dapat setelah mengamati tindakan AIM di dalam acara-acara formal yang memilih duduk di lokasi yang tidak mencolok, dan bukan di kursi yang telah dipeservasi oleh penyelenggara acara untuk rombongan

Bupati AIM juga terindikasi berhati-hati dalam dalam mengendalikan personal front dirinya. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya tentang sistem protokoler, yang merupakan bagian dari personal front seorang Bupati. Sebagaimana ia ungkapkan kepada Peneliti:

“Kepala daerah itu (kalau bepergian) ke mana-mana, di depan (mobilnya) pasti ada Patwal [motor patroli pengawalan – Pen.], di belakangnya ada kepala dinas ikut (mengiringi dengan) 20 mobil... Saya tujuh tahun jadi Bupati nggak pernah (melakukan hal) kayak gitu. Semau saya aja, kalau pas ada hal yang penting, (dan) perlu protokol, ya oke. Tapi kalau nggak (perlu), ya nggak (pakaiprotokol), ngapain.” (Wawancara AIM, 13 Februari 2022).

Pernyataan AIM tersebut konsisten dengan hasil pengamatan Peneliti. Selama periode penelitian, AIM hampir selalu bepergian dalam satu mobil tanpa keikutsertaan kendaraan lain, baik berupa pengawalan maupun rombongan dinas.⁴ Dalam proses perpindahannya dari satu lokasi ke lokasi lain di Polewali, rombongan AIM hanya terdiri atas AIM, satu ajudan, serta satu supir, dan ketiganya berada dalam mobil yang sama. Dalam berbagai kegiatan resmi yang menuntut kehadiran Sekretaris Daerah maupun kepala-kepala dinas terkait, seperti pada saat penyambutan Menteri (16 Februari 2018) dan berbagai kegiatan kemasyarakatan, AIM akan langsung datang sendiri bersama kedua stafnya tersebut ke tempat acara, sedangkan Sekretaris Daerah maupun

kepala dinas hadir secara terpisah ke lokasi acara. Ini berbeda dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh pemimpin daerah di tempat lain yang umumnya datang ke tempat acara bersama-sama rombongan.

Kecenderungan AIM untuk menghindari protokoler juga tampak ketika ia terindikasi sebisa mungkin meninggalkan tempat acara tanpa bergabung dengan rombongan protokol pejabat yang umumnya menggunakan pasukan pengawalan. AIM terlihat sengaja memilih untuk meninggalkan tempat acara lebih lambat dengan membiarkan rombongan pejabat pergi terlebih dahulu, agar dapat leluasa menghindar dari rombongan protokoler.

Satu peristiwa yang memperkuat indikasi kehati-hatian dalam hal penggunaan personal front dan setting ini dapat dilihat sesuai AIM menjamu makan siang seorang pejabat tinggi dari sebuah kementerian, yang hadir bersama sekitar 15 orang pejabat dinas terkait di tingkat Kota Polman dan Provinsi Sulbar, diiringi beberapa motor patroli pengawalan. Kali ini mobil dinas AIM ikut berada dalam konvoi rombongan, karena meninggalkan lokasi pada waktu yang bersamaan dan melalui rute yang sama pula. Saat rombongan tiba di persimpangan, lampu lalu-lintas menandakan merah, sehingga motor patroli pengawalan menghentikan lalu-lintas yang bersilangan agar rombongan dapat terus melaju tanpa hambatan. Menyaksikan hal ini, AIM dengan cepat menginstruksikan kepada supirnya "Tidak usah mengikuti rombongan itu!" Maka supir AIM seketika menghentikan mobil dinas yang kebetulan berada di posisi paling akhir dari konvoi, agar berhenti sebelum lampu lalu-lintas serta membiarkan mobil

tersebut terpisah dari rombongan.

Peneliti yang menyaksikan kejadian diatas menilai bahwa reaksi spontan AIM dipicu oleh kesadaran bahwa ia sedang menggunakan simbol personal front Bupati dan berada dalam setting seorang pejabat, namun justru tidak ingin menonjolkan kedua hal tersebut, terlebih untuk hal-hal yang dapat dipersepsinegatif oleh masyarakat (seperti melanggar lampu lalu-lintas dan mengambil hak pengguna jalan lain dari arah yang bersilangan). Kejadian ini memperkuat indikasi bahwa AIM menyadari bahwa persepsi masyarakat selaku audiens dapat dibangun melalui setting dan personal front, dan oleh karenanya mengontrolnya agar tidak mencederai peran yang ingin ia tunjukkan.

c. Media dan TIM media

Penerapan konsep dramaturgi dalam panggung depan AIM ini juga kemudian melibatkan media yang di sajikan langsung oleh tim Media AIM sendiri selaku kandidat,dalam pengembangan penelitian,peneliti menemukan tidak sedikit sajian media AIM yang sengaja di setting guna menyajikan informasi mengenai AIM dalam keseharian dan aktifitas sehari-harinya,inidisadari oleh AIM merupakan instrument penting dalam proses branding dan keterbukaan informasi. Media sosial tidak hanya sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi tapi juga menjadi sebuah media untuk mempresentasikan diri penggunanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Goffman bahwa setiap individu memerlukan suatu wadah dan atribut untuk dapat memainkan suatu peran yang sudah disiapkan.

Media sosial seperti Instagram dan Youtube dimanfaatkan oleh penggunanya (pemilik akun) sebagai wadah atau media untuk menciptakan kreatifitas, menuangkan ide dan pikiran dalam sebuah konten yang diunggah di media sosial dan dapat dinikmati oleh para pengikutnya. Strategi Impression management, presentasi diri dan dramaturgi sesungguhnya menjadi satu kajian yang menyeluruh untuk dapat melihat bagaimana aktifitas seseorang di media sosial. Setiap orang akan melakukan presentasi diri di media sosial, untuk melihat presentasi diri tersebut perlu menggunakan pendekatan dramaturgi untuk melihat panggung depan dan panggung belakang. Ketika seseorang ada dipanggung depan, orang akan mencoba mengelola kesan untuk menimbulkan respon tertentu pada orang lain dengan menggunakan strategi impression management. Ini bisa dilihat di setiap surat kabar yang beredar di polewali mandar, setiap hari menyajikan berita tentang AIM dalam kurun tahun 2013 sampai 2018, media yang terbit memiliki halaman yang khusus untuk memuat berita tentang aktifitas AIM, ini menunjukkan bahwa pengelolaan media oleh TIM media AIM sangat produktif dalam membangun branding personalisasi AIM selaku aktor politik sekaligus tokoh masyarakat polewali mandar yang siap membangun daerah dari setiap dimensi kemasyarakatan.

2. Panggung Belakang AIM

Dalam pengertian Goffman, backstage adalah suatu kawasan pribadi aktor yang memungkinkannya menampilkan situasi yang informal dan familiar, serta memberi kesempatan untuk melakukan persiapan untuk pertunjukan mereka (Medlin, 2008:43,44,85). Berdasarkan pengamatan Peneliti, backstage bagi AIM adalah setiap kawasan atau lokasi yang memberi ruang bagi dirinya dan para anggota timnya mengekspresikan secara terbuka untuk mengenai berbagai hal, termasuk berdiskusi tentang hal-hal yang akan dilakukan pada saat berinteraksi dengan masyarakat.

a. Perilaku AIM di Panggung Depan dan Belakang

Pengaburan antara front stage dan backstage AIM tidak hanya terbatas pada lokasi, namun juga tampak pada perilaku AIM selaku aktor. Penulis mengamati bahwa pada beberapa kesempatan, AIM melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya hanya dilakukan di backstage, namun ia pertunjukkan di depan para audiens yang pada umumnya hanya memiliki akses ke front stage. Hal ini terjadi antara lain pada saat AIM dengan rileks berganti kostum untuk acara karnaval wayang orang di teras belakang Rumah dinas, meskipun saat itu sedang ada beberapa wartawan di lokasi yang sama (18 Februari). Pada kesempatan lain dan masih di teras belakang Rumah dinas, ia melakukan wawancara sambil membuka sepatu dan melipat kedua kakinya diatas kursi (10 Maret). Hal-hal semacam ini tentunya bukanlah pemahaman yang biasa dilihat secara terbuka terhadap figur seorang Bupati. Indikasi kekaburan secara khusus ditunjukkan pada

saat panggung AIM tercipta secara spontan, baik menggunakan penciptaan panggung

Metode II maupun Metode III. Pada kesempatan door-stop interview oleh wartawan, terkadang ditanyakan hal-hal yang Jawabannya terlalu sensitif untuk diungkapkan pada saat itu. Dalam merespons hal tersebut, AIM secara terbuka mengatakan bahwa ia belum bisa menjawab karena topik tersebut masih sensitif dan sedang dalam pembahasan (22 Februari 2018).

Lebih jauh, Peneliti mendapati bahwa sikap AIM yang apa adanya dan tidak berpretensi untuk mengetahui segalanya ini adalah justru bagian dari metode komunikasi yang dijalaninya. Hal ini seperti yang diungkapkan "Rudi" sebagai berikut:

"Beliau kan orangnya apa adanya. Lalu tidak memperbesar fakta yang ada. Kalau istilah orang Polewali, itu (disebut) rendah hati. Terus, tidak jaim... Kalau beliau kelihatan bingung, ya nggak apa-apa. Jangan kelihatan perfect, (karena) itu bukan manusia." (Wawancara "Rudi," 9 Maret 2018)

Sikap semacam itu sesungguhnya tidak konsisten dengan pemahaman konsep dramaturgi pada umumnya. Sebagaimana dikutip Mulyana (2018:116), Goffman berargumen bahwa dalam menjalankan perannya, aktor akan berusaha menyajikan "diri yang diidealisasikan" di front stage. Karena alasan inilah, aktor merasa perlu melaksanakan berbagai teknik untuk menyembunyikan hal-hal yang dapat mengurangi idealisasi diri tersebut. Teknik ini antara lain adalah dengan menyembunyikan kesenangan-kesenangan aktor yang tidak kompatibel

dengan perannya saat ini (misalnya dengan tidak tampil secara informal pada saat wawancara), atau menyembunyikan kesalahan yang dibuat aktor di dalam persiapan pertunjukan (misalnya dengan menyembunyikan fakta bahwa ia tidak tahu jawaban akan sebuah pertanyaan). Lebih jauh Medlin (2008:43) meyakini bahwa perilaku-perilaku semacam itu hanya dapat terungkap di backstage, satu-satunya tempat yang memungkinkan diekspresikannya sisi lain aktor secara terbuka. Dengan kata lain, aktor akan berupaya sebisa mungkin untuk menjaga terpisahnya panggung depan dan panggung belakang. Kegagalan aktor untuk memisahkan front stage dan backstage dapat berakibat pada terganggunya atau bahkan gagalnya peran yang sedang ia mainkan.

Alih-alih menimbulkan gangguan atau kegagalan peran, pengaburan batas antara front stage dan backstage dalam panggung dramaturgi AIM memberikan efek yang berbeda. Dengan hilangnya batasan yang jelas antara kedua sisi panggung ini, audiens mampu memiliki akses ke area yang dipersepsikan sebagai backstage dan berkesempatan melihat perilaku-perilaku AIM yang umumnya hanya ditampilkan di backstage. Melalui akses semacam ini, Peneliti mendapati indikasi bahwa audiens dapat membandingkan sikap AIM di front stage dan di backstage, dan merasa telah mendapati figur AIM yang otentik serta tidak berupaya menyembunyikan hal-hal tertentu. Adanya persepsi semacam ini dimungkinkan dalam dramaturgi, sebagaimana Goffman menyatakan bahwa mungkin saja aktor memiliki persepsi terhadap apa yang ada di seluruh

bagian panggung dengan maupun tanpa akses ke sana (Medlin, 2008:42).

Analisis yang menunjukkan bahwa segala kekurangan AIM ini justru berbalik menjadi kekuatannya, divalidasi oleh pendapat “Hoe” sebagai berikut:

“Kadang-kadang kelemahan beliau [AIM – Pen.] jadi kelebihan. Pilihan katabeliau terbatas. Spektrum (kata-kata)nya sangat sempit karena (beliau) bukan orang politik. Di bisnis pun juga tidak pandai bicara (karena) beliau itu tipikalnya orang pekerja... (Namun) kekurangan beliau... justru dilihat publik sebagai kelebihan. Tokoh yang terlihat tidak tricky, tidak berbelit, tidak njelimet [rumit – Pen.], kalau menjelaskan apa adanya. Beberapa kali hal tersebut sempat menjadi kekurangan, tapi pesonanya (justru) seperti itu.” (Wawancara “Hoe,” 7 Maret 2018)

Di sisi lain, pengaburan batas antara front stage dan backstage semacam ini memberikan manfaat pada kepemimpinan AIM. Goffman menyatakan bahwa karena hal-hal yang disembunyikan sebagaimana disebut Peneliti diatas, maka aktor biasanya menegakkan batasan-batasan antara sisi panggung yang berbeda (Medlin, 2008:42). Namun berdasar pengamatan Peneliti, karena batasan ini tidak diciptakan baik oleh AIM maupun orang-orang di sekitarnya (dalam hal ini, pihak protokol Bupati), maka audiens tidak terlihat canggung atau memiliki batasan sikap pada saat berinteraksi dengan AIM. Peneliti melihat bahwa perilaku semacam ini pada gilirannya memberikan keleluasaan bagi audiens untuk membicarakan apapun secara terbuka, tanpa terlihat ada rasa kekhawatiran akan konsekuensi negatif akibat membicarakan hal tersebut. Kejujuran sikap dari audiens seperti itu memberi AIM perspektif yang otentik terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Pandangan Peneliti ini

didukung oleh pernyataan AIM sendiri, yang dalam berbagai kesempatan merumuskan titik permasalahan berdasarkan informasi yang disampaikan pada dirinya melalui berbagai saluran yang berbeda-beda, namun memiliki isi pesan yang sama (Wawancara AIM, 14 Februari).

3. Kontrol AIM Terhadap Informasi

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, agar pertunjukan dramaturgiberlangsung sejalan dengan definisi yang telah ditetapkan aktor, ia melakukan kontrol terhadap informasi yang terpapar di front stage. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengkomunikasikan informasi tertentu pada audiens secara lebih mendalam (Medlin, 2008:47).

Dalam menjalankan interaksi dengan masyarakat Polewali sebagai audiensnya, AIM terindikasi sebisa mungkin memasukkan elemen spontanitas dalam interaksi tersebut. Hal ini Peneliti lihat sebagai bentuk konsistensi terhadap preferensi AIM terhadap metode penciptaan panggung yang spontan dan tidak terduga. Namun lebih jauh lagi, Peneliti melihat bahwa meskipun sebuah acara sesungguhnya tercipta dengan Metode I (terantisipasi dan terjadwal), namun bagi audiens kebanyakan, hal itu dapat terlihat sebagai panggung yang tercipta dengan Metode II dan bahkan Metode III, yaitu panggung yang spontan dan natural.

Indikasi ini Peneliti peroleh antara lain ketika AIM berpartisipasi dalam Festival Budaya (18 Februari 2018). Dalam kegiatan ini, AIM dijadwalkan untuk bersama-sama dengan para pimpinan daerah lainnya, para kepala dinas, staf Pemerintah Kota, dan komunitas seniman melakukan parade

sepanjang jalan protokol Mr.Muh Yamin dengan kostum daerah Khusus untuk AIM dan para pimpinan daerah, mereka direncanakan akan melakukan parade dengan naik becak. Pada saat pelaksanaannya, setelah sekitar 30 meter, ia secara mendadak memutuskan untuk turun dari becak dan berjalan kaki sepanjang sisa parade. Peneliti melihat bahwa dengan berjalan kaki tersebut, ia lebih leluasa untuk menyapa dan menyalami satu persatu warga yang berbaris di pinggir jalan, dan terkadang berbincang dengan warga secara singkat. Ini adalah hal yang nyaris tidak dapat AIM lakukan apabila ia tetap berada diatas kuda. Kejadian tersebut memperkuat dugaan Peneliti bahwa AIM sangat mengutamakan aspek interaksi dalam setiap kegiatannya. Selain itu, peneliti menilai AIM telah memasukkan unsur spontanitas dalam kegiatan yang sebenarnya sudah terencana tersebut, dan bersalaman dan berfoto dengan AIM.

Kejadian, asumsi, dan pernyataan dari AIM diatas mengkonfirmasi bahwa ia memiliki apa yang disebut Goffman sebagai rekanan (shill), yaitu orang-orang yang berada di tengah-tengah audiens, namun sebenarnya memiliki hubungan dengan para aktor (Medlin, 2008:50). Dalam contoh diatas, rekanan di sini antara lain adalah ajudan Bupati yang berperan untuk membangkitkan reaksi wartawan selaku audiens sebagaimana diinginkan oleh AIM, yaitu hadir meliput kegiatan AIM tanpa menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut telah dirancang sebelumnya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa AIM melakukan kontrol terhadap informasi dalam rangka mengatur jalannya pertunjukan sebagaimana telah ia rancang.

Selain itu, dapat dinyatakan bahwa tindakan kontrol yang dilakukan AIM difokuskan pada upaya menjadikan informasi tersebut tersalurkan secara natural kepada audiens.

4. Manajemen Impresi AIM

Berdasarkan penjabaran diatas, Peneliti melihat kecenderungan bahwa AIM melakukan pengelolaan impresi dalam berinteraksi dengan audiensnya, yaitu masyarakat Polewali baik secara langsung maupun melalui media. Lebih lanjut, apabila dilihat dari perspektif tiga komponen dramaturgi (penciptaan panggung, pengaburan batasan panggung, dan pengontrolan terhadap informasi), Peneliti menduga bahwa AIM mengelola impresinya agar selaras dengan karakter yang ingin ditampilkannya, antara lain sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat; pemimpin yang mendahulukan kepentingan masyarakat; serta pemimpin yang tanggap merespons permasalahan masyarakat.

a. Manajemen Impresi Melalui Sikap Konsisten

Satu elemen yang Peneliti lihat menjadi benang merah dari berbagai impresi yang ingin dibangun oleh AIM diatas adalah konsistensi perilaku. Berdasarkan pengamatan Peneliti, AIM berhasil menciptakan perilaku yang senantiasa sama untuk mendukung ketiga pesan yang Peneliti nilai hendak ia tampilkan diatas. Konsistensi perilaku ini menjadi penting, karena Goffman berargumen bahwa, “adanya setting, penampilan, dan sikap yang konsisten merepresentasikan sebuah tipe ideal yang membangkitkan

perhatian dan ketertarikan terhadap suatu harapan” (dalam Medlin, 2008:38). Dengan kata lain, sikap yang konsisten dari seorang aktor memungkinkan disampaikannya citra-diri tertentu tentang aktor tersebut. Ini sejalan dengan pandangan tentang konsistensi yang umum diterapkan dalam studi mengenai pemasaran politik. Misalnya, Sears dan Funk menyetujui apa yang disebut sebagai Pendekatan Politik Simbol, yang menyatakan bahwa reaksi afektif seseorang terhadap simbol-simbol dalam politik dan hal-hal lain dibangun antara lain melalui konsistensi kognitif (dalam Newman dan Perloff, 2004:29).

Sepanjang periode pengamatan, Peneliti melihat bahwa AIM menjaga konsistensi sikapnya, baik dengan siapapun yang dihadapi. Setiap orang yang ia temui, diajaknya berdialog dengan cara yang simpatik dan menghormati lawan bicara, namun di saat yang sama tidak berlebihan dan tidak bersikap terlalu dekat. Pun tidak ada pengecualian apabila pihak yang dihadapinya adalah pejabat dengan posisi yang lebih tinggi darinya. Pada satu acara yang menghadirkan pejabat tinggi, masyarakat, dan media, Peneliti melihat bahwa AIM menyikapi ketiga kelompok audiens ini dengan cara yang sama. Apabila AIM terlebih dahulu diwawancara oleh media, maka ia akan menyelesaikan wawancara itu, kemudian bertemu dengan pejabat yang sudah menunggu di sampingnya. Pada kesempatan yang lain, beberapa pejabat lain harus mengantri untuk menyalami AIM yang sedang diajak berfoto oleh masyarakat (14 Februari 2018).

Konsistensi serupa juga tampak dari proses yang harus dilalui dalam

rangka menciptakan kesempatan interaksi dengan AIM. Dalam hal ini, Peneliti melihat bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap AIM. Pendapat ini didukung dari analisis minimnya tingkatan birokrasi prosedural yang harus dijalani untuk dapat berinteraksi dengan AIM. Untuk membuat janji, setiap orang akan diminta untuk mengirimkan sebuah surat tertulis, yang kemudian dikirimkan baik secara fisik maupun melalui email ke staf Bupati. Pada kenyataannya, Peneliti mengamati bahwa siapapun dapat datang ke Bupati atau Rumah dinas dan menunggu kehadiran AIM. Apabila AIM datang ke tempat tersebut dan tidak memiliki kegiatan lain yang telah diagendakan, orang tersebut pasti akan ditemuinya (sebagaimana yang terjadi pada 14 Februari, 4 Maret, dan 9 Maret 2018). Akses yang demikian terbuka bagi siapapun terhadap AIM juga dicatat oleh Muaz (2018:127-128). AIM sendiri telah mengkonfirmasi hal ini pada Peneliti, dengan menyatakan bahwa apabila waktunya memungkinkan, ia pasti akan menemui siapapun yang ingin menjumpai dirinya (Wawancara AIM, 14 Februari 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, Peneliti meyakini bahwa konsistensi perilaku AIM semacam ini menjadi salah satu latar belakang bagi keberaniannya memberikan akses backstage kepada audiens. Dalam situasi normal dramaturgi, membiarkan audiens masuk ke area backstage dapat mengungkap hal-hal yang dirahasiakan aktor dari audiens, dan pada gilirannya dapat mengganggu atau bahkan menggagalkan jalannya pertunjukan (Medlin, 2008:43). Dalam konteks dramaturgi AIM, karena

perilaku yang ia lakukan di front stage adalah konsisten dengan perilakunya di backstage, kekhawatiran bahwa rahasia dirinya akan terungkap dapat diminimalisir. Keyakinan Peneliti ini telah divalidasi oleh pernyataan AIM ketika Peneliti meminta izin untuk dapat diberi akses yang seluasnya untuk mengamati dirinya, dan diizinkan karena menurutnya tidak ada bagian dirinya yang disembunyikan, karena dia selalu berperilaku sama dimanapun ia berada (Wawancara AIM, 13 Februari 2018).

Perilaku konsisten AIM semacam ini pada gilirannya mereduksi peluang terjadinya insiden dramaturgi dalam proses interaksi dengan audiens. Dari hasil paparan diatas, dapat diketahui bahwa AIM tidak berupaya menyembunyikan hal-hal tertentu dari kehidupan masa lalunya. AIM tidak memendam berbagai aspek kesenangan pribadinya seperti uraian Goffman, namun ia justru membiarkan publik mengetahui hal-hal tersebut, misalnya kecintaannya pada musik tradisi serta masa mudanya sebagai “anak nakal berambut gondrong” (sebagaimana ia ungkapkan dalam wawancara dengan seorang wartawan tanggal 14 Februari 2018). Hal-hal tersebut, meskipun bukan sesuatu yang lazim bagi Bupati, tidaklah ia tutup-tutupi, sehingga ia meminimalisir terjadinya faux pas atau kecerobohan yang terjadi dengan terungkapnya kesenangan pribadi aktor. Selain itu, konsistensi perilaku AIM di kedua sisi panggung memperkecil kemungkinan audiens memergoki AIM melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas baik di front stage maupun di backstage. Ini mereduksi peluang munculnya gerakan yang tidak diniatkan (*unintended gestures*) oleh AIM,

maupun terjadinya intrusi yang tidak pantas (inappropriate intrusion) oleh audiens.

b. Manajemen Impresi yang Membangun Kepercayaan

Berdasarkan hasil pengamatan dan paparan Peneliti sebelumnya mengenai setting dan personal front AIM, Peneliti menilai bahwa AIM tidak melakukan mistifikasi menurut definisi Goffman, yaitu suatu metode untuk membangun kekaguman audiens melalui penciptaan jarak antara aktor dan audiens (Mulyana, 2018:119). Absennya aspek mistifikasi ini lebih lanjut mengindikasikan bahwa dalam melakukan pengelolaan impresi audiens terhadap dirinya, AIM tidak melakukannya melalui penonjolan atribut-atribut fisik dan sosialnya yang istimewa (Muaz, 2018:121).

Di saat yang bersamaan, Peneliti berargumen bahwa telah terjadi pengelolaan impresi dalam arti yang lebih luas, yaitu pengelolaan impresi yang membawa keuntungan bagi hubungan antara aktor dan audiens. Pada saat berinteraksi dengan perwakilan pedagang wonomulyo (16 Februari 2018), Peneliti mendapati bahwa AIM membangun kesan bahwa dirinya terburu-buru dan waktunya terbatas, namun tetap meluangkan waktu untuk menemui paraperwakilan pedagang, sehingga mengirimkan sinyal kepedulian kepada para pedagang tersebut.

Pada pertemuan yang sama (16 Februari 2018), para pedagang Pasar wonomulyo mengajukan empat permintaan kepada AIM. Dari keempat permintaan ini yang diajukan, AIM langsung mengabulkan dua permintaan pertama, menjanjikan akan mendiskusikan permintaan ketiga dengan

DPRD namun dengan jaminan keberpihakan pada pedagang, serta menyatakan akan mempertimbangkan permintaan keempat setelah melakukan pengecekan ke lapangan. Sepanjang acara, Peneliti menyaksikan ekspresi kepuasan dari para pedagang akan jalannya pertemuan tersebut, yang terpancar melalui tepuk tangan, komentar verbal yang mengisyaratkan dukungan terhadap ucapan AIM, serta selingan dialog dan humor ringan yang terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan AIM pascapertemuan tersebut, Peneliti mendapati bahwa AIM sebenarnya telah mengetahui keempat permintaan para pedagang sebelum pertemuan dilangsungkan, dan telah memiliki jawabannya.

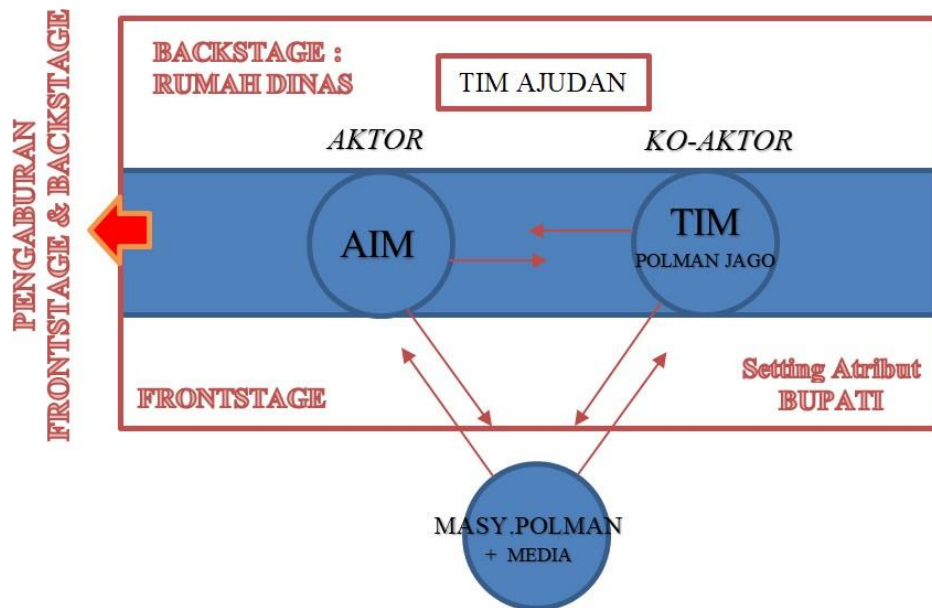
Pada saat pertemuan, ia langsung mengabulkan sebagian dari permintaan tersebut begitu dimintakan oleh para pedagang. Hal ini menurutnya perlu, agar para perwakilan merasa negosiasi mereka berhasil dalam dialog tersebut (Wawancara AIM, 13 Februari 2018). Peneliti melihat hal ini pada gilirannya berpotensi membangun impresi yang positif dari para pedagang Wonomulyo terhadap keberpihakan AIM pada mereka. Pada saat yang bersamaan, AIM sengaja untuk tidak serta-merta mengabulkan seluruh permintaan mereka, agar “prosesnya tidak terlihat terlalu mudah” (Wawancara AIM, 13 Februari 2018). Hal ini Peneliti lihat sebagai upaya AIM untuk mempertahankan impresi positif yang sudah terbangun dari pertemuan saat itu, agar tetap berada di level yang sama pada pertemuan selanjutnya, ketika AIM kemudian membawa kabar baik untuk

mereka.

Hal tersebut konsisten dengan perilaku AIM di masa lampau yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam mengangkat namanya ke skala regional, yaitu proses pemindahan pedagang barang bekas di kawasan pekkabata. Tercatat AIM melakukan 4 kali proses dialog tatap muka dengan para para pedagang, sebelum akhirnya mereka bersedia direlokasi ke tempat baru di kawasan pekkabata melalui proses swadaya yang damai. Pada pertemuan pertama, para pedagang hadir didampingi lembaga swadaya masyarakat, dan membuat AIM menahan diri untuk tidak membahas isu relokasi. Hal ini Peneliti lihat sebagai refleksi belum adanya rasa percaya dari para pedagang terhadap AIM. Sedangkan pada pertemuan selanjutnya, AIM dapat berbicara mengenai relokasi tanpa mendapatkan resistensi dari para pedagang. Keberhasilan AIM untuk mengkomunikasikan rencana relokasi dengan damai seperti ini dipandang Peneliti sebagai indikasi lain dari kemampuan AIM untuk secara konsisten menumbuhkan impresi positif terhadap dirinya melalui 4 kali pertemuan tersebut, agar mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Strategi menjalin dialog secara terus-menerus untuk membangun kepercayaan berikut alasannya telah diungkapkan langsung oleh AIM sebagai berikut:

“(Kalau ada warga yang salah, beritahu bahwa tindakan) dia itu keliru ... (Kita) beritahu dia, bahwa dia itu keliru ... Tapi ya bukan cuma sekali (atau) dua kali dialog, (bahkan bisa) sampai 4 kali (dialog) seperti yang pertama dulu itu. (Semua itu tujuannya) untuk mendapatkan trust dan kepercayaan. (Awalnya susah, tapi) sesudah dapat, gampang sekali mindahin ini dan itu. Tiga (atau) empat kali (berdialog) sudah ketemu (solusinya).” (Wawancara AIM, 13 Februari 2018)

Hasil pengamatan, kejadian historis, dan pernyataan AIM tersebut Peneliti lihat sebagai beberapa indikator yang menunjukkan bahwa AIM memanfaatkan dialog dan komunikasi langsung untuk mendekati diri dengan masyarakat. Dalam setiap proses dialog dan komunikasi, AIM mengedepankan sikap dan perilaku yang menunjukkan kedekatan dengan permasalahan masyarakat di lapangan, menjaga keterbukaan komunikasi dengan masyarakat, serta bersama masyarakat berusaha memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini ia lakukan tidak secara parsial, namun secara kontinyu dan konsisten sepanjang masa kepemimpinannya, sebagai bagian dari apa yang disebut Blumenthal sebagai *Permanent Campaign*. Dialog dan komunikasi semacam itu dijalankan dengan tujuan untuk membangun impresi positif masyarakat Polewali terhadap AIM, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk melanggengkan apa yang menjadi misi AIM. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh selama pengamatan-terlibat dan dari sumber-sumberlain, Peneliti percaya bahwa di dalam komunikasi politiknya, AIM telah memainkan peran untuk membangun impresi positif untuk membangun kepercayaan audiens kepada dirinya, selaras dengan komponen-komponen dramaturgi Erving Goffman. Hasil pemahaman Peneliti dapat diaplikasikan dalam Model Pendekatan Dramaturgi yang telah dipaparkan di Bab 2 penelitian ini, menjadi seperti di bawah ini.



Gambar 4.1 Model Pendekatan Dramaturgi Dalam Aplikasinya

C. KOMUNIKASI POLITIK AIM DALAM TEORI KEAGENAN

1. Hubungan Keagenan Aim Dan Warga Polewali di Pilkada 2018

Sebagai awal kajian terhadap strategi Andi Ibrahim Masdar (AIM) dalam menjaga keseimbangan informasi melalui komunikasi politiknya, perlu adanya latar belakang situasi objektif sebagai pembanding situasi saat pertama kali diindikasikan adanya ketidak-seimbangan informasi antara AIM dan warga Polewali (sebagaimana dipaparkan pada Sub-Bab 4.1.2). Data objektif terkini adalah Pilkada 2018, yaitu Pilkada kedua dan terakhir yang diikuti oleh AIM di Polewali.

Setidaknya terdapat dua hal yang dapat dianalisis dalam Pilkada 2018 terkait dengan topik bahasan tesis ini. Pertama, pada Pilkada 2018, AIM telah memiliki kesempatan dari 2013 sampai 2018 untuk meningkatkan kepercayaan warga Polewali kepada dirinya. Kedua, apa yang dilakukan oleh AIM pada periode pertama diatas mencirikan adanya pelaksanaan permanent campaign, yakni pemerintahan yang dikelola sedemikian rupa untuk melayani kepentingan para pemilih, dengan target untuk menjaga level elektabilitasnya. Tingkat elektabilitas AIM yang tinggi dikonfirmasi oleh hasil beberapa survei di 2018, yang mendapati bahwa pasangan AIM-BeNar berpeluang sangat besar untuk memenangkan Pilkada 2018 (Muaz, 2018:100). Demikian tingginya tingkat elektabilitas tersebut, sehingga Didik Suharto berhipotesis bahwa andaikata tidak berkampanyepun, AIM-NATSIR akan tetap mampu memenangkan Pilkada tersebut (muaz,

2018:1).

Tingginya tingkat elektabilitas pasangan AIM-NATSIR pula yang diduga mempengaruhi minimnya lawan politik mereka dalam Pilkada ini. Periode kekosongan pesaing bagi AIM ini sempat menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Polewali, karena aturan yang ada tidak memungkinkan calon tunggal dalam pemilihan. Kekhawatiran tersebut pada akhirnya tidak terjadi, karena muncul pasangan Salim-Marwan sebagai penantang pasangan petahana.

Hasil Pilkada 2018 di Polewali dirangkum dalam Tabel 3 berikut:		
Nama Pasangan	Perolehan Suara (%)	Partai Pendukung
AIM – Natsir	55,34	PDI-P, PKB, GERINDRA, PAN, PKS, GOLKAR, PKPI
Salim - Marwan	44,65	DEMOKRAT, NASDEM, PPP

Tabel 4.3. Hasil Pilkada Polewali 2018 (KPU)

2. Strategi Komunikasi Politik AIM Dalam Menyeimbangkan Informasi

Berdasarkan kajian terhadap data yang dihimpun baik melalui proses penelitian berperan-serta, wawancara, maupun analisis dokumen, Peneliti menilai bahwa Sikap dan tindakan AIM yang konsisten dengan pemahaman dramaturgi Erving Goffman merupakan bagian dari strategi komunikasi politiknya untuk menjaga keseimbangan informasi. Analisis yang mendasari penilaian tersebut akan Peneliti paparkan dalam dua kategori yang merupakan prasyarat bagi tereduksinya kesenjangan informasi dalam

hubungan prinsipal-agen, sebagaimana dirumuskan oleh Lupia dan McCubbins (dalam Lupia, 2001:4), yaitu:

- 1) Tersedianya informasi mengenai agen dan tindakannya, dan
- 2) Selarasnya kepentingan agen dan kepentingan prinsipal.

a. AIM Menyediakan Informasi Mengenai Diri dan Tindakannya

1) Membuka Akses Informasi Bagi Masyarakat

Sejak menjelang Pilkada 2018, melalui tagline POLMAN JAGO, AIM telah melaksanakan tindakan-tindakan yang menurut Teori Keagenan dapat meredusir terjadinya ketimpangan informasi. Muaz mencatat bahwa dalam membangun strategi kampanye pada Pilkada Polewali 2018, AIM dan timnya menyerap informasi karakter pemimpin yang diinginkan masyarakat, dan berdasarkan hal tersebut, lalu merumuskan hal-hal apa yang bisa mereka sampaikan pada masyarakat. Proses penyerapan ini dilakukan dengan menciptakan banyak panggung interaksi yang berbungkus budaya masyarakat Polewali.

Dalam sudut pandang dramaturgi, apa yang dilakukan AIM diatas konsisten dengan penciptaan panggung, khususnya Panggung yang tercipta dengan Metode II, yaitu metode yang terantisipasi dan spontan. Dengan penciptaan panggung metode ini, aktor sebisa mungkin tampil tanpa terlihat unsurrekayasa sehingga mendorong perwujudan diri se asli mungkin (Barnhart, 1994). Dengan menampilkan dirinya yang asli tanpa rekayasa, AIM memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengetahui sifat dan sikap AIM yang sesungguhnya, yang pada gilirannya

akan mengurangi keraguan masyarakat terhadap figur AIM akibat ketidaktahuan mereka. Oleh karenanya apabila ditinjau dari aspek hubungan keagenan, proses interaksi budaya yang mengedepankan dialog secara langsung juga menguntungkan baik masyarakat Polewali sebagai prinsipal maupun AIM selaku agen, karena pada kesempatan- kesempatan semacam itu kedua belah pihak dapat mengumpulkan informasi tentang satu sama lain.

Lebih lanjut lagi, data yang dikumpulkan Peneliti menunjukkan bahwa AIM konsisten membuka akses masyarakat informasi tentang diri dan tindakannya sepanjang masa jabatannya. Sebagaimana telah diungkap pada bab sebelumnya, akibat telah terjadinya pengaburan batas antara front stage dan backstage AIM, masyarakat dan wartawan memiliki kebebasan luar biasa untuk menemui AIM dan berinteraksi dengannya. Secara khusus, Peneliti mencatat bahwa karena tingginya tingkat kebebasan wartawan untuk mengakses AIM, interaksi dengannya dapat terjadi di berbagai tempat yang tidak umum, seperti di teras belakang Rumah dinas (18 Februari dan 10 Maret 2018), di garasi mobil Rumah dinas (2 Maret 2018), maupun di tengah jalan protokol saat Car-Free Day (4 Maret 2018). Hal ini juga dikonfirmasi oleh data yang diperoleh Muaz (2018:44), bahwa AIM adalah figur yang tidak tertutup dan mudah dimintai waktu untuk wawancara. Hal-hal tersebut semakin memperkuat indikasi sikap AIM yang konsisten memberikan akses publik kepada dirinya, yang pada gilirannya bermanfaat untuk menjembatani ketimpangan informasi.

b. Melibatkan Publik dalam Memecahkan Masalah Publik

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, salah satu kendala untuk menerapkan “kontrak” antara prinsipal dan agen di aras keagenan politik adalah jumlah prinsipal yang banyak dengan beragam kepentingan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengerucutkan tujuan dan menghasilkan satu mekanisme insentif yang optimal (Berliant dan Duggan, 2008:2). Hal ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Adams (sebagaimana dikutip oleh Shapiro, 2018:267) sebagai “faktor Hidra,” yaitu situasi yang menyulitkan agen untuk merekonsiliasi tugas yang diberikan berdasarkan pesan, instruksi, dan insentif yang beragam dari para prinsipal.

Hasil dari pengamatan berperan-serta yang dilakukan Peneliti memunculkan pemahaman bahwa AIM memanfaatkan kesempatan di panggung depan interaksinya untuk mensosialisasikan gagasan dan ide-ide baru kepada audiensnya. Melalui sosialisasi semacam ini, Peneliti melihat bahwa AIM sekaligus dapat mengetahui animo publik terhadap ide dan gagasan tersebut.

Satu kejadian di masa pengamatan berperan-serta yang menyokong asumsi diatas adalah ketika AIM melakukan kunjungan ke Polewaliterkini (14 Februari 2018). Di forum yang spontan ini, AIM secara bebas menjawab seluruh pertanyaan jajaran redaksi senior yang menemuinya, termasuk dua hal yang Peneliti pahami.

Merupakan isu yang masih teramat sensitif. Isu yang pertama adalah

penjajakan pembangunan Taman Alun alun yang sedang dilakukan pihak swasta di Polewali, sedangkan yang kedua adalah mengenai regenerasi pasca kepemimpinan AIM di Polewali. Dari hasil perumusan data-data di lapangan dan beberapa kesempatan dialog dengan AIM, Peneliti mendapati bahwa isu pembangunan Alun alun saat itu masih sensitif karena adanya kekhawatiran keberadaan taman hiburan berskala besar semacam itu akan memicu tingkat konsumerisme masyarakat serta membawa ekses sosial lainnya seperti kemacetan. Sedangkan isu regenerasi menjadi pembahasan yang sensitif, karena waktu pilkada selanjutnya masih relatif lama (2024), sehingga diskusi terlalu dini mengenai calon-calon kandidat dikhawatirkan akan menimbulkan segmentasi massa terlalu dini dan mengganggu stabilitas pemerintahan saat ini.

AIM memberikan argumentasi terhadap keputusannya untuk memaparkan hal-hal yang umumnya bisa dianggap sensitif seperti diatas, sebagai berikut:

“Ya tidak apa-apa (isu-isu sensitif dibicarakan), biar mereka [masyarakat – mau.] tau. Itu biar menjadi isu di masyarakat, tapi isu di bawah meja... Publik harus diajak untuk tahu bahwa ada problem, masalah, ya kan? Ada persiapan untuk kaderisasi, regenerasi, ya (publik) diajak (diskusi). Saya selalu mewacanakan (hal-hal) seperti itu... (Dengan cara) saya lempar langsung, (saya jadi tahu apakah) ada penolakan tidak. Kalau ada penolakan, jauh-jauh hari saya harus nyiapin dulu, apakah saya perlu komunikasi dengan orang-orang yang di lokasi sana [lokasi pembangunan Alun alun di Polewali – Pen.], (dan) dengan masyarakat. Kalau ada (penolakan semakin keras), ya sudah, tidak jadi... Jadi lebih bagus sebuah program itu diwacanakan dulu, diukur penerimaan masyarakat seperti apa, (dan apakah) sesuai dengan kultur kita atau tidak...Jangan pemimpin itu senangnya ‘semau saya.’” (Wawancara AIM, 14 Februari 2018)

Kejadian diatas mencirikan kecenderungan AIM untuk melibatkan publik dalam memecahkan masalah publik. Hal tersebut konsisten dengan apa yang dilakukan AIM tiap tahunnya melalui rembug (secara harfiah berarti “perembukan” atau “perundingan”), yaitu pertemuan antara AIM dan warga Polewali, yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi dengan AIM secara langsung. Dalam kegiatan rembug ini, di bicarakanlah isu-isu yang mengemuka di masyarakat, sekaligus solusi yang disepakati antara pemerintah kota dan masyarakat. Muaz menjelaskan berbagai tingkatan rembug yang terdapat di Polewali sebagai berikut:

“Secara berjenjang ada forum yang dinamakan rembug kelurahan, rembug kecamatan dan rembug kota. Dalam rembug kelurahan, para warga bersama dengan aparat kelurahan duduk bersama membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Dengan begitu warga dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di tempat mereka tinggal. Setelah itu berbagai persoalan di kelurahan itu dibawa dalam rembug kecamatan. Sementara forum yang lebih tinggi adalah rembug kota. Dalam forum tersebut warga bebas bersuara, melancarkan kritik, memberikan penilaian dan mengusulkan program pembangunan.”

Semangat keterbukaan yang ada di dalam kegiatan rembug, yang memungkinkan penyampaian segala hal yang dirasakan masyarakat tanpa halangan, juga ditegaskan oleh AIM sebagai berikut:

“Saya tiap tahun ada rembug kota, setahun sekali. Di kecamatan (juga) ada rembug warga. (Di acara itu, warga) bebas mau ngomong apa

saja, 800 orang (boleh ngomong apa saja) sama saya, setahun sekali juga. Jangan sampai adayang buntet [tersumbat – Pen.], harus semuanya lancar.” (Wawancara AIM, 14 Februari 2018)

Dari hasil analisis diatas, Peneliti memahami bahwa dengan menciptakan panggung interaksi sebanyak dan seterbuka mungkin bagi audiensnya, ia berkesempatan untuk menyerap apa yang menjadi fokus perhatian mereka dan memetakannya secara utuh. Bermodalkan peta pemahaman ini, AIM kemudian dapat mengidentifikasi berbagai titik permasalahan yang bersinggungan, sehingga memberi peluang untuk merumuskan tindakan yang patut menjadi prioritas pemerintahannya. Hal semacam ini pada gilirannya mampu menjawab tantangan yang timbul dalam hubungan keagenan AIM yang diakibatkan oleh banyaknya prinsipal dan keragaman kepentingan mereka.

c. Mendekati Pihak-pihak Ketiga

Dalam aksi dramaturgi AIM yang telah dipaparkan pada Bab 4, dia pada umumnya tidak melakukan seleksi secara khusus untuk penciptaan panggung depannya. Hal ini antara lain karena akses ke panggung AIM sangatlah terbuka, sehingga siapapun dapat datang ke Bupati atau Rumah dinas dan menemuinya, atau menghentikannya di jalan dan berbincang dengannya. Bila dipandang dari sisi AIM, Peneliti mendapati bahwa ia juga tidak memiliki pola yang konsisten dalam menciptakan panggungnya. Pada beberapa kesempatan ketika AIM melakukan penciptaan panggung dengan Metode II (Terantisipasi dan Spontan), ia telah memiliki latar belakang informasi yang mendorongnya melakukan penciptaan tersebut.

Hal ini antara lain terjadi ketika ia berdialog dengan masyarakat yang sedang mengantri di Pelayanan satu atap di Bupati (1 Maret 2018), yang menurutnya ia lakukan karena menerima SMS pengaduan bahwa durasi pelayanan tidaklah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 10 menit (Wawancara AIM, 1 Maret 2018). Namun pada kesempatan lain, peneliti mendapati bahwa panggung AIM tercipta secara spontan dalam arti sebenarnya, yaitu karena AIM sekedar ingin mengetahui situasi terkini. Hal ini terjadi antara lain ketika AIM singgah di sebuah warung kaki lima di kawasan Taman Polewali untuk sekedar berbincang dengan pemiliknya (11 Maret 2018), atau berhenti di pinggir jalan untuk menyapa para tukang parkir (13 Februari 2018).

Terlepas dari hal tersebut, Peneliti mendapati bahwa pada beberapa kesempatan, AIM melakukan penciptaan panggung untuk audiens yang ia pilih secara selektif, karena adanya peran khusus audiens tersebut dalam hubungan keagenan AIM dengan masyarakat Polewali. Hal ini sejalan dengan pandangan Shapiro, yang mengungkapkan bahwa terdapat peran aktif dari apa yang ia sebut Pihak Ketiga, yaitu pihak yang berada diluar hubungan prinsipal-agen. Peran Pihak Ketiga tersebut antara lain adalah sebagai pihak yang mengubah perimbangan informasi, memunculkan atau menghilangkan insentif tertentu, serta mempermudah atau mempersulit peluang agen untuk bersikap oportunistik. Contoh konkrit dari Pihak Ketiga ini umumnya ditemui di hubungan keagenan politik, antara lain kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) dan para pesaing politik

(2018:269).

Selama penelitian, setidaknya ada dua Pihak Ketiga yang dilibatkan sebagai audiens selektif dalam panggung dramaturgi AIM. Yang pertama adalah saat AIM datang ke kantor Polewaliterkini dan berbincang tanpa agenda dengan para redaktur seniornya (14 Februari 2018). AIM menjustifikasi pentingnya mendekati Pihak Ketiga secara aktif sebagai tindakan yang harus dilakukan, karena menurutnya setiap kelompok memiliki berbagai macam kepentingan yang tidak selamanya dapat terakomodasi dalam dialog formal. Hal tersebut ia ungkapkan sebagai berikut:

“Yang sering kita lakukan kan hanya dialog formal, ya kan? (Bagi kita,) pokoknya sudah (dialog). Padahal bukan itu. Proses dialog kan macam-macam. Kadang-kadang ada pendekatan kelompok. (Apabila kemudian) masih ada yang vokal, (maka) ada pendekatan individu dan pribadi. Itu yang jarang dilakukan oleh pemimpin kita.” (Wawancara AIM, 13 Februari 2018)

Secara lebih spesifik, AIM menyatakan bahwa ia menggunakan metode pendekatan personal untuk mendekati berbagai kelompok Islam fundamentalis di Polewali, dengan diajak makan dan berbincang (Wawancara AIM, 18 Februari 2018). Dampak dari tindakan AIM tersebut diungkapkan oleh “Rudi” bahwa melalui kunjungan dan dialog langsung, AIM telah dapat memahami dan mengakomodasi hal-hal yang menjadi perhatian kelompok-kelompok tersebut, dan di saat yang sama mampu meredam munculnya aksi sweeping yang marak terjadi di tempat-tempat lain (Wawancara “Ani,” 10 Februari 2018). Penjabaran ini juga mengindikasikan konsistensi AIM untuk menyeimbangkan informasi antara

dirinya dan masyarakat Polewali selaku prinsipalnya.

d. Mendekati Masalah Tanpa Perantara Birokrasi

Shapiro menggaris bawahi bahwa salah satu hal yang membedakan keagenan politik dengan teori keagenan ekonomi adalah bahwa seorang agen politik dapat mendelegasikan wewenang dan tugasnya kepada pihak lain. Hal ini dilakukan baik untuk menunjukkan kredibilitas mereka, maupun untuk menghindar dari tanggung-jawab dari hal-hal yang tidak diinginkan (2018:271). Dalam ranah pemerintahan, hal ini dapat berarti bahwa seorang pemimpin daerah dapat melimpahkan wewenang mereka kepada jajaran birokrat di pemerintah daerah, antara lain kepada sekretaris daerah dan para kepala dinas. Shapiro lebih lanjut meyakini bahwa hubungan berjenjang semacam ini politik pada akhirnya menjadikan kontrak keagenan politik yang jauh berbeda dan lebih kompleks kontrak keagenan di ranah ekonomi (2018:271). Pada gilirannya, kompleksitas hubungan ini akan menyebabkan tingginya ongkos keagenan politik yang timbul dan pada akhirnya harus ditanggung (2018:272).

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, Peneliti meyakini bahwa AIM sangat memahami bahwa perannya sebagai Bupati adalah untuk melakukan pemecahan masalah-masalah perkotaan yang sebagian besar berada di lapangan. Hal ini mengakibatkan AIM lebih banyak menghabiskan waktu berada diluar kantornya untuk kemudian melakukan interaksi dengan masyarakat melalui penciptaan panggung depan menurut kajian dramaturgi. Ini terungkap dari pernyataannya sebagai berikut:

“Sekarang yang kita kehilangan itu apa? (Kita kehilangan) pemimpin yang bertindak di lapangan. Yang banyak sekali kan yang (ber-)wacana, (ber-)retorika.

... (Seharusnya) tanya (rakyat) masalahnya apa, selesaikan (dengan cara men-)datangi, (lalu me-) rampungkan (masalah tersebut). Yang dibutuhkan rakyat(adalah) itu.” (Wawancara AIM, 13 Februari 2018)

Konsisten dengan pernyataan AIM, Peneliti mencatat bahwa dalam aktivitas keseharian pada umumnya, AIM hanya berada di Kantor Bupati maupun Rumah dinas untuk menerima tamu atau menanda-tangani surat-surat. Hal ini koheren dengan pernyataan sekretaris AIM di Rumah dinas kepada Peneliti, yang menyatakan bahwa apabila tidak ada tamu, AIM hanya berada di kantor selama 15 sampai 30 menit sekedar untuk mengurus surat-surat (wawancara 9 Februari 2018). Hal serupa juga dicatat oleh Muaz (2018:152), yang menyatakan bahwa AIM jarang berlama-lama di kantor dan lebih suka berada di lapangan.

Tindakan AIM menciptakan panggung dramaturgi di tempat-tempat permasalahan memiliki dampak terhadap hubungan keagenan masyarakat Polewali dan AIM. Dengan berada di tengah permasalahan secara langsung, AIM mengekspos dirinya, sekaligus hal-hal yang menjadi perhatian dirinya, kepada masyarakat Polewali secara luas. Hal ini pada gilirannya memberikan kesempatan masyarakat untuk memahami AIM, dan membantu mereduksi ketidak- seimbangan informasi.

Selain itu, dorongan bagi AIM untuk menciptakan panggung juga dilandasi keinginan agar dapat melihat pokok permasalahan secara langsung. Dengan kata lain, dengan melakukan interaksi secara langsung,

AIM dapat mengeliminasi peran perantara, dan melewati batasan-batasan birokrasi. Alasan tersebut tersirat dalam hasil wawancara berikut:

“Pendekatan lapangan... (saat ini) kurang sekali. Saya nggak ngerti, kenapa ya decision itu selalu dari belakang meja. Mestinya, pimpinan apapun, entah daerah, provinsi, (maupun) negara, itu menguasai masalah lapangan. Menguasai problem lapangan. Punya peta lapangan. Kemudian (bisa memiliki) database lapangan komplit. (Setelah itu) baru (bisa) membuat sebuah design policy. (Saat ini) sering kelirunya karena (informasi didapat) hanya (dari) ‘denger-denger.’ Denger-denger dari bawahan, ya kan? Tapi nggak lihat sendiri (ke lapangan). Naah, (begitu) bawahannya ABS [Asal Bapak Senang – Pen.], wah, langsung keliru decision-nya.” (Wawancara AIM, 13 Februari 2018)

Dari analisis diatas, Penulis meyakini bahwa AIM memahami resiko untuk mempercayakan jaringan informasi sepenuhnya kepada jajaran birokrasi. Ia secara eksplisit mengkhawatirkan adanya distorsi informasi yang dapat terjadi apabila ia menggantungkan sumber informasinya dari birokrasi. Oleh karena itu, AIM memilih untuk tidak mendelegasikan tugas pengumpulan informasi kepada birokrasi pihak lain, namun melakukan tinjauan dan keterlibatan secara langsung ke lapangan. Hal ini menurut Shapiro dapat mereduksi kompleksitas hubungan keagenan yang timbul akibat didelegasikannya hal-hal yang seharusnya dijalankan langsung oleh agen, dan pada gilirannya memperkecil ongkos keagenan yang harus ditanggung prinsipal (2018:271).

3. Tampak Selarasnya Kepentingan AIM dengan Kepentingan Masyarakat Polewali

a. Menghindari Glorifikasi Diri

Sebagaimana diimplikasikan oleh Fox diatas, konflik kepentingan dalam hubungan keagenan antara lain terjadi pada saat agen menetapkan kebijakan dengan mengedepankan kepentingan pribadinya (2007:3). Peneliti lebih jauh berupaya mendefinisikan pandangan ini dengan mengaplikasikannya pada situasi ketika seorang agen ingin menunjukkan keberhasilan kerjanya kepada prinsipal. Pada keadaan tersebut, agen yang lebih mengedepankan peran dirinya dalam mencapai keberhasilan tersebut dibanding hasil dan manfaat dari pekerjaan itu sendiri, dapat dikatakan sedang mengedepankan kepentingan pribadinya, yang sesuai dengan definisi Fox diatas tentang “konflik kepentingan.” Contoh umum dari situasi ini adalah pada saat pemimpin daerah memosisikan dirinya sebagai pihak inti yang berperan penting dalam suatu aksi atau kebijakan, dan menyatakan hal tersebut melalui media dan sarana informasi publik. Di satu sisi, hal semacam ini dapat dikategorikan sebagai kecenderungan menuju “glorifikasi diri” (Harris, 1989:538). Namun berdasarkan gambaran umum yang ada, Peneliti melihat bahwa perilaku tersebut di Indonesia seringkali telah dianggap wajar untuk dilakukan oleh para pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah, karena menurut Goffman, hal ini merupakan bagian

dari usaha pemimpin tersebut untuk mengidealisasikan pertunjukan mereka di panggung depan (Mulyana 2018:116).

Data dan perilaku AIM yang Peneliti kumpulkan dan amati selama periode penelitian meyakinkan Peneliti bahwa AIM bukanlah orang yang haus publikasi dan glorifikasi diri. Alih-alih berusaha mendapatkan perhatian seluas- luasnya dalam setiap kegiatan, Peneliti justru melihat kecenderungan AIM untuk menghindar dari publikasi semacam itu. Sebagaimana telah diungkapkanebelumnya, Peneliti sering mendapati bahwa AIM berupaya menjaga setting-nya agar tidak terlalu menonjol sebagai Bupati, antara lain hadir ke acara dan memilih duduk di kursi yang bukan diperuntukkan bagi Bupati (24 Februari dan 11 Maret 2018), serta memilih untuk menumpang kendaraan sederhana yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi Bupati (25 dan 26 Februari).

Sebagai catatan dan indikasi tambahan, di awal-awal periode penelitian, beberapa kali AIM secara verbal meminta Peneliti untuk tidak hanya melihat dirinya, namun juga bertanya kepada masyarakat mengenai dampak pemerintahannya di tengah masyarakat (Wawancara AIM, 13 dan 14 Februari 2018). Selaras dengan hasil penelitian diatas, Peneliti meyakini bahwa permintaan AIM ini memberi sinyalemen tambahan bahwa ia lebih ingin publik memfokuskan atensi kepada hasil kerjanya, dan bukan pada dirinya, dan hal ini merupakan salah satu sikap yang dapat mengurangi permasalahan keagenan yang diakibatkan oleh kepentingan pribadi agen (Fox, 2007:4).

b. Terjaganya Kepercayaan yang Telah Diberikan

Sebagaimana telah diungkapkan pada analisis dramaturgi di bab sebelumnya, AIM terindikasi memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam memanfaatkan setting dan personal front-nya, supaya tidak dipersepsi masyarakat sebagai penyalahgunaan kekuasaan Bupati untuk kepentingan pribadi. Selain itu, AIM juga mengaburkan batas antara front stage dan backstage, yang membuatnya tidak lagi tampil sebagai sosok yang mengidealisasikan dirinya dalam panggung depan. Kekaburan batasan antara dua sisi panggung ini juga telah sedikit banyak menjadi indikator bagi masyarakat bahwa AIM bersikap konsisten baik di depan maupun di belakang panggung, yang mengisyaratkan tidak adanya kepentingan AIM yang berbeda dengan apa yang ia tunjukkan ke masyarakat. Analisis diatas juga menunjukkan AIM melakukan pengelolaan impresi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan audiens terhadap dirinya, selaras dengan apa yang diutarakan Goffman (Mulyana, 2018:113).

Upaya pembangunan kepercayaan ini menjadi krusial dalam pembahasan mengenai hubungan keagenan, karena sesungguhnya biaya keagenan dapat diminimalisir antara lain apabila terdapat situasi yang melanggengkan rasa percaya (sebagaimana diungkapkan Donaldson [1990] dan Wright dan Mukherji [1999] dan dikutip oleh Shapiro [2018:270]). Shapiro lebih lanjut berargumen bahwa apabila seorang prinsipal memilih agen yang ia kenal secara pribadi, atau agen dari lingkungan yang ia percayai, maka dampak dari benturan kepentingan dapat dimitigasi. Hal ini

karena hubungan yang dekat antara prinsipal dan agen memungkinkan adanya kepentingan yang sama, atau bahkan sifat yang altruistik (bertindak sebagai agen dengan niat setulusnya untuk kepentingan prinsipal);

Selain itu, upaya prinsipal untuk memantau agen menjadi lebih mudah karena telah adanya hubungan yang terjalin antara prinsipal dan agen (2018:277).

Pandangan diatas selaras dengan tujuan komunikasi AIM yang didapat Peneliti melalui wawancara, yaitu adalah untuk membangun rasa percaya dari masyarakat Polewali. Berbekal rasa percaya yang telah tumbuh di masyarakat Polewali kepadanya dan jajarannya, ia kemudian mampu memitigasi berbagai tantangan keagenan yang pada gilirannya berpengaruh pada pembenahan masalah-masalah perkotaan, seperti meredusir resistensi pedagang kaki-lima saat relokasi dan menghindari konflik antar-kelompok masyarakat (Wawancara AIM, 13-14 Februari 2018).

Filosofi AIM untuk membangun rasa percaya dari masyarakat ini juga ia tegaskan dalam salah satu bagian tulisannya yang berjudul “Pemimpin Hasil Proses Belajar, Berlatih, dan Introspeksi Tanpa Henti,” sebagai berikut:

“Kepemimpinan di dunia politik ditentukan oleh kepercayaan (trust) yang diterima dari rakyat. Bentuk konkretnya adalah rakyat percaya bahwa sang pemimpin benar-benar berpikir tentang nasib mereka. Percaya bahwa hal-hal yang diungkapkan merupakan hal-hal yang dilakukan pemimpinnya... (Dan) percaya bahwa pemimpinnya setiap saat siap melayani kepentingan mereka” (rahel, 2011:733).

Dengan merujuk pada indikasi-indikasi yang telah dianalisis melalui bingkai pemahaman dramaturgi, Peneliti percaya bahwa AIM memiliki kesadaran akan tugas utama ia sebagai Bupati, yaitu selaku agen dari masyarakat Polewali, yang memiliki wewenang untuk memilihnya dan telah mempercayakan posisi ini kepadanya. Berangkat dari kesadaran ini, maka ia memainkan perannya sebagai aktor sebagaimana digambarkan dalam bingkai dramaturgi Goffman, melalui tindakan-tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang membangkitkan rasa percaya dari masyarakat Polewali selaku audiens. Tumbuhnya rasa percaya masyarakat Polewali AIM ini menjadi modal penting bagi berlangsungnya hubungan keagenan antara AIM dan masyarakat Polewali yang minim ketimpangan informasi.

D. STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK AIM MELALUI JARGON POLMAN JAGO

1. Agitasi Massa Pendukung

Di berbagai kesempatan AIM-NATSIR sendiri sering membangkitkan ego kedaerahan melalui jargon POLMAN JAGO, ini adalah bentuk identifikasi sekaligus klaim atas kemajuan peradaban yang tentunya disadari oleh masyarakat polewali mandar sendiri sebagai daerah yang paling berkembang di Sulawesi Barat, misalnya Ketika momentum kampanye di lapangan gaspol kota polewali AIM mengatakan :

“polewali mandar mesti menjadi kabupaten terdepan di Sulawesi Barat ini adalah tradisi yang mesti kita pegang seerat mungkin, pembangunan, pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, mesti didorong sekuat tenaga agar menjadi lebih maju, mari kita semua

sebagai orang polewali bersatu untuk menciptakan POLMAN yang JAGO..JAGO..JAGOOOOO..”

POLMAN JAGO sendiri kemudian menjadi Tagline pemerintahan, yang sampai saat tesis ini ditulis jargon ini masih digunakan di pemerintahan kabupaten Polewali Mandar.

2. Program Yang Ditawarkan (POLMAN JAGO)

Melalui Tagline POLMAN JAGO, AIM-NATSIR sepakat untuk membawa kabupaten Polman menjadi kabupaten yang berbeda dengan kabupaten lain nya di Sulawesi Barat, tagline POLMAN JAGO merupakan model komunikasi atau isu keagenan yang di plot sebagai wacana untuk merangsang pola komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat misalnya dengan menawarkan program- program seperti : pembangunan sentrum ekonomi bagi para pemuda dan masyarakat polewali mandar, pembangunan Islamic center sebagai sentrum komunikasi umat islam di kabupaten polewali mandar, pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, pembangunan infrastruktur jalan, serta menjadikan polewali menjadi kabupaten dengan penghargaan terbanyak di Sulawesi barat. tagline POLMAN JAGO merupakan penentu bagi gerak dramaturgi dan pola hubungan keagenan pada masyarakat yang dilakukan oleh AIM-NATSIR dalam kontestasi politiknya. ini kemudian yang menurut peneliti menjadi aspek yang penting, rumusan POLMAN JAGO memiliki efek yang signifikan dalam mewakili kebutuhan masyarakat, pun di setiap acara maupun agenda yang dihadiri masyarakat banyak AIM selalu mengakhiri

dengan kalimat POLMAN “jago,,jago,,jago,, kalimat ini seperti telah menjadi bagian dari dirinya dan mewakili semangat warga polman untuk terus maju.peneliti berkesimpulan bahwa antara POLMAN JAGO dan AIM sendiri telah menjadi grand issue dalam kontestasi politik kali ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN PENELITIAN

“Politicians are in the business of selling hope to people.”

Seperti yang ditunjukkan di atas, secara akurat menyoroti pentingnya bagi setiap politisi, terlepas dari apakah mereka saat ini berada di kantor atau terlibat dalam proses untuk memformalkan posisi mereka Melalui amandemen konstitusional, untuk menguraikan peringatan bahwa mereka dapat mengeluarkan kepada mereka yang ingin melayani sebagai konstituen mereka.

Memahami ini menjadi lebih penting bagi Indonesia sekarang karena telah memasuki era demokratisasi saat ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Dewi Fortuna Anwar, seiring dengan runtuhnya Orde Baru oleh gelombang reformasi, hiduplah kembali "idealisme demokrasi di Indonesia yang memungkinkan partisipasi politik secara luas melalui sistem pemilihan yang kompetitif dan transparan yang diharapkan dapat menghasilkan.

Pemimpin Dan Pemerintah Baik, Bersih Dan Akuntabel Yang Bertenuh Didedikasikan untuk Kepentingan Bersama" (Dalam Zuhro et al. 2009: xviii). Pandangan Dewi Fortuna Anwar di atas berfungsi sebagai inspirasi utama bagi penulis atas tesis ini. Setelah Indonesia membuat

keputusan untuk mengimplementasikan sistem desentralisasi untuk memperlambat proses memberikan keputusan kepada anggota masyarakat umum yang terpengaruh olehnya (Knight dan Johnson, 2011: 51), penting untuk mempertimbangkan apakah proses ini sedang Berhasil dalam menghasilkan pemimpin yang mematuhi cita -cita demokrasi dan desentralisasi.

Peneliti berangkat dengan latar belakang optimisme dalam tesis ini, menyakini bahwa di tengah sentimen pesimis yang terjadi, masyarakat masih dapat berharap bahwa masih ada pemimpin-pemimpin daerah yang mampu memegang amanat yang disampaikan untuk menjalankan pemerintahan yang baik semangat pemerintahan desentralistik-demokratis, yaitu untuk memajukan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Menggunakan analisis dramaturgis tentang drama Erving Goffman, Peneliti melakukan penelitian tentang komunikasi politik Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar (AIM) menggunakan tagline "POLMAN JAGO" dan mengumpulkan informasi melalui analisis dokumen dan Wawancara. Hasil dari proses analisis ini kemudian digunakan untuk studi kasus tentang hubungan keagenan dunia nyata untuk melihat bagaimana tujuan menggunakan komunikasi politik untuk menangani ketegangan dan perselisihan dengan rakyat Polewali. Merujuk kepada asumsi-asumsi penelitian yang telah dipaparkan di permulaan tesis ini, maka Peneliti menyimpulkan tiga kesimpulan penelitian, berupa :

1. Kesimpulan Pertama

Di Kota Polman terdapat berbagai permasalahan yang terkait dengan hubungan keagenan antara masyarakat dan pemimpin daerahnya. Kemudian permasalahan tersebut terjadi sejak perubahan sistem pemerintahan yang dialami Polewali (sebagaimana terjadi di seluruh daerah lainnya di Indonesia), yaitu dari kepemimpinan sentralistik-otoriter menjadi sistem desentralistik-demokratik, sehingga wewenang penentuan pemimpin daerah kini sepenuhnya ada di tangan masyarakat Polewali. Dalam proses pemilihan pemimpin dan pengawasan terhadap kinerja pemimpin tersebut sesudah dipilih, masyarakat Polewali dihadapkan pada situasi adverse selection (tidak mengetahui kompetensi pemimpin yang mereka pilih) dan moral hazard (tidak mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan pemimpin mereka). Peneliti berasumsi bahwa AIM telah secara konseptual memahami adanya permasalahan keagenan dalam hubungannya dengan masyarakat Polewali. Kesadaran terhadap kondisi demografis Polewali yang merupakan kumpulan berbagai aliran politik dan budaya, yang berimplikasi terhadap adanya keragaman (Adams dalam Shapiro, 2018:267), menjadikan AIM meletakkan mitigasi permasalahan keagenan ini prioritas penting dalam kepemimpinannya, antara lain melalui proses komunikasi politik. AIM dalam menjalankan komunikasi politiknya secara garis besar melakukan apa yang umum dilakukan individu ketika berhadapan dengan keragaman, yaitu menjaga kendali diri agar dapat mengekspresikan peran yang ia mainkan sesuai dengan situasi yang

diperlukan. Hal ini sebagaimana yang telah dirumuskan Goffman dengan pendekatan dramaturginya. Perilaku AIM yang memainkan peran dramaturginya antara lain terpampang ketika bermanuver dalam proses negosiasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan perasaan saling diuntungkan (win-win solution), sekaligus membangun reputasi diri di mata lawan negosiasinya. Tindakan ini memberi sinyal peran reseptif AIM dalam melakukan pendekatan timbal-balik dengan audiensnya, dan merupakan bagian dari manajemen impresi dramaturgi.

Dalam panggung interaksinya dengan masyarakat Polewali, AIM memperkenalkan unsur spontanitas, yang merupakan hal baru dalam bagi masyarakat Polewali terkait pola komunikasi mereka dengan Bupati. Melalui injeksi elemen spontanitas dalam panggungnya, AIM menciptakan panggung yang tidak direkayasa dan memunculkan perwujudan dirinya dan diri audiens yang seasli mungkin (Barnhart, 1994). Adanya perwujudan yang asli dari audiens pada gilirannya memperkecil peluang terjadinya manipulasi pesan, sehingga bermanfaat bagi AIM dalam menjalankan tugasnya selaku Bupati, yaitu dalam melakukan manajemen Dengan semangat yang sama pula, AIM diyakini berupaya memasukkan unsur-unsur spontanitas dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini termasuk dengan melakukan penyebaran informasi yang dikemas sedemikian rupa, sehingga memperkuat nuansa spontanitas tersebut, antara lain dengan memanfaatkan rekanan (shill) dalam proses penciptaan panggungnya. AIM juga memanfaatkan setting dan personal front-nya dalam aktivitas

kesehariannya. Wujud dari setting dan personal front ini antara lain contohnya berupa rumah dinas, kendaraan dinas bernomor polisi DC-1, seragam Bupatinya, dan tentunya AIM sendiri yang sudah dikenal masyarakat Polewali sebagai Bupati. Berdasarkan analisis berbingkai konsep dramaturgi pula, Peneliti meyakini AIM telah melakukan berbagai dramaturgis yang bermanfaat bagi pola hubungannya dengan masyarakat Polewali. Yang pertama, sehubungan dengan mekanisme penciptaan panggung depan yang spontan, interaksi masyarakat Polewali dengan AIM dapat diinisiasi oleh masyarakat Polewali selaku audiens, bahkan secara spontan sekalipun. Dengan membuka peluang masyarakat untuk menciptakan panggung termasuk dalam situasi spontanitas, AIM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat citra dirinya yang jujur dan tidak termanipulasi (Barnhart, 1994). Hal ini didukung pula oleh tindakan AIM yang sengaja mengaburkan batas antara front stage dan back stage dengan memberikan kesempatan audiens untuk melihat perilaku AIM di back stage, sehingga dapat membandingkan dengan perilakunya di front stage. Dan karena AIM selalu menyajikan perilaku yang konsisten, maka meskipun hanya memiliki sebagian sedikit akses ke back stage, audiens mampu membangun citra-diri mengenai AIM secara utuh (Medlin, 2008:42), yaitu sosok AIM yang otentik, jujur, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Citra-diri AIM semakin dipertegas oleh sikapnya yang secara konsisten menjaga agar citra-diri tersebut tidak tercederai oleh sikap dan perilaku yang umum diasosiasikan kepada seorang pemimpin daerah. Peneliti

teryakinkan bahwa AIM secara konsisten berhati-hati menjaga setting dan personal front, dengan meniadakan sub komponen dari setting dan personal front tersebut yang dianggapnya tidak relevan dengan pelaksanaan tugas pokoknya sebagai Bupati. Dengan melakukan hal-hal tersebut, AIM mampu mempertahankan sebagai sosok pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakat dan berpihak pada mereka. Sikap dan tindakan AIM diatas merupakan bagian dari strategi komunikasi politiknya untuk menjaga keseimbangan informasi antara ia dan masyarakat Polewali, dengan cara-cara yang konsisten dengan proses pereduksian kesenjangan informasi. Sejak awal, AIM telah konsisten menyediakan informasi mengenai diri dan tindakannya, antara lain menciptakan berbagai panggung interaksi, melalui metode khas Polewali POLMAN JAGO. Melalui panggung-panggung semacam inilah AIM mengumpulkan informasi tentang masyarakat Polewali, Dan sebaliknya, interaksi “POLMAN JAGO” juga memberikan kesempatan pada masyarakat Polewali untuk mengumpulkan informasi tentang dirinya (Shapiro, 2018:269). Di saat kepemimpinan AIM, selain keempat model panggung informal tadi, terdapat pula panggung formal yaitu rembug (musyawarah) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Di sini, AIM membuka panggung interaksi yang amat luas antara dirinya, dan sekaligus mengajak publik untuk terlibat dalam proses perumusan solusi bagi permasalahan Kota Polman. AIM juga secara khusus aktif menciptakan momen berinteraksi dengan pihak- pihak yang dapat memiliki pengaruh dalam mengubah

perimbangan informasi yang ada di masyarakat (Shapiro, 2018:26).

2. Kesimpulan Kedua

Point kedua yakni, AIM memahami bahwa setiap kelompok memiliki berbagai macam kepentingan yang tidak selalu dapat terakomodasi dalam dialog formal (Wawancara AIM, 13 Februari 2018), dan ia memilih untuk secara aktif mendekati kelompok-kelompok ini menggunakan proses komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Mandar, sehingga secara konsisten membuka pintu komunikasi, menjaga keseimbangan informasi yang ada, dan pada beberapa kesempatan mencegah terjadinya konflik. Tanpa perantara maupun delegasi kepada pihak lain. Selama periode penelitian, terdapat indikasi bahwa AIM melakukan upaya pemotongan jalur birokrasi dalam pengumpulan informasi, dengan tidak begitu saja bergantung kepada informasi yang disediakan oleh jajaran birokrat Pemerintah Kota Polman, namun secara langsung mengumpulkan informasi itu sendiri di lapangan. Hal tersebut terbukti efektif dalam menjaga kualitas informasi yang ia peroleh, sekaligus mereduksi kompleksitas hubungan keagenan yang timbul akibat proses delegasi. Saat meluncurkan proses komunikasi politik dengan rakyat Polewali, AIM secara konsisten mengumumkan piagam mereka dengan menggunakan Jargon Polman Jago, yang memiliki serangkaian tujuan berbeda dari orang-orang Polewali, di antara hal-hal lain. Piagam ini menyatakan bahwa tujuan akan "memberdayakan orang-orang untuk memutuskan tujuan dan kutipan yang selaras dengan tujuan-tujuan itu. Citra-Diri seperti ini diciptakan dengan

memberikan masyarakat umum kebebasan untuk berinteraksi dengannya agar mereka dapat melihat nilai potensial, yang merupakan tokoh penguasa yang terikat pada kepentingan pribadi. AIM juga menekankan pikiran keselamatan dalam mengelola pengaturan dan informasi pribadinya seolah-olah itu adalah Bupati, serta menghindari situasi apa pun yang akan membahayakan keselamatan pribadi atau kelompok penggunanya. Selain itu, dia juga melarang Sosok memuliakannya lebih dari yang diperlukan. Sebagai contoh, satu hal yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh para peneliti tetapi dibesarkan selama proses evaluasi adalah fakta bahwa masalah dengan Agenan, khususnya dalam politik, tidak mungkin diselesaikan sepenuhnya. Peneliti Mendukung Pandangan Shapiro (2018: 278) Yang Mengatakan Bahwa Meskipun Seorang Pemimpin Mampu Menghilangkan Kepentingan Pribadinya. Saya juga diberitahu bahwa di akhir kepemimpinannya, tidak ada masalah yang masih akan diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah perselisihan interpersonal yang melibatkan orang lain yang hadir di area yang sama dengan Bupati serta beberapa faktor lainnya. Meskipun demikian, pengulas mencatat bahwa AIM lebih mendukung proses komunikasi itu sendiri dibandingkan dengan hasil Tindakan tunggal, karena melalui proses inilah tumbuh modal utama seorang pemimpin, yaitu kepercayaan.

3. Kesimpulan Ketiga

Pada point ketiga ini peneliti berkesimpulan bahwa dalam menjalankan strategi komunikasinya AIM kemudian membawa Jargon polman jago guna sebagai alat agitasi massa dalam hal berfungsi mempengaruhi sisi ego identitas masyarakat polewali mandar,hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat polewali yang memiliki nilai kesejarahan secara kultural.ini kemudian berefek pada keberpihakan masyarakat terhadap dirinya yang sering mengangkat isu “polman sentris” dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap publik.selain itu AIM juga melalui jargon Polman jago membuat sebuah terobosan melalui program pemerintahan POLMAN JAGO dengan menawarkan berbagai macam program-program yang dapat memecahkan segala bentuk persoalan keagenan dan kemasyarakatan dalam upaya menemukan strategi komunikasi yang efektif pada kontestasi pemilu pada 2018.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

1. Implikasi Akademis

Melalui penelitian ini, Peneliti mendapati bahwa telah terjadi pengaburan batas antara front stage dan backstage AIM, yang mengakibatkan audiens dapat merasa memiliki akses – meskipun terbatas – kepada backstage AIM. Namun ternyata penelitian ini juga menunjukkan bahwa akses audiens ke area backstage tidaklah mencederai jalannya pertunjukan sebagaimana dikhawatirkan Goffman (Medlin, 2008:43). Justru dalam studi dramaturgi terhadap AIM, kesempatan untuk mengakses backstage dimanfaatkan oleh audiens untuk mendapatkan perbandingan antara sikap dan perilaku AIM di front stage dan di backstage, dan berhasil mendapatkan gambaran AIM yang apa adanya serta tidak tampak berupaya menyembunyikan hal-hal tertentu.

Salah satu kemungkinan penjelasan bagi pertentangan antara teori dan fakta dramaturgi tersebut adalah konseptualisasi yang dijelaskan Mulyana (2018:106) mengenai adanya ketegangan antara diri yang spontan (yaitu “I”), dan kendala- kendala sosial dalam diri tersebut (yaitu “Me”). Adanya pertentangan tersebut menggaris bawahi asumsi yang mendasari pemahaman dramaturgi, bahwa perilaku aktor akanlah selalu berbeda di front stage dan di backstage. Namun pandangan yang demikian berarti mengabaikan kemungkinan adanya seorang aktor yang tidak terbebani oleh dirinya yang spontan, sehingga tidak terkendala oleh aspek-aspek sosial seperti digambarkan Goffman. Implikasinya, aktor tersebut tidak keberatan

menampilkan spontanitas dirinya itu di front stage, dan juga tidak keberatan audiens menyaksikan spontanitas yang sama di backstage.

Perilaku yang tidak selalu berujung pada ketegangan semacam itu sudah terlebih dahulu dijelaskan dalam teori keagenan. Perrow (dalam Shapiro, 2018:268) menolak kondisi yang selalu memastikan adanya dualisme peran dalam hubungan keagenan, karena hasil observasinya menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi, manusia dapat memiliki sikap altruisme, menghargai pihak lain, dan tidak tertawan oleh perilaku oportunistik atau konflik kepentingan.

Peneliti melihat peluang penolakan serupa dapat pula diterapkan dalam pendekatan dramaturgi. Sesungguhnya Mulyana telah mengindikasikan bahwa dramaturgi sendiri tidaklah membedakan hasil akhir, misalnya apakah seseorang sesungguhnya mementingkan diri sendiri atau sepenuhnya altruistik. Baginya, hasil akhir menjadi tidak penting dalam hal ini, karena dramaturgi sekedar berupaya melihat makna ekspresif dan impresif perilaku seseorang (2018:136). Peneliti menyetujui pandangan Mulyana tersebut dan oleh karenanya berargumen bahwa penelitian ini tidak ditujukan untuk melihat hasil akhir, motivasi maupun ambisi sesungguhnya dari AIM, namun untuk mengetahui bagaimana kemampuannya dalam menyampaikan makna yang ingin ia bangun.

Berlandaskan argumen tersebut, Peneliti berasumsi apabila seorang aktor secara konsisten menunjukkan perilaku altruistik dan tidak menyembunyikan aspek apapun dalam dirinya, maka ketegangan yang

digambarkan Goffman (Mulyana, 2018:106) tidaklah krusial, sehingga kerisauan untuk menegakkan batasan antara front stage dan backstage itu tidak perlu ada. Oleh karenanya, Penulis berpandangan bahwa asumsi-asumsi yang melandasi pendekatan dramaturgi Erving Goffman belum dapat secara utuh mengakomodasi bermacam perilaku dan karakteristik aktor, khususnya apabila strategi komunikasi yang dipakai adalah pendekatan yang cenderung altruistik dan tanpa dibebani sikap menyembunyikan aspek-aspek tertentu tentang dirinya dari audiens.

2. Implikasi Praktis

Penelitian berperan-serta dengan subjek penelitian AIM ini memberi sinyal kepada Peneliti, bahwa meskipun AIM mampu menjadi Bupati karena diusung secara formal oleh partai politik, pada implementasinya hubunganyang terbangun adalah koneksi relasional langsung antara AIM dengan masyarakat Polewali. Melalui proses interaksi antara AIM dan masyarakat, terbangun sebuah hubungan yang memberikan kesempatan bagi AIM untuk belajar mengenai masyarakat, dan sebaliknya terbuka pula kesempatan masyarakat untuk memahami sosok AIM sebagai personal. Dari hubungan semacam ini, terbangunlah reputasi dan keterkaitan dalam jaringan sosial yang kompleks (Shapiro, 2018:269), dan melewati batas-batas formal kepartaian. Pada akhirnya, Peneliti menilai bahwa dari keberhasilan hubungan semacam ini, partai hanya mendapat keuntungan reputasional, yaitu persepsi publik bahwa bahwa partai tersebut telah mengusung orang yang tepat. Namun penghargaan sesungguhnya

diberikan masyarakat kepada figur tokoh itu sendiri, yang memungkinkan terefleksi dalam bentuk dukungan mereka bagi tokoh tersebut di kompetisi politik selanjutnya. Hal ini relevan dengan pandangan Susilo Utomo, bahwa masyarakat saat ini cenderung memilih figur yang baik dan lebih membela kepentingannya, tanpa mempedulikan partai pengusung (Rita dan Widi, 2011:5). Pernyataan Ilham, seorang pedagang kaki lima di Polewali, yang dikutip *Polewali terkini* menggambarkan situasi ini dengan lugas, yaitu bahwa meskipun ia memilih PDI-P di Pemilu 2013, andaikata PDI-P tidak lagi mengusung AIM, ia akan tetap memilih AIM. Ini karena, "AIM lebih memberi manfaat daripada partai. Partai nggak bisa memberi saya pinjaman ketika harus menambah modal dagangan"

Analisis Peneliti diatas mengokohkan pandangan yang semakin kerap dianjurkan oleh sebagian akademisi dan praktisi politik, bahwa dengan latar belakang sosial politik Indonesia yang desentralistis saat ini, sudah bukan masanya lagi seorang pemimpin maupun calon pemimpin terkurung dalam paradigma transaksional lama yang sekedar berusaha membangun kekuatan politik dengan para elite dalam ranah kepartaian, atau sekedar mengandalkan akses petahana terhadap kekuasaan, jaringan, dan informasi dalam birokrasi. Namun lebih dari itu, adalah imperatif bagi tokoh tersebut untuk lebih mencurahkan energi dan perhatian mereka pada membangun hubungan relasional secara langsung dengan masyarakat.

C. KEKURANGAN PENELITIAN

Peneliti mencatat sekurang-kurangnya terdapat tiga hal utama yang dapat mempengaruhi kuantitas informasi yang terkumpul, dan oleh karena itu berpotensi berdampak pada kualitas kesimpulan yang diambil dari penelitian ini. Kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan pada implementasi metodologi dalam penelitian ini, yang diakibatkan oleh kedekatan jarak antara Peneliti dan subjek penelitian, serta relatif pendeknya durasi penelitian. Hal ini dapat dielaborasi sebagai berikut:
 - a. Salah satu konsekuensi dari pengamatan berperan-serta terhadap individu seperti dalam penelitian ini adalah bahwa jarak fisik antara Peneliti dan AIM sebagai subjek penelitian menjadi sangat dekat, dan kehadiran Peneliti disadari penuh olehnya. Oleh karenanya, muncul peluang bahwa kesadaran akan hadirnya seorang pengamat telah menjadi gangguan dalam rutinitas keseharian subjek penelitian, yang berpotensi mengakibatkan perubahan dari kegiatan dan aktivitas subjek tersebut, antara lain adanya kemungkinan subjek membatasi diri atau menyembunyikan dirinya yang asli
 - b. Kedekatan jarak tersebut juga mengakibatkan Peneliti tanpa disadari mempunyai unsur subjektivitas yang tinggi melampaui batas-batas yang dapat diterima secara umum dalam penelitian kualitatif. Sebaik-baiknya Peneliti berupaya untuk mengambil sikap netral dalam

proses pengamatanberperan-serta, kedekatan jarak yang demikian erat tetap dapat mencederai“nuansa bebas nilai” Peneliti terhadap subjek penelitiannya, atau setidaknya menimbulkan apa yang disebut Patton sebagai “netralitas empatik”

- c. Lebih jauh lagi, potensi gangguan terhadap subjek penelitian diatas tidak Peneliti kompensasikan dengan memperpanjang durasi penelitian, sebagaimana dianjurkan Guba sebagai salah satu teknik untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data (Idrus, 2009:145). Implikasi yang mungkin terjadi dari hal ini adalah bahwa Peneliti tidak sepenuhnya berhasil menangkap “realitas keseharian” AIM sebagaimana disyaratkan oleh Goffman, yang berakibat pada tidak utuhnya rekonstruksi dramaturgi AIM dalam tesis ini.
2. Pendeknya periode penelitian juga menjadi kelemahan tersendiri apabila dikaitkan dengan metode yang digunakan yaitu etnografi, yang umumnya dilaksanakan dalam rentang waktu yang relatif lebih lama. Meskipun Peneliti tidak menemukan rujukan spesifik mengenai periode minimal bagi sebuah penelitian etnografi, namun beberapa penelitian terdahulu dilaksanakan selama sembilan bulan sampai satu tahun (lihat misalnya, penelitian Susan Martin dalam Mulyana, 2018:277-290; dan Arrianie,2018). Relatif pendeknya durasi penelitian ini mempertinggi kemungkinan bahwa data-data yang dipergunakan dalam tesis ini belum mencapai “titik jenuh” seperti disarankan Bogdan dan Biklen

(dalam Idrus, 2009:256), serta berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan pada data yang terkumpul.

3. Penelitian terlaksana pada saat periode yang relatif tenang, sehingga terjadi perbedaan jumlah, keragaman, dan kualitas interaksi antara yang menjadi ekspektasi Peneliti di awal penelitian dengan yang sesungguhnya terjadi pada saat penelitian. Hal ini merupakan konsekuensi dari setidaknya tiga faktor berikut:
 - a. Penelitian dilakukan di awal tahun, yaitu saat Pemerintah Kota Polman masih melakukan persiapan dan pengajuan anggaran, yang berakibat implementasi kegiatan di lapangan belum begitu banyak. Akibatnya, kegiatan AIM turun ke lapangan tidaklah seintensif yang umumnya ia lakukan pada waktu-waktu lain ketika berbagai proyek sudah pada tahap implementasi, yaitu pertengahan dan akhir tahun (sebagaimana diungkapkan AIM dalam wawancara 11 Maret 2018), dan hal tersebut berpengaruh pada kuantitas data yang diperoleh Peneliti.
 - b. Apabila dibandingkan dengan sepanjang periode masa jabatan AIM sejak 2018, masa dilaksanakannya penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai masa stabil dalam hubungan antara AIM dan masyarakat Polewali. Hal ini karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada AIM sudah demikian tinggi, sehingga permasalahan serta hambatan dalam proses komunikasi politik AIM tidaklah sebesar permasalahan di periode awal pemerintahannya

(sebagaimana diungkapkan AIM dalam wawancara 11 Maret 2018). Meskipun demikian, Peneliti berupaya melakukan upaya kompensasi melalui pendalaman analisis pustaka serta wawancara dengan “Rudi” dan “Hoe” sebagai dua sosok yang mendampingi AIM sejak menjelang Pilkada 2018. Hal ini dilakukan Peneliti untuk mendapatkan perspektif terkait situasi dan perilaku komunikasi politik AIM di masa- masa awal kepemimpinannya, sekaligus sebagai salah satu mekanisme untuk menguji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

- c. Peneliti juga melihat intensitas interaksi AIM dengan masyarakat Polewali berkurang, karena ia berkonsentrasi pada satu kegiatan besar yang tidak secara langsung melibatkan warga Polewali, yaitu proses tarik-ulur pencalonan AIM sebagai kandidat Gubernur Sulawesi Barat. Hal ini khususnya terjadi pada satu minggu terakhir masa penelitian, ketika AIM banyak mengalokasikan waktu dan energinya untuk berkomunikasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses persiapan Pilkada di Sulbar.
4. Sebagai implikasi dari konsistensi terhadap model hubungan keagenan yang sederhana sebagaimana dipaparkan dalam Bab 2, penelitian ini juga tidak menyentuh aspek-aspek lain terkait peran AIM sebagai aktor dari hubungan keagenan Polewali yang lebih kompleks. Secara lebih spesifik, ada dua komponen penting yang tidak dimunculkan secara mendalam sebagai berikut:

- a. Meskipun melihat beberapa indikasi mengenai peran birokrasi dalam antara AIM dan masyarakat Polewali, Peneliti tidak secara khusus menganalisis gaya dan kemampuan kontrol serta manajerial AIM terhadap birokrasi Kota Polman dan bagaimana pengaruhnya terhadap langkah- langkah pengelolaan hubungan dirinya dengan publik.
- b. Peneliti juga tidak menganalisis bagaimana hubungan keagenan AIM dalam sebuah situasi dengan beragam prinsipal, seperti Wakil Bupati dan para anggota dewan dari DPRD Kota Polman. Selama periode Penelitian, interaksi fisik AIM dengan Wakil Bupati sangatlah terbatas, dan kalaupunada, interaksi tersebut dilakukan secara tertutup diluar pantauan Peneliti, sehingga menyulitkan Peneliti untuk memperoleh data yang berkualitas tinggi. Sedangkan interaksi AIM dengan DPRD Kota Polman sama sekali tidak terjadi selama periode penelitian.

Kedua hal diatas mengakibatkan Peneliti tidak dapat memperoleh gambaran secara utuh mengenai sikap, perilaku dan kemampuan manuver AIM dalam berinteraksi dan melakukan komunikasi politik dengan para aktor-aktor keagenan dan pemangku-kepentingan lain di Kota Polman.

D. SARAN-SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

Berangkat dari pemahaman yang Peneliti peroleh dalam melakukan penelitian ini, Peneliti meyakini masih terbuka peluang untuk mengembangkan kajian dalam tesis ini. Beberapa saran yang Peneliti ajukan antara lain:

1. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas penelitian ini, dapat diadakan penelitian dengan teori, metodologi, dan subjek penelitian yang sama, namun dengan memperpanjang durasi penelitian, agar memenuhi praktek terbaik (best practice) dalam penelitian etnografi.
2. Selain itu, kemungkinan untuk mengkombinasikannya dengan penelitian kuantitatif juga dapat dijajaki untuk menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh. Sebagai contoh, peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan survei untuk mengetahui pengaruh strategi dramaturgi AIM terhadap elektabilitas pasangan AIM-NATSIR yang tinggi pada Pilkada 2018.
3. Menggunakan pemahaman hubungan keagenan, dapat ditelaah interaksi pemimpin daerah dengan aktor-aktor politik lain, seperti wakil Bupati, para pemimpin kota yang tergabung dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), serta para anggota dewan di tingkat daerah, dan jajaran birokrasi. Hal ini karena dengan latar belakang desentralisasi saat ini, seseorang tidaklah menjadi agen tunggal dalam hubungan keagenannya dengan prinsipal, namun terdapat beragam agen yang memiliki hubungan dengan beragam prinsipal, sebagaimana

diasumsikan oleh para peneliti keagenan politik (Shapiro, 2018:271).

4. Dengan memanfaatkan pisau analisis dramaturgi, dapat diteliti aspek-aspek lain dari hubungan antara pemimpin daerah dengan masyarakatnya menggunakan elemen-elemen lain dari kajian telaah dramaturgi Erving Goffman. Secara khusus, dalam rangka mempertahankan fokus dan konsistensi tesis, Peneliti dengan sengaja meredusir pembahasan tentang peran tim dan ko-aktor, baik protagonis maupun antagonis. Tim dan ko-aktor ini sesungguhnya memiliki peran esensial dalam proses dramaturgi (Mulyana, 2018:122), dan dalam meneliti komunikasi politik AIM, Peneliti mendapati indikasi awal bahwa elemen ini dapat dikaji secara lebih mendalam sebagai satu penelitian tersendiri.
5. Sebagaimana telah diungkapkan di awal penelitian, untuk memberi peluang bagi analisis komparatif, penelitian dapat dilakukan dengan memanfaatkan kerangka konseptual yang sama terhadap subjek penelitian yang berbeda, yaitu kepala-kepala daerah di wilayah lain. Kekayaan informasi semacam ini pada gilirannya diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih akurat mengenai situasi kepemimpinan daerah di Indonesia di era desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfian, M. Alfian (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad 431 PB ke-17*. Makassar: Ininnawa.
- Arrianie, Lely (2010). *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Goffman, Erving (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*.
Edinburgh: University of Edinburgh.
- Idrus, Muhammad (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Insan, Dr. Nur (2019). *Kepemimpinan Transformasional, Suatu Kajian Empiris di Perusahaan*. Makassar: Alfabeta
- Lane, Jan-Erik (2000). *The Public Sector: Concepts, Models, and Approaches*, 3rd ed. London: SAGE Publications.
- Lupia, Arthur (2001). *Delegation of Power: Agency Theory*, dalam Neil J. Smelser dan Paul B. Baltes (ed). *International Encyclopedia of the Social and behavioral Sciences*. Oxford. UK: Elsevier Science.
- Mattulada, 1998. *Kebudayaan, Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mulyana, Deddy (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma*

Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: remaja Rosdakarya.

Nasaruddin Koro. Ayam Jantan Tanah Daeng: Siri' dan Pesse, dari Konflik Lokal ke Pertarungan Lintas Batas. Jakarta: Ajuara, 2005.

Nimmo, Dan (1989). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (saduran dari Political Communication and Public Opinion in America). Bandung: Penerbit Remadja Karya.

Alfian, M. Alfian (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama.

Arrianie, Lely (2018). *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Astuti, S.J. Woro (2009). *Meluruskan Demokrasi Lokal, Menggagas Kepemimpinan Daerah yang Ideal di Era Pilkada Langsung*, dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (ed). *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, JIAN-UGM, MAP-UGM.

Banks, Jeffrey dan Rangarajan Sundaram (1993). *Adverse Selection and Moral Hazard in a Repeated Elections Model*, dalam Barnett, William dan Melvin Hinich. *Political Economy: Institutions, Competition, and Representation: Proceedings of the Seventh International Symposium in Economic Theory and Econometrics*. Cambridge University Press.

Goffman, Erving (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: University of Edinburgh.

Griffin, Em (2000). *A First Look at Communication Theory, 4th ed*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Hall, Peter M. (2018). *The Presidency and Impression Management*. dalam Dennis Brissett dan Charles Edgley. *Life as Theater: A Dramaturgical Sourcebook, 2nd ed*. New Jersey: Transaction Publisher.

Hare, Paul dan Herbert Blumberg (1988). *Dramaturgical Analysis of Social Interaction*. New York: Praeger.

- Idrus, Muhammad (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini (2018). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: RaMandarli Pers.
- Knight, Jack dan James Johnson (2011). *The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kotler, Philip and Neil Kotler (1999). *Political Marketing: Generating Effective Candidates, Campaigns, and Causes*, dalam Bruce Newman (ed). *The Handbook of Political Marketing*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Kuswarno, Engkus (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi – Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: WidyaPadjadjaran.
- Lane, Jan-Erik (2000). *The Public Sector: Concepts, Models, and Approaches, 3rd ed*. London: SAGE Publications.
- Lilleker, Darren (2006). *Key Concepts in Political Communication, 1st ed*. London: SAGE Publications.
- Lupia, Arthur (2001). *Delegation of Power: Agency Theory*, dalam Neil J. Smelser dan Paul B. Baltes (ed). *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Oxford, UK: Elsevier Science.
- Mulyana, Deddy (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McNair, Brian (2003). *An Introduction to Political Communication, 3rd ed*. London: Routledge.
- Newman, Bruce dan Richard Perloff (2004). *Political Marketing: Theory, Research and Applications*, dalam Lynda Lee Kaid (ed). *Handbook of Political Communication Research*. New Jersey:

Lawrence Erlbaum Associates.

Nimmo, Dan (1989). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (saduran dari *Political Communication and Public Opinion in America*). Bandung: Penerbit Remadja Karya.

Zuhro, R. Siti *et al* (2009). *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

B. Penelitian dan Jurnal

Devandrey Delmeizar, Muhammad (2017). *Dramaturgi Pada PenyiarRadio*. Skripsi. Jakarta: Universitas Bakrie

Fitri, Azki Zakiatal (2019). *Dramaturgi Pengemis Di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Purwokerto: IAIN

Jamil, Fadly (2016), *Strategi Komunikasi Politik Pilkada Gowa 2015, Studi Kasus Kemenangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo S.H dan H. Abd Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin.

M. Arif, Farida (2014). *Dramaturgi Pemilihan Presiden Indonesia*. Semarang: UNDIP

Medlin, Allison Kay (2008). *Bargain Theater: A Dramaturgical Analysis of a Flea Market*. Tesis. Auburn: Auburn University

Banks, Jeffrey dan Rangarajan Sundaram (1998). *Optimal Retention in Agency Problems*, dalam *Journal of Economics Theory* 82. London: Academic Press.

Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*, dalam *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Shapiro, Susan P. (2018). *Agency Theory*, dalam *Annual Review of Sociology Vol. 31 (2018)*. Illinois: Annual Reviews.

C. DISERTASI & TESIS

Lemon, Andrew Yuichi (2018). *Reputational Concerns in Political Agency Models*. Disertasi. Connecticut: Yale University.

Medlin, Allison Kay (2008). *Bargain Theater: A Dramaturgical Analysis of a Flea Market*. Tesis. Auburn: Auburn University.

D. PUBLIKASI YANG TIDAK DITERBITKAN

Berliant, Marcus dan John Duggan (2008). *Dynamic Political Agency with Adverse Selection and Moral Hazard*. Makalah. Tokyo: The University of Tokyo.

Decentralization and Democratic Local Governance Programming Handbook 2000. Buku panduan. Washington: Center for Democracy and Governance –USAID.

Diamond, Larry (1997). *Is the Third Wave of Democratization Over? – An Empirical Assessment*. Working paper. Indiana: Kellogg Institute.

Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IDRA), 5th Report, 2004. Laporan. Jakarta: The Asia Foundation.

Kedaerahan dan Kebangsaan dalam Demokrasi: Sebuah Perspektif Ekonomi-Politik. Presentasi 20 Maret 2007. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

Laporan Hasil Survei Opinion Leader Jakarta 2011. Presentasi 5 Desember 2011. Jakarta: Laboratorium Psikologi Politik UI dan The Cyrus Network.

Profil Daerah Polewali Mandar 2018. Katalog. Polewali Mandar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Randinelli, Dennis (1999). *What is Decentralization?* dalam *Decentralization Briefing Note*. Working Paper. Washington DC: The World Bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. SITUS INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar

<https://www.polewaliterkini.net>

<https://pakarkomunikasi.com>

Barnhart, Adam (1994). *Erving Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life*.

<http://employees.cfmc.com/adamb/writings/goffman.htm>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional RI.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>